Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 8 No. 1 Januari 2020

- HUBUNGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN PPKN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK SIKAP DEMOKRATIS PESERTA DIDIK (Studi di SMA Negeri 1 Sukoharjo) (Debby Yuliana, Triana Rejekiningsih, Dewi Gunawati)
- KANTIN KEJUJURAN SEBAGAI UPAYA PEMBENTUK CIVIC DISPOSITION (Studi di SMP N 10 Surakarta) (Charistia Nikmah M, Triyanto, Muh. Hendri Nuryadi)
- UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MENCEGAH RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA (Markum, Winarno)
- PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP INTELLECTUAL SKILLS SISWA KELAS XI PADA MATA PELAJARAN PPKN DI SMA NEGERI 1 SUKOHARJO (Sinta Dewi Prihandini, Hassan Suryono, Winarno)
- STRATEGI FKPM (FORUM KEMITRAAN POLRI DAN MASYARAKAT) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta) (Yusnandia Herayu Nurhafida, Moh. Muchtarom, Dewi Gunawati)
- INTERNALISASI NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Pada Siswa Kelas X SMA Negeri Gondangrejo) (Ragil Danu Saputro, Rusnaini, Rini Triastuti)
- PENERAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN PACITAN (Sukarmin, Sarwanto, Moh. Rohmadi)

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 8 No. 1 Januari 2020

- HUBUNGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN PPKN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK SIKAP DEMOKRATIS PESERTA DIDIK (Studi di SMA Negeri 1 Sukoharjo) (Debby Yuliana, Triana Rejekiningsih, Dewi Gunawati)
- KANTIN KEJUJURAN SEBAGAI UPAYA PEMBENTUK CIVIC DISPOSITION (Studi di SMP N 10 Surakarta) (Charistia Nikmah M, Triyanto, Muh. Hendri Nuryadi)
- UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MENCEGAH RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA (Markum, Winarno)
- PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP INTELLECTUAL SKILLS SISWA KELAS XI PADA MATA PELAJARAN PPKN DI SMA NEGERI 1 SUKOHARJO (Sinta Dewi Prihandini, Hassan Suryono, Winarno)
- STRATEGI FKPM (FORUM KEMITRAAN POLRI DAN MASYARAKAT) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta) (Yusnandia Herayu Nurhafida, Moh. Muchtarom, Dewi Gunawati)
- INTERNALISASI NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Pada Siswa Kelas X SMA Negeri Gondangrejo) (Ragil Danu Saputro, Rusnaini, Rini Triastuti) Hal
- PENERAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN PACITAN (Sukarmin, Sarwanto, Moh. Rohmadi)

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH

Jurnal PPKn ISSN 2303-9412

Penerbit

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (AP3KnI) - Jawa Tengah

Mitra Bestari

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka)
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Harmanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Nurul Zuriah, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi

Dr. Triyanto, SH., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Ketua Penyunting

Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. (Universitas Sebelas Maret)

Anggota Dewan Penyunting

Raharjo, S.Pd., M.Sc Arif Kriswahyudi, S.Pd. Dewi Wulandari, S.Pd.

Alamat Redaksi

Gedung C FKIP UNS
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta
Telp/Faks. 0271-646939
Email: jurnal_ppkn@yahoo.com
Website: http://ppkn.org

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya Jurnal PPKn Vol. 8 No. 1 Januari 2020. Jurnal ini diterbitkan oleh asosiasi PPKn wilayah Jawa Tengah.

Jurnal ini berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn). Jurnal ini dapat menjadi referensi dalam penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang PPKn. Sasaran pembaca dari Jurnal ini adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati PPKn.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para editor dan tim penyunting jurnal yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini.

Surakarta, Januari 2020

Redaksi

DAFTAR ISI

•	HUBUNGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN PPKN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK SIKAP DEMOKRATIS PESERTA DIDIK (Studi di SMA Negeri 1 Sukoharjo) (Debby Yuliana, Triana Rejekiningsih, Dewi Gunawati)1-14
•	KANTIN KEJUJURAN SEBAGAI UPAYA PEMBENTUK CIVIC DISPOSITION (Studi di SMP N 10 Surakarta) (Charistia Nikmah M, Triyanto, Muh. Hendri Nuryadi)15-36
•	UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MENCEGAH RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA (Markum, Winarno37-59
•	PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP INTELLECTUAL SKILLS SISWAKELAS XI PADA MATA PELAJARAN PPKN DI SMA NEGERI 1 SUKOHARJO (Sinta Dewi Prihandini, Hassan Suryono, Winarno)
•	PARTISIPASI PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM NON LITIGASI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI (STUDI PADA FORUM WARGA BURUH MIGRAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP) (Robiat Tri Cahyani, Machmud Al Rasyid, Triana Rejekiningsih)
•	INTERNALISASI NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Pada Siswa Kelas X SMA Negeri Gondangrejo) (Ragil Danu Saputro, Rusnaini, Rini Triastuti)
•	PENERAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN PACITAN (Sukarmin, Sarwanto, Moh. Rohmadi)91-96

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN PPKN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK SIKAP DEMOKRATIS PESERTA DIDIK

(Studi di SMA Negeri 1 Sukoharjo)

Debby Yuliana, Triana Rejekiningsih, Dewi Gunawati Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta e-mail: debbyyuliana@student.uns.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk, (1) mengetahui penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn sebagai upaya membentuk sikap demokratis pserta didik (2) mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran PPKn sebagai upaya membentuk sikap demokratis peserta didik (3) mengetahui solusi terhadap kendala penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn sebagai upaya membentuk sikap demokratis peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data didapat dari informan, dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen dan angket. Validitas data menggunakan trianggulasi data, trianggulasi metode dan trianggulasi sumber. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, 1) Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam kurikulum 2013 sebagai upaya membentuk sikap demokratis dilaksanakan dengan 3 tahap yaitu: (a) Perencanaan pembelajaran berbasis masalah sebagai upaya membentuk sikap demokratis peserta didik : pada tahap perencanaan guru menyiapkan Silabus dan RPP yang digunakan sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dikelas untuk meningkatkan sikap demokratis peserta didik. (b) Pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah sebagai upaya membentuk sikap demokratis peserta didik dilakukan dengan membagi siswa kedalam kelompok diskusi untuk menganalisis masalah: (c) Evaluasi pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan Guru yaitu penilaian individu dan 2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah: Kendala Guru: (a) Peserta didik yang kurang aktif, peserta didik belum mengoptimalkan kemampuan (b) Alokasi waktu yang kurang. Kendala Siswa: (a). Peserta didik terganggu dengan suasana kelas yang ramai sehingga berdampak tidak fokus dalam pembelajaran (b) Kelompok yang dibentuk heterogen sehingga peserta didik yang tidak terlalu akrab dalam kelompok sulit diajak kerjasama 3) Solusi terhadap permasalah penerapan model pembelajaran berbasis masalah sebagai upaya membentuk sikap demokratis peserta didik.: (a) Guru lebih tegas dengan peserta didik yang ramai sendiri saat presentasi berlangsung, memberikan reward kepada peserta didik yang aktif bertanya (b) Siswa selalu dilatih terus untuk berani dalam mengutarakan pendapat, serta diberikan motivasi. (c) Siswa diberikan perhatian khusus dengan dievaluasi satu

Kata Kunci: Pembelajaran berbasis masalah, Sikap Demokratis, Peserta didik

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran wajib pada jenjang sekolah dasar hingga menengah yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki visi untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang memiliki prinsip konsisten serta memilki semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga mampu memahami secara mendalam mengenai NKRI.

Sedangkan misi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah agar bangsa Indonesia terhindar dari pemerintahan yang ortoriter seperti pemerintahan yang membatasi hakhak rakyatnya sebagai warga negara yang menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. (BSNP, 2006: 155)

Maka dari itu, hendaknya dalam kehidupan sehari-hari nilainilai demokrasi dapat diaktualisasikan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memiliki fokus utama untuk membentuk warga negara yang demokratis. Dengan pendidikan, nilai-nilai demokrasi bisa mulai dibentuk serta ditanamkan kepada siswa. Karena di dalam kurikulum nilai demokrasi dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan berbagai prasarana sarana dan yang mendukung seperti materi pelajaran, media, metode, model, strategi, maupun alat evaluasi.

Membentuk karakter masyarakat yang bertanggungjawab dan mengedepankan kepentingan umum." Mata pelajaran PPKn di sekolah dirancang untuk mempersiapkan generasi muda. sehingga di masa yang akan datang ketika dewasa mampu berperan aktif dalam lingkungan secara masyarakat.

itu Oleh sebab Guru Pendidikan Kewarganegaraan harus keterampilan memiliki untuk mengorganisasikan proses pembelajaran mulai dari penyusunan satuan pembelajaran, memilih dan menggunakan strategi, teknik. metode agar ketiga komponen atau aspek utama tersebut tercapai.

Menurut Hermino (2014: 10)

"Kemajuan perkembangan pendidikan maupun peserta didik tercermin dari seorang guru yang luar biasa yaitu guru yang memiliki intensionalitas (memiliki tujuan) berupa kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diharapkan."

Pendidikan nasional Indonesia saat ini menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang artinya proses pembelajaran dirancang agar peserta didik dapat mengkonstruksikan aktif konsep, prosedur, hukum atau melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan merumuskan hipotesis, atau mengumpulkan data, menganalisis menarik kesimpulan, data, mengkomunikasikan.

Namun kenyataan di lapangan, ketika peneliti melaksanakan magang kependidikan 2 di SMK Negeri 2 Karanganyar diperoleh data dari dokumen RPP yang dirancang oleh guru. Guru Pendidikan Kewarganegaraan masih menggunakan metode konvensional yaitu ceramah, hal tersebut menyebabkan gurulah sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran bukan Kekurangan siswa. pelaksanaan metode ceramah dalam proses pembelajaran yaitu guru hanya mengutamakan pada muatan aspek kognitif berupa penerangan serta penanaman konsep materi kewarganegaraan sedangkan aspekaspek sikap atau afektif seperti pendidikan karakter yang memuat demokratis masih sikap sangat kurang.

Berdasarkah data observasi didapati ketika peneliti melaksanakan magang kependidikan 3 di SMA Negeri 1 Sukoharjo, selama proses pembelajaran di kelas X IPA7 dan X Bahasa . Diperoleh data yaitu : Ketika Guru meminta setiap siswa maju kedepan kelas untuk mempresentasikan tugas ke depan kelas. Siswa lainnya bersikap tidak peduli dan malah melakukan kegiatan lain yaitu bermain handphone. Terdapat 36 siswa pada setiap kelas namun hanya siswa yang ada dimeja barisan depan yang mendengarkan presentasi siswa lainnya dan memfokuskan pandanganya kedepan, 22 siswa lainnya kurang memperhatikan karena asik bermain handphone dan fokus terhadap tugas mereka sendiri. Hal ini berarti sikap saling menghargai siswa lain masih rendah. Yang kedua ketika pembelajaran berlangsung, ketika Guru melakukan tanya jawab dengan melontarkan pertanyaan secara langsung kepada siswa, dari 36 siswa hanya 6 siswa yang ditunjuk untuk menjawab. Jadi tidak semua siswa dilibatkan untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian tanggung jawab siswa yang rendah dilihat ketika sedang dibentuk kelompok diskusi menjadi kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa, selama diskusi didapati dalam kelompok hanya 3 siswa yang berpikir dan saling mengutarakan pendapatnya. Sisanya yang tidak ingin berkerjsama di dalam kelompoknya ketika ditanya alasan mereka tidak ikut berdiskusi vaitu karena merasa sudah terdapat siswa lain yang mengerjakan tugas tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, guru seharusnya mampu keterampilan dalam memiliki mengelola kelas dengan memiliki strategi, model, metode, media yang tepat agar dapat mendorong siswa mengembangkan tingkah laku sesuai tujuan pembelajaran dan dengan pendekatan dalam kurikulum 2013. Pada proses pembelajaran Guru PPKn SMA Negeri 1 Sukoharjo telah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah sebagai salah satu solusi agar mampu membentuk sikap demokratis peserta didik.

Menurut Ibrahim dan Nur (2002: menyebutkan 2) bahwa pembelajaran berbasis masalah sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis (tingkat tinggi) peserta dengan berorientasi didik pada masalah dalam kehidupan nyata termasuk didalamnya mengenai materi belajar.

Kani Ulger (2018: 7) dalam *Interdisciplinary* **Journal** of Problem-Based Learning mengemukakan bahwa "Critical thinking includes conceptualizing, analyzing, synthesizing, and evaluating information that

by generated observation, experience. reasoning. communication." Terjemahan dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu pemikiran kritis termasuk membuat konsep, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang dihasilkan pengamatan, oleh pengalaman, penalaran, atau komunikasi.

Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran vang akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa serta mendukung siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran secara kelompok (tidak individual) yaitu dapat berpasangan mengembangkan untuk saling kecakapan dalam arti menemukan dan memecahkan suatu masalah, pengambilan keputusan, berpikir secara logis, berkomunikasi dan bekerja sama. Sehingga penerapan pembelajaran model berbasis masalah ini dapat menumbuhkan serta membentuk sikap demokratis siswa karena dalam penerapannya siswa akan dilatih untuk mampu menghargai pemikiran ataupun pendapat siswa lainnya, berani mengeluarkan pendapat sesuai dengan kemampuan yang sudah dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penting untuk meneliti bagaimana pembelajaran PPKn di sekolah dalam membentuk sikap demokratis peserta didik, sehingga siswa dapat berperan aktif di masa yang akan datang sebagai warga negara yang dapat menggunakan hak-haknya dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, peneliti maka memilih judul

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sukoharjo, karena permasalahan mengenai sikap demokratis ditemukan pada sekolah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti tidak akan membuktikan atau menolak suatu hipotesis yang dirancang sebelum penelitian namun data yang didapatkan akan diolah secara nonnumerik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Nazir (2009: 55) "pendekatan deskriptif membuat gambaran atau kejadian" yang sesuai dengan penelitian vang akan dilakukan karena data yang dihasilkan mendeskripsikan mengenai strategi pembelajaran kewarganeagaraan watak guna penguatan nilai kesetaraan gender.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi didapat dari informan. vang observasi. dokumen, tempat dan Teknik pengambilan peristiwa. sampel dalam penelitian ini yaitu dengan teknik purposive sampling karena dengan pertimbangan sampel yang diambil merupakan orang yang menerapkan model pembelajaran berbasis masalah yaitu guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan orang-orang merasakan dampak yang model ersebut penerapan yaitu peserta didik kelas X yang diajar oleh guru tersebut. Data diperoleh dari informan kunci yaitu Guru Mata Pelajaran PPKn serta informan pendukung vaitu wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan peserta didik.

pada penelitian ini Data melalui dikumpulkan teknik wawancara, observasi. studi dokumen, serta angket dan tes pilihan ganda. Wawancara dilakukan dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Guru PPKn, serta peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Sukoharjo. Observasi dilakukan ketika proses pembelajaran PPKn di dalam kelas, serta studi dokumen dengan menganalisis dilakukan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dirancang oleh Guru Mata Pelajaran PPKn. Selain itu, penelitian data dalam ini dikumpulkan melalui angket sikap demokratis peserta didik dalam pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran PPKn.

Teknik uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah trianggulasi metode dan trianggulasi data. Menggunakan trianggulasi data karena pengumpulan data dilakukan dengan berbagai jenis data dan tentunya dengan data dengan jenis yang sama namun dengan beberapa sumber yang berbeda. Sedangkan digunakannya trianggulasi metode yaitu data yang telah terkumpul di dapat dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu observasi. wawancara dan analisis dokumen serta angket dan tes pilihan ganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Model
Pembelajaran Berbasis
Masalah Dalam Kurikulum
2013 Pada Mata Pelajaran
PPKn Sebagai Upaya
Membentuk Sikap Demokratis
Peserta Didik

Guru PPKn kelas X menerapkan model pembelajaran berbasis

masalah pada bab 2 yaitu materi ancaman negara dalam berbagai bidang dalam bingkai bhineka tunggal ika KD 3.6. Penelitian ini dilaksanakan menjadi tiga tahap vaitu tahap perencanaan pembelajaran berbasis masalah. proses pelaksanaan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dan evaluasi penerapan pembelajaran.

a. Tahap Perencanaan

RPP yang dirancang Guru telah sesuai dengan desain kurikulum 2013 yang terbaru yaitu dengan pendekatan saintifik 4C (Critical Thingking, Creative, Colaborative, Comunicative). Pendekatan tersebut pengganti dari pendekatan (Mengamati, Menanya, Mengasosiasi, Menalar. Mengkomunikasikan). Perencanaan Model Pembelajaran **Berbasis** Masalah sebagai upaya membentuk sikap demokratis peserta didik terlihat didalam RPP yaitu pada kegiatan 4C tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1) Kebebasan berpendapat Pada saat tanya jawab dalam kegiatan critical thingking. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar vang disajikan. Kemudian dalam **RPP** pada kegiatan communication peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok lain diberikan kebebasan boleh mengemukakan pendapat mengenai hasil presentasi yang dilakukan oleh temannya, kemudian bersikap kritis dengan bertanya suatu pertanyaan

- mengenai jawaban yang telah dipresentasikan.
- 2) Komunikasi atau bekerjasana dengan kelomopok Peserta didik saling berkerjasama dalam kelompok kegiatan pada collaboration di dalam RPP untuk saling diskusi dalam pemecahan masalah. Indikator tersebut dilihat saat semua peserta didik bekerja sama memecahkan masalah, dibagi-bagi dengan secara adil, sehingga tidak ada yang hanya diam.
- 3) Menghargai pendapat orang lain Dalam **RPP** pada saat kegiatan Comunication, didik peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan kelompok lain mendengarkan tanpa menyela. Kemudian pada saat collaboration dalam kelompok diskusi saling mendengarkan setiap pendapat antar teman tanpa membeda-bedakan agar mampu solusi mencari permasalahan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada langkah-langkah pembelajaran PPKn yang dilakukan, guru telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai demokratis yang hendak dicapai dari kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Mulai dari tahap pendahuluan, inti, penutup. . Langkah-langkah yang diterapkan oleh guru PPKn untuk siswa yaitu memberikan motivasi

pertanyaan seputar materi serta berbagai contoh kasuskasus mengenai ancaman membagi negara, siswa kedalam kelompok kecil untuk berdiskusi, guru menyajikan masalah yang didiskusikan dalam kelompok yang dibimbing oleh guru, kemudian hasil diskusi kelompok yang akan dipresentasikan di kelas, dan evaluasi bersama dengan Guru. Lebih lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegiatan pendahuluan pembelajaran

Pada kegiatan awal / pendahuluan dalam pembelajaran guru melakukan penanaman pendidikan karakter yaitu guru mengawali pembelajaran dikelas dengan mengajak peserta didik berdoa terlebih dahulu, nilai karakter yang dikembangkan vaitu nilai religius spiritual. Kemudian mengucapkan salam. melalukan absensi kepada didik. Setelah peserta mempersiapkan keadaan kelas, guru melakukan apersepsi untuk mengawali pembelajaran kegiatan dengan menyampaikan tujuan yang hendak dicapai kemudian memberikan motivasi dengan menjelaskan pentingnya sikap berani dalam melakukan aspirasi atau menyatakan pendapat dengan menghubungkan pada materi pembelajaran.

b. Kegiatan tanya jawab

Pada pertemuan pertama di kelas X Bahasa dan X **IPA** guru 7 mengenai menyampaikan materi dengan ancaman menggunakan model tanya jawab antar Guru siswa. menyampaikan materi ancaman negara dalam berbagai bidang, kemudian memberikan berbagai contoh kasus ancaman dalam bidang militer. Kemudian bertanya kepada peserta didik mampu memancing agar kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan membentuk sikap demokratis peserta didik seperti berikut:Guru selama pembelajaran berlangsung melakukan motivasi agar peserta didik menjadi lebih berani dan percaya Namun ketika Guru sudah memberikan motivasi seperti itu, peserta didik belum ada yang berani mengacungkan tangannya untuk menjawab, ada beberapa yang menjawab dengan suara kecil secara bersama-sama, ada yang hanya mendengarkan saja. Sehingga Guru melakukan tanya jawab dengan menunjuk peserta didik secara langsung. Setelah ditunjuk mereka jadi ingin dan bisa menjawab. Selama melakukan kegiatan tanya jawab kepada peserta didik, bu retno selalu memberikan penguatan dari jawaban yang disampaikan oleh peserta didik. Kemudian memberikan aprisiasi "Ya tepat sekali jawabannya, solusi tersebut tersebut tepat bila dilakukan.

c. Kegiatan Pembagian Kelompok Diskusi

Pada pertemuan kedua guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok masing-masing yang 5 sampai anggotanya peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik model pembelajaran berbasis masalah dengan membagi siswa kedalam kelompok berranggotakan yang peserta didik. Sebelumnya Guru telah meminta ketua kelas untuk membagi anggota kelompok secara acak sehingga heterogen tidak perempuan semua tidak lakilaki semua. Disetiap kelompok diskusi, peserta didik disajikan suatu permasalahan kasus berupa yang diambil dari berita berita online. yang tiap kelompok berbeda kasus permasalahan ancaman dari berbagai bidang yaitu bidang militer, non militer, bidang sosial, kebudayaan, ekonomi, politik, ideologi. Jadi setiap kelompok ketika presentasi bahasan kasus nya berbeda, agar nanti diharapkan semua kelompok mendengarkan setiap temannya melakukan presentasi di depan kelas. Dari tersebut, guru meminta siswa untuk memecahkan masalah dengan menganalisis mengenai solusi apa yang pemerintah dapat lakukan, kemudian faktor apa saja yang menyebabkan kejadian tersebut dapat terjadi, peran warga negara yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal tersebut.

Dalam kegiatan diskusi tersebut terlihat terjadinya kerja sama dalam kelompok yaitu setiap peserta didik memiliki bagian tugasnya masing-masing. Guru menyampaikan bahwa masing-masing siswa harus memiliki pendapatnya sendiri. Pembagian tugas tersebut memiliki tujuan agar setiap peserta didik mampu memahami materi yang sedang dipelajari. Hal tersebut menjadikan setiap didik peserta berani mengeluarkan pendapatnya sendiri.

Dari hasil pengamatan secara langsung, ketika peserta didik sedang mencari jawaban mereka menggunakan sumber belajar selain buku dan lks, mereka menggunakan media elektronik berupa handphone. tersebut Handphone digunakan untuk melakukan browsing di internet. Gurupun memperbolehkan peserta didik menggunakan hp jika memang diperlukan dalam pembelajaran.

d. Kegiatan Mengkomunikasikan Hasil Disukusi

Setelah peserta didik diberi waktu 30 menit untuk berdiskusi dalam kelompok, guru meminta peserta didik untuk melakukan presentasi. Presentasi dilakukan untuk membentuk sikap percaya diri dan keberanian peserta didik untuk menyatakan pendapatnya didepan umum.

Karena waktu sudah sangat mepet dengan hari puasa dan test akhir semester maka Guru ingin mempercepat pembelajaran dengan meminta peserta didik langsung mempresentasikan depan kelas. Semua kelompok diberi waktu sekitar menit untuk presentasi serta memberi kesempatan kelompok lain untuk tanya jawab.Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, didapati ketika di kelas X IPA 7 dan X Bahasa sama-sama ketika ada kelompok sedang yang diskusi, kelompok lain tidak terlalu mendengarkan fokus kepada kelompok yang sedang diskusi. Karena cara setiap kelompok presentasi di depan kelas terlihat sangat monoton yaitu hanva membaca hasil dikusi yang ada di kertas yang mereka bawa, dan kemudian membacakannya. Jadi terlihat peserta didik yang berada di belakang malah sedang bermain handphone, dan ada sedang mengobrol yang dengan teman yang lain. Dikelas X IPA 7, ketika peserta didik kesempatan untuk bertanya. 6 kelompok, sekiranya 2 kelompok yang bertanya setiap pada kelompok yang maju. Sedangkan dikelas X Bahasa setiap kelompok yang maju, hanya terdapat 1 kelompok yang ingin bertanya. Suasana kelas X IPA 7 lebih ramai dana lebih banyak peserta

didik yang bermain HP ketika diskusi berlangsung.

Selama kegiatan presentasi telah Guru membimbing peserta didik untuk berani bertanya dan memberikan tanggapan kepada peserta didik yang lain. Setelah presentasi kelompok selesai. guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat dan menambah hal-hal vang belum lengkap atau belum tersampaikan pada diskusi kelas tersebut

Dari penerapan model langkah-langkah Penerapan model pembelajaran berbasis tersebut. masalah sikap demokratis peserta didik dapat terbentuk, diantaranya sebagai berikut:

1. Bekerjasama dalam kelompok

Terdapat kegiatan diskusi di dalam kelompok dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan oleh Ibu Retno. Dari diskusi tersebut muncul komunikasi antar peserta didik sebagai bentuk kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, proses diskusi selama berlangsung, di kelas X IPA 7 dan X Bahasa setiap kelompok memang terlihat serius, dan setiap anggota kelompok seperti sudah memiliki tugas masing-masing sehingga kerjasama dalam

- kelompok tersebut efektif.
 Ketika presentasi di
 depan kelas,setiap
 kelompok sudah
 membagi tugasnya
 masing-masing. Ada yang
 bagian membaca hasil
 diskusi, mencatat
 pertanyaan dari kelompok
 lain, menjadi moderator.
- 2. Sikap menghargai pendapat orang lain Didalam kelompok diskusi, peserta didik mengeluarkan saling pendapatnya dalam pemecahan masalah. Hal tersebut melatih peserta didik agar mampu menghornati dan menghargai pendapat teman yang satu dengan lain.Dari hasil yang wawancara dengan peserta didik, rata-rata jawaban mereka positif terhadap adanya perbedaan pendapat. Sehingga dapat disimpiulkan peserta didik terbuka dengan perbedaan pendapat yang ada.
- 3. Berani berpendapat Setelah melakukan kegiatan diskusi, setiap kelompok dipersilahkan untuk mengkomunikasikan hasil diskusi pemecahan masalah. kepada kelompok lain. Kemudian dalam sesi tanya jawab, kelompok dapat langsung menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Hal ini melatih keberanian siswa dalam berpendapat

atas hal yang dipikirkannya.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 dijelaskan Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dalam penilaian hasil belajar didik peserta pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap social, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 menyebutkan satu prinsip penilaian yaitu adil artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus perbedaan serta belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan temasuk gender di dalamnya.

Setelah Guru menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, Guru melakukan penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran. Penilaian atau evaluasi yang dilakukan yaitu menyelenggarakan ulangan harian dengan soal yang bervariasi untuk mengetahui seberapa paham peserta didik materi pada vang dipelajari. Jika dalam model pembelajaran berbasis masalah dengan menilai sikap siswa pada saat diskusi dan presentasi peserta didik dalam kelompok. Penilian individu dilihat dari keaktifan didik peserta dalam menjawab pertanyaan, berkomunikasi. Jika kelompok ketika mereka mampu bekerjasama dan saling berkordinasi dalam memecahkan masalah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pada saat peserta didik telah berada dalam kelompok diskusi untuk menganalisis kasus atau permasalahan yang diberikan guru. Guru mengamati proses diskusi yang berlangsung dan mendekati kelompokkelompok yang ada. Namun tidak Guru benar-benar langsung memberikan penilaian secara langsung jadi hanya sekedar mengamati. Sedangkan hasil analisis dokumen **RPP** yang dirancang Guru, pada bagian penilaian pembelajaran sudah ada instrumen penilaian sikap sosial dan religius, instrumen penilaian pengetahuan (kognitif) dan penilaian keterampilan.

- 2. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Sebagai Upaya Membentuk Sikap Demokratis
- a. Kendala yang dirasakan guru yaitu:

- 1) Beberapa peserta didik yang belum menyadari peran dan tugasnya selama pembelajaran Pada dasarnya setiap peserta didik memiliki kemampuan berbeda sehingga yang terdapat peserta didik yang perlu diberikan perhatian lebih serta penguatan-Jadi terdapat penguatan. peserta didik yang seperti belum siap dalam melakukan proses pembelajaran, belum mengoptimalkan mampu kemampuan berpikir, berkreasi, siap bekerjasama.
- 2) Kendala pada alokasi waktu pembelajaran: Jadwal pelajaran PPKn sering bertubrukan dengan kegiatankegitan disekolah. Sehingga terkadang ada kelas yang hanya 1 KD itu hanya 2 kali pertemuan. ,menyebabkan ada tidak kelas yang model diterapkan seperti kelas lain. Karena alasannya situasional sehingga sulit untuk dipaskan dengan alokasi waktu Kendala tersebut sejalan dengan pendapat Haryanto dan Warsono (2012: 52) mengenai kekurangan atau kelemahan model pembelajaran berbasis masalah apabila diterapkan dalam proses belajar mengajar, yaitu "Kemungkinan akan mengeluarkan biaya dan lama dalam waktu yang proses pemecahan masalah, Guru kurang mampu mengantarkan peserta didik untuk melakukan pemecahan

masalah".

b. Kendala yang dirasakan oleh peserta didik :

1) Suasana kelas lebih ramai

- karena ada beberapa peserta didik yang mengobrol dengan peserta didik yang lain, sehingga mengganggu peserta didik lain yang ingin fokus Berdasarkan hasil observasi dilakukan peneliti yang dikelas pada saat kelompok maju untuk presentasi hasil pemecahan masalah. beberapa peserta didik ada tidak melihat dan mendengarkan teman nya presentasi. Hal tersebut dikarenakan saat presentasi setiap kelompok hanya membaca hasil diskusi mereka. Sehingga terlihat sangat monoton.
- 2) Kelompok yang dibentuk heterogen, sehingga peserta didik yang tidak terlalu dekat dengan peserta didik yang lain kurang bisa diajak kerjasama karena tidak terbiasa.
- 3. Solusi Terhadap Kendala Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Membentuk Sikap Demokratis Peserta Didik

Kendala-kendala yang muncul pada saat penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam membentuk sikap demokratis berdampak pada pembelajaran yang kurang berhasil. Maka dari itu perlu adanya solusi agar pembelajaran tersebut berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran diantaranya sebagai berikut:

- 1. Guru lebih memiliki ketegasan untuk menegur serta memberikan peraturan kepada peserta didik yang ramai sendiri, membuat kegaduhan di kelas pada saat presentasi kelompok lain, memberikan kemudian reward kepada kelompok yang aktif bertanya dan kelompok kepada vang memiliki kreativitas lebih pada saat presentasi berlangsung.
- 2. Siswa diberikan perhatian khusus dengan selalu dilatih terus untuk berani dalam mengutarakan pendapat, diberikan motivasi. Ketika selesai kegiatan model dievaluasi tersebut satu persatu kemudian ditanyai permasalahan menyebabkan belum lancar dalam kegiatan aktif dikelas

SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan aanalisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik suatu keismpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam kurikulum 2013 sebagai upaya membentuk sikap demokratis peserta didik
- a. Perencanaan model pembelajaran berbasis masalah Guru mata pelajaran PPKn sebelum menerapkan model pembelajaran berbasis masalah telah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan kurikulum yang

sedang berjalan yaitu kurikulum RPP 2013. vang dirancang didalamnya sudah disisipi pendidikan karakter seperti nilai religius, kedisplinan, ketertiban, gotong royong, demokratis. Guna membentuk sikap demokratis peserta didik, di dalam RPP yang dirancang guru telah mengembangkan aspek kebebasan berpendapat, menghargai pendapat orang lain, dan kerjasama antar peserta didik.

atau

pelaksanaan

b. Penerapan

model pembelajaran berbasis masalah sebagai upaya sikap demokratis membentuk peserta didik Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah sebagai upaya membentuk sikap demokratis peserta didik yang diterapkan oleh guru yakni : pada tahap pendahuluan guru menyisipkan nilai-nilai karakter pada setiap tahapannya, seperti salam dan untuk berdoa mengawali pembelajaran selanjutnya memberikan apersepsi dan motivasi kepada peserta didik untuk membangkitkan semangat peserta didik kedalam materi akan dipelajari, yang pada kegiatan inti guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok diskusi untuk memecahkan suatu kasus atau permasalahan. Dalam hal ini guru menyajikan kasus mengenai ancaman negara dalam berbagai bidang kehidupan kepada tiap kelompok. Sikap demokratis peserta didik dapat terbentuk ketika saat diskusi kelompok dengan sikap mampu menghargai pendapat orang lain, bebas dan berani menyuarakan pendapatnya

- , mampu berkomunikasi serta bekeria sama untuk menghasilkan sebuah keputusan, dan. Tetapi dalam hal ini sikap demokratis siswa yang paling menonjol adalah peserta didik mampu bekerjasama dalam kelompok. Dari sikap demokratis yang terdapat pada perilaku siswa saat berdiskusi dinilai sangat mendukung aktivitas belajar siswa.
- Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Sebagai Upaya Membentuk Sikap Demokratis
- Kendala yang dihadapi oleh peserta didik pada saat guru menerapkan model pembelajaran berbasis masalah yaitu sebagai berikut:
- 1. Suasana kelas yang ramai karena dalam kelompok diskusi, ada beberapa peserta didik yang mengobrol dengan peserta didik yang lain mengakibatkkan peserta lain terganggu menjadi tidak fokus.
- 2. Kendala yang dirasakan peserta didik yaitu kelompok yang dibentuk heterogen, sehingga peserta didik yang tidak terlalu dekat dengan peserta didik yang lain menjadi canggung dan merasa kurang bisa diajak kerjasama.
- Kendala yang dihadapi guru yaitu
- 1. Beberapa peserta didik yang belum menyadari peran dan tugasnya selama pembelajaran. Jadi terdapat peserta didik yang belum siap dalam melakukan proses pembelajaran, belum mampu mengoptimalkan kemampuan berpikir, berkreasi, siap bekerjasama.

- 2. Kendala pada alokasi waktu pembelajaran, pelaksanan model pembelajaran berbasis masalah jadwal pelajaran PPKn sering bertubrukan dengan kegiatan-kegiatan disekolah. Sehingga terkadang ada kelas yang hanya 1 KD itu hanya 2 kali pertemuan, menyebabkan ada kelas yang tidak diterapkan model yang sama.
- 3. Solusi Terhadap Permasalahan Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Sebagai Upaya Membenruk Sikap Demokratis Peserta Didik
- a. Guru lebih memiliki ketegasan untuk menegur dan memberikan peraturan kepada peserta didik yang ramai sendiri saat presentasi kelompok lain, kemudian memberikan *reward* kepada kelompok yang aktif bertanya dan kepada kelompok yang memiliki kreativitas pada saat presentasi berlangsung.
- b. Siswa selalu dilatih terus untuk berani dalam mengutarakan pendapat, diberikan motivasi. Ketika selesai kegiatan model tersebut dievaluasi satu persatu kemudian ditanyai kenapa belum lancar dalam kegiatan aktif di kelas serta diberikan perhatian khusus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, makaa peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewaganegaraan
Guru hendaknya dapat lebih menggerakan peserta didik agar tertarik ke dalam materi pembelajaran, seperti memberikan motivasi lebih dan reward kepada peserta didik agar

mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Serta memahami karakter peserta didik untuk menentukan pendekatan serta model pembelajaran yang akan diterapkan.

Peserta didik hendaknya lebih fokus ketika pembelajaran berlangung dengan menghormati guru ketika proses pembelajaran berlangsung, menerapkan sikap demorkratis baik di lingkungan

2. Bagi Peserta Didik

- sekolah maupun masyarakat seeperti sikap saling menghargai, berani berpendapat dan ikut dalam pengambilan keputusan bersama.
- 3. Bagi Sekolah
 Kebijakan serta kegiatan yang
 telah dibuat oleh pihak sekolah
 dalam upaya pengintegrasian
 nilai-nilai pendidikan karakter
 sebaiknya benar-benar dijalankan
 dengan baik.
- 4. Bagi Peneliti Lain
 Diharapkan bagi peneliti lain
 untuk menggunakan informan
 yang lebih banyak agar
 trianggulasi data yang ada benatbenar mewakili hasil dari
 penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Majid, A. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Bsndung: PT

 Remaja Rosdakarya.
- Maolani, R. A. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan*Jakarta: Raja Grafinfo

 Persada.
- Margono. 2005. Metodologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
 Mulyoto. 2013. Strategi Pembelajaran di Era Kurikulum 2013 Yogyakarta. Prestasi Pustakarya.
- Murdiono, M. 2012. Strategi
 Pembelajaran
 Kewarganegaan.
 Yogyakarta: Ombak.
- Ngalimun. 2012. *Strategi dan Model Pembelajaran* . Yogyakarta:
 Aswaja Pressindo.
- Rusman. 2014. Model-Model
 Pembelajaran
 Mengembangkan
 Profesionalisme Guru.
 Jakarta: Rajawali.
- Sanjaya, W. 2013. Strategi Pembelajaran Beroeientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Sukmadinata, N. S. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan* . Bandung: PT

 Remaja Rosadakarya.

KANTIN KEJUJURAN SEBAGAI UPAYA PEMBENTUK CIVIC DISPOSITION (Studi di SMP N 10 Surakarta)

Charistia Nikmah M, Triyanto, Muh. Hendri Nuryadi Progam Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta Email: ristia.ristia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peran Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Pembentuk civic disposition; 2) Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Upaya Pembentuk civic disposition. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan yaitu siswa, guru, pengelola dan penanggung jawab kantin kejujuran serta kasi intelejen Kejaksaan Negeri Surakarta, tempat di SMP N 10 Surakarta dan studi dokumen berupa laporan penjualan kantin kejujuran pada bulan Mei-Desember 2018. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan sample sejumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada siswa SMP N 10 Surakarta sejumlah 8 orang, guru mata pelajaran PPKn sejumlah 2 orang, pengelola kantin kejujuran, penanggung jawab kantin kejujuran, serta kepala kasi intelejen Kejaksaan Negeri Surakarta, observasi dilakukan terhadap siswa yang bertransaksi di kantin kejujuran, dan studi dokumentasi berupa buku laporan penjualan kantin kejujuran bulan Mei-Desember 2019. Validitas data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Simpulan hasil penelitian: 1) peran kantin kejujuran sebagai upaya pembentuk civic disposition yaitu: a) Kantin kejujuran sebagai wahana pembentuk civic disposition melalui proses praktik membeli secara jujur di kantin kejujuran, pengembangan kebijakan melalui tata cara belanja dan tata tertib, pembinaan karakter, serta evaluasi keberjalanan kantin kejujuran; b) Kantin kejujuran sebagai wahana pembiasaan pada civic disposition; 2) Faktor pendukung meliputi: a) Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai pemberi modal berdirinya kantin kejujuran; b) Adanya tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran; c) Management kantin kejujuran oleh pengelola; d) Evaluasi kantin kejujuran oleh pihak sekolah setiap akhir semester. Sedangkan faktor penghambat internal meliputi: a) Kurangnya kesadaran dan inisiatif siswa dalam pelaksanaan transaksi di kantin kejujuran; b) Jumlah uang kembalian yang terbatas sehingga siswa kesulitan mendapat uang kembalian; c) Kurangnya rasa memiliki untuk merawat kantin kejujuran. Sedangkan faktor penghambat eksternal meliputi: a) Lingkungan pergaulan siswa yang salah.

Kata Kunci: Kantin Kejujuran, Pembiasaan, Civic disposition

PENDAHULUAN

Di era milenial dengan segala kebebasanaya, tuntutan hidup untuk memiliki kesejahteraan juga menjadi bagian dari salah satu tujuan hidup pada diri individu. Hal tersebut mengakibatkan terwujudnya cara kotor dengan melalui kejahatan korupsi yang kian marak pada berbagai jenjang pemerintahan. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana yang termasuk tindakan korupsi adalah

"Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau lain orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi. Hal menjadikan keprihatinan Indonesia untuk terus memerangi korupsi serta membutuhkan solusi melalui kerjasama pada berbagai pihak. Usaha untuk dapat memerangi dapat dimulai korupsi dengan berbagai cara salah satunya adalah dimulai dengan diri sendiri untuk membiasakan berbuat jujur dalam segala aktivitas.

Kejujuran merupakan hal yang penting dalam keberjalanan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari jujur merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam melewati aktifitas sehari-hari dan akan memiliki arti penting bagi diri sendiri serta manusia yang lain. Dengan seseorang dapat bagaimana orang tersebut memegang teguh komitmennya dan akhlaknya. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Aqib (2011: 81) "Jujur adalah suatu sistem yang mempunyai sebuah keyakinan yang teguh dan mantap, stabil, saat berbicara, saat berbuat, dan berkata hati". Dalam melaksanakan praktik tersebut pendidikan juga merupakan tepat sarana vang menginternalisasikan perbuatan jujur untuk mencegah dan menanggulangi tindakan korupsi sejak dini, untuk melalui itulah melalui instansi pendidikan jujur perilaku juga ditanamkan sejak dini.

Pendidikan karakter merupakan intisari dari pendidikan yang mana fungsi pendidikan undang-undang nasional dalam Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak sehat. berilmu, kreatif. mulia. mandiri. demokratis, dan bertanggung jawab".

Karakter dasar manusia terbentuk memang pada kecilnya dan akan tinggal sepanjang havat. Disinilah letak pentingnya pendidikan sebagai karakter komponen utama dalam pendidikan Menurut Thomas Lickona (2012: 8)"pendidikan karakter

adalah pendidikan sepanjang hayat, sebagai proses perkembangan ke arah manusia kafaah".

Pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang agar memahami, peduli, dan bertindak nilai-nilai berlandaskan etika. Pendidikan karakter merupakan pemberian tuntunan kepada peserta untuk menjadi manusia didik seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.

Sesuai dengan Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dengan pertimbangan bahwa :

> Dalam rangka mewujudkan berbudaya bangsa vang melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras. kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif. cinta damai. gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter.

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan merupakan bagian dari menginternalisasikan nilai-nilai bangsa. Menurut karakter dan Winataputra Budimansyah i) Pendidikan (2007:Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subiek pembelaiaran mengemban vang misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "nation and character building".

Dalam konteks ini peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis.

Sebagai mata pelajaran yang mengemban misi smart and good citizenship, character building merupakan misi penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Mata pelajaran **PPKn** terkait langsung dengan penanaman nilai. Bahkan mata pelajaran ini memiliki muatan tanggung jawab internalisasi lebih besar dibandingkan dengan materi pelajaran lainnya.

Kejujuran Kantin **SMP** Negeri 10 Surakarta merupakan salah satu pilot project kantin kejujuran di Kota Surakarta yang merupakan hasil kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Surakarta, yang diresmikan pada tanggal 2 Mei 2018 oleh Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Surakarta berlokasi di lantai dua, berbagi dengan ruang perpustakaan. Selain menyediakan alat tulis dan perlengkapan sekolah, kantin ini juga menyediakan makanan. Di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Surakarta tidak ada petugas yang melayani Pengelola pembeli. hanya menyediakan kotak kaca berukuran 30 x 30 cm yang berfungsi sebagai kasir. Kantin Kejujuran di SMP N 10 masih Surakarta eksis sampai sekarang hal tersebut terbilang cukup mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung membuat program Kantin Kejujuran di sekolah-sekolah sejak tahun 2008. Menurut data Kemendikbud yang dilansir tahun 2008, terdapat 1.000 kantin kejujuran didirikan di sekolah-sekolah negeri.

Namun, banyak yang kemudian tutup karena tidak ada yang mengurus sehingga bangkrut.

Proses pembangunan kesadaran siswa untuk membentuk disposition melalui kantin kejujuran terus diusahakan oleh pihak sekolah, tentu dalam membentuk karakter jujur memiliki berbagai kendala dan proses yang panjang. Berdiri pada 2 Mei 2018 pada awal berdirinya kantin ini tidaklah dapat berjalan lancar dan se eksis sekarang ini, dilansir dari data laporan penjualan kantin kejujuran SMP N 10 Surakarta pada bulan Mei 2018 pada minggu ke 2 hingga ke 4 mengalami pengelola kerugian senilai 10.000 rupiah dari laba seharusnya 20.000. dan terus berlanjut pada bulan Agustus 2018 yang mengalami kerugian sejumlah 4.000 hingga 5.000, meski telah berangsur berkurang pihak sekolah terus mengupayakan agar siswa dapat melatih kejujurannya. Pihak sekolah terus mengupayakan dengan melaporkan hasil kerugian kantin setiap hari Senin setelah upacara bendera dan menggugah kepedulian dan kejujuran siswa agar tetap berbuat jujur. Usaha dari pembinaan pihak sekolah atas pelaporan dari siswa yang lain terkait perolehan uang kembalian yang sulit didapatkan juga ditegakakan oleh sekolah dengan mengusahkan uang kembalian yang cukup serta dorongan dari siswa untuk tertib melakukan pembayaran dengan uang pas. Setelah melalui perbaikan tersebut dan mencoba memulai kembali lagi untuk membuka kantin kejujuran ternyata belum sepenuhnya membuat sadar siswa hal tersebut dengan ditemukanya atas pelaporan siswa yang melihat sejumlah 2 siswa membeli namun tidak membayar. Oleh sebab itu pemberian sanksi berupa surat peringatan kepada siswa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dilakukan dan pemberian sanksi kepada bebrapa murid yang melanggar tersebut ternyata menjadikan kantin kejujuran pada minggu selanjutnya berangsur baik. Sehingga dari pelaporan kerugian setelah upacara bendera setiap hari Senin, pada akhir bulan Septemebr 2018 memperlihatkan hasil yang cukup baik hingga kerugian hanya berkurang menjadi 1000,00 bahkan tidak ada kerugian. Hal tersebut tidak lain adalah usaha dan kerjasama sekolah dan komitmen siswa untuk terus mentaati Tata Cara Belanja dan Tata Tertib di Kantin kejujuran SMP N 10 Surakarta. Selain kejujuran permasalahan yang ditemukan di Kantin Kejujuran SMP N 10 adalah nilai-nilai kepedulian siswa untuk menjaga dan mentaati Tata Cara belanja Tertib dan Tata Tertib di Kantin Kejujuran ini juga pada awal berdirinya kantin ini belum terlaksana dengan baik seperti budaya antri saat membayar, nilainilai kesopanan seperti makan sebaiknya dengan duduk dan tidak berbicara, hingga tertib antri saat mebayar juga menjadi perhatian dari pihak sekolah untuk dapat diterapkan di sekolah dan di luar sekolah

Semua usaha tersebut dimaksudkan untuk membiasakan sehingga dapat dijadikan pedoman hidup baik di rumah, sekolah, masyarakat. Dari sifat jujur, tanggung jawab, disiplin,taat aturan, serta peduli yang dimiliki siswa pada maka akhirnya akan watak membentuk suatu warga negara (Civic disposition). Menurut

Dasim Budiansyah (2010: 31) civic disposition terdiri dari dua vaitu karakter privat dan publik yang diperkenalkan oleh Margaret Branson pada tahun 1998 dimana karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Sedang karakter publik seperti kepeduliaan sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main, berpikir kritis, dan untuk mendengar, kemauan bernegosiasi dan kompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar berjalan sukses.

Watak kewarganegaraan (civic disposition) adalah komponen dasar ketiga pada pembelajaran PPKn yang mempunyai tujuan untuk membentuk watak atau karakter warga negara yang mana salah satunya adalah dalam civic disposition yaitu pada karakter privat yang mana berkaitan dengan tanggung jawab moral. Civic dispostition merupakan elemen yang cukup *urgent* di masa kini hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Budi Mulyono (2017: 219) yang menyebutkan bahwa hilangnya karakter kewarganegaraan egois memunculkan sikap fundamentalis yang berujung pada aksi kriminal yang dilakukan oleh remaja sekolah. Krisis karakter kewarganegaraan sudah waktunya untuk diatasi secara struktural oleh bangsa Indonesia.

Pengembangan civic disposition berbasis kantin kejujuran tentu tidak terlepas dari peran berbagai dan pihak kondisi lingkungan sekolah dalam mensosialisasikan serta menginternalisasikannya kepada

siswa. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, dapat yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Pengembangan kantin kejujuran tersebut dapat diterapkan dalam rangka menanamkan nilainilai civic disposition kepada peserta didik sejak dini. Tantangannya bagaimana kemudian adalah mengembangkan civic disposition melalui kantin kejujuran dengan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Civic disposition merupakan suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak yang kemudian akan menjadi karakter peserta didik.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian di SMP Negeri 10 Surakarta yang berada di jalan Kartini No.12, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis objek yang akan diteliti berdasarkan kenyataan dilapangan. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada kantin kejujuran yang ada pada SMP N 10 Surakarta sebagai upaya pembentuk civic disposition. Setiap membutuhkan penelitian data sebagai sumber informasi yang memberikan gambaran mengenai ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Supaya memperoleh data penelitian dibutuhkan sumber data, berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan sampel, yaitu sampling purposive. Sampling purposive atau sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan adanya atas tujuan

tertentu. Pihak-pihak yang terlibat langsung antara lain Siwa-siswi SMP Surakarta, Guru PPKn, Pengelola dan Penanggung Jawab Kepala kantin kejujuran, Intelejen Kejaksaan Negeri Surakarta selaku pemberi modal kantin kejujuran. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara kepada Siwa-siswi SMP 10 Surakarta, Guru PPKn, Pengelola dan Penanggung Jawab kantin kejujuran, Kepala Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Surakarta pemberi modal kantin selaku kejujuran. Observasi yang dilakukan berupa pengamatan kepada siswasiswi SMP N 10 Surakarta yang kantin sedang bertansaksi di kejujuran. dokumen studi yang digunakan berupa laporan penjualan laba rugi kantin kejujuran SMP N 10 Surakarta, tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran SMP N 10 Surakarta. Teknik Uji Validitas data dalam penelitian menggunakan trianggulasi yang diartikan sebagai pengumpulan teknik data menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis data model interaktif yang terdiri dari tahap mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kantin Kejujuran Sebagai Wahana Pembentuk Civic Disposition Melalui Proses Praktik Membeli Secara Jujur di kantin Kejujuran, Pengembangan Kebijakan Melalui Tata Cara Belanja Dan Tata Tertib Di Kantin Kejujuran, Pembinaan

Karakter, Serta Evaluasi Keberjalana Kantin Kejujuran

1) Praktik Memebeli Secara Jujur Di Kantin Kejujuran Tuiuan utama dibuatnya kantin kejujuran adalah sebagai wahana praktik siswa agar dapat berlatih jujur dalam melaksanakan transaksi di di kantin kejujuran. Hal tersebut senada dengan pendapat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (2010: 7) menyatakan:

> Tujuan penyelenggaraan kantin kejujuran adalah untuk mendukung kualitas sumber dava manusia melalui upaya menanamkan. menumbuhkan. memelihara. dan mengembangkan nilai-nilai keterbukaan. ketaatasasan, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan peserta didik melalui praktik pendidikan lingkungan di sekolah secara mandiri dan terbuka.

Kantin kantin kejujuran SMP N 10 Surakarta yang diresmikan tanggal 2 Mei 2018 ini tidak selalu berjalan mulus. Seminggu setelah peresmian kantin tepatnya tanggal 11 Mei kantin kejujuran 2018 mengalami mulai kerugian yang mencapai 10.000-20.000, tak hanya itu pengelola mendapat dari laporan beberapa siswa bawasanya didapati orang siswa yang mengetahui melihat teman mereka mengambil barang di kantin kejujuran namun tidak membayar. Hal lain yang menjadi kerisauan pada pengelola terkait laporan tersebut selain itu keluhan lain datang dari siswa kepada pengelola kantin karena terdapat siswa yang tidak mendapat uang kembalian karena terbatasnya uang kembalian di kotak pembayaran daripada pembelian uang dari siswa-siswa. Prkatik ataupun pelatihan kepada siswa untuk berbuat jujur di kantin kejujuran tersebut akan menjadi sebuah pengalaman dan mengena terhadap diri pribadinya hal tersebut senada dengan pendapat Menurut Sastradipoera (2010: 58) pelatihan bisa dianggap sebagai suatu proses penyampaian pengetahuan keterampilan, dan pembinaan sikap dan kepribadian. **Proses** praktik ini dapat mengajarkan siswa untuk mempunyai pengalaman pribadi dan secara langsung dengan tujuan melatih tanggung jawab namun tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh siswa-siswi yang melakukan transaksi di kantin kejujuran.

 Pengembangan Kebijakan Melalui Tata Cara Belanja Dan Tata Tertib Di Kantin Kejujuran

> Pengembangan guna keberjalanan kantin kejujuran di SMP N 10 Surakarta terus dilakukan yakni melalui pengembangan peraturan kantin kejujuran dengan melalui Tata Cara Belanja dan Tata Tertib di Kantin Kejujuran. Hal tersebut merupakan hasil dari tindak laniut atas beberapa permasalahan yang terjadi seperti : uang kembalian vang didapat, ketertiban siswa, hingga laporan didapatinya siswa yang membeli tanpa membayar. Pengembangan peraturan

> tersebut didasarkan pada kutipan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (2010: 7) yang menyatakan "keluwesan program pada kantin kejujuran melaui fleksibelitas penyelenggaraan kantin kejujuran dapat menyesesuaikan dengan budaya aturan serta sekolah,serta

kemampuan sekolah, dan disesuaikan dengan waktu, tempat, dan model penyelengaraannya.

Maka dari hal tersebut pengelola melalui rekomendasi sekolah dalam rapat tahun ajaran baru Januari 2019 menyarankan untuk membuat tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran. Pada tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran berisi 9 poin dimana point 1-4 aturan merupakan tata cara belanja vang mana dalam disposition termasuk karakter privat. Karakter privat dalam tata cara belanja tersebut mengandung karakter tanggung jawab dan disiplin. Kemudian pada point 5-9 termasuk dalam karakter public dimana karakter public berisi kepedulian, kesopanan, ketaat aturan. Usaha tersebut merupakan langkah cukup baik sebagai wahana siswa dalam mempraktikkan karakter tersebut dalam ligkungan sekolah. Mengingat sekolah merupakan sarana untuk belajar dan melatih siswa sebelum nantinya siswa akan menghadapi

kehidupan di masyarakat yang mana sesuai dengan pendapat Manurung (2012: 232) pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai aktivitas atau kegiatan belajar mengajar di kelas saja. Pendidikan haruslah mengacu kepada berbagai proses dan aktivitas yang harus bersifat produktif kreatif, pengembangan skill. kepribadian, integrasi, keprimaan, sampai pengokohan moral spiritual... Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMP N 10 Surakata apabila terdapat siswa yang melanggar, langkah yang pertama adalah diperingatkan terlebih dahulu, kemudian apabila mengulangi lagi diberi surat peringatan, dan yang ketiga diberi sanksi. Hal tersebut senada dengan Dinas Pendidikan Jawa Tengah dalam Pedoman Penyelenggaraan Kantin Kejujuran Provinsi Jawa Tengah (2010: 6) yang menyebutkan "kantin kejujuran merupakan wahana pengembangan sikap perilaku peserta didik dalam rangka memantapkan dan menginternalisasikan nilai keterbukaan, ketaat asasan, tanggung iawab. kemandirian. melalui aktivitas ekonomi vang dilakukan secara terbuka dan mandiri dalam rangka membiasakan kehidupan terbuka, dan yang jujur, bertanggung jawab". Antusias siswa SMP N 10 Surakarta terhadap kantin kejujuran ini dikatakan baik mengingat sampai hari ini kantin ini masih terus berjalan.

Beberapa hari setelah diberlakukannya peraturan tersebut siswa yang awalnya membeli barang 2 namun hanya membayar 1 yang terpergok oleh temannya

tersebut tidak lagi melakukan hal tersebut dan telah mendapat teguran dari pihak sekolah, namun akan tetapi terkait ketertiban saat antri membayar belum sepenuhnya berhasil melalui peraturan tersebut, serta kehilangan yang dulu 10.000 uang hingga 20.000 kini berkurang menurut dan catatan pengelola sekarang hanya berkisar 3000 - 5000 usaha dari pihak sekolah dan warga sekolah telah dilaksanakan dan akan tetap dilaksanakan untuk menunjang kejujuran.

3) Pembinaan Karakter

Guna memberikan terhadap penguatan tanggung jawab melalui Kantin kejujuran, setelah melalui pengembangan peraturan pihak sekolah memberikan pembinaan kepada siswa melalui wali kelas, Guru BK, Guru PPKn, serta Guru Agama untuk menanamkan nilai dalam diri siswa terkait hasil kesepakatan antara sekolah pihak dengan pengelola kantin kejujuran untuk membuat tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran. Menurut Poerwadarminta (1994: pembinaan 28) adalah suatu usaha, tindakan. dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Melalui pembinaan ini bertujuan meningkatkan

penyelenggaraan kantin kejujuran sebagaimana mestinya.

Selain itu pembinaan juga diberikan juga pada Hari Senin setelah upacara bendera selesai serta pengumuman terkait jika terdapat kehilangan uang pada kantin kejujuran. Menurut Mitha Thoha (1998: 40) Pembinaan adalah "Suatu tindakan, proses, hasil, pernyataan atau yang lebih baik. Maka dengan adanya hal menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu". Terdapat dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:1) pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan. proses. atau pernyataan tujuan, dan; 2) Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. Maka berdasarkan kutipan tersebut pembinaan pada proses ini adalah sudah memenuhi kutipan tersebut yaitu pernyataan tujuan dari pihak sekolah melalui bapak ibu guru serta usaha dalam perbaikan sesuatu bagi tanggung iawab dan moral anak melalui kantin kejujuran. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non

formal yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang melalui pembinaan

4) Evaluasi Keberjalanan Kantin

Kegiatan evaluasi merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan rutin setian akhir Evaluasi ini semester. dilaksanakan setelah rapat kenaikan kelas setiap semester. agenda akhir dibahas adalah vang pembacaan laporan laba rugi oleh pengelola kantin kejujuran dari bulan ke bulan dan pemberian saran serta masukan oleh bapak ibu guru dan warga sekolah. Untuk evaluasi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ajaran baru Desember 2019 nanti, pengelola kantin kejujuran berencana akan menggunakan penilaian pemberian dan saran melalui angket yang akan disebarkan oleh pihak kepada sekolah siswa melalui bantuan OSIS. Evaluasi merupakan hal yang dapat dikatan untuk menilai penting keberhasilan dari suatu program hal tersebut senadadengan pendapat Cornbanch (1992: 15) bahwa "evaluasi merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap segala peristiwa yang akibat terjadi sebagai dilaksanakanya suatu program". Dengan adanya evlauasi bersama-sama oleh bapak ibu guru dan warga sekolah maka diharapkannya kedepan kantin kejujuran ini dapat memberikan tempat siswa praktik untuk anti korupsi.

b. Kantin Kejujuran Sebagai Wahana Pembiasaan Pada Civic Disposition

Dalam menerapkan pembiasaan civic pada pada disposition kantin kejujuran, peneliti mendasarkan pada teori perkembangan anak didik yang dikenal adanya teori empirisme oleh John Lock bahwa "anak lahir ke dunia seperti kertas putih bersih (tabularasa) dan lingkungan mencoret yang atau menulisnya". Sehingga untuk berkembang menjadi manusia macam apa anak didik, sangat tergantung pada lingkungan dimana anak itu berada terutama pada pendidiknya, dalam hal ini orang tua atau keluarga, guru serta sekolah dan masyarakat sekitarnya. Untuk itulah penerapan dari pendidik, lingkungan, serta orang tua yang dapat bersatu serta dilakukan berulang kali maka akan menjadikan sebuah pembiasaan. Pembiasaan adalah bagian dari pendidikan. Hal tersebut sependapat dengan Ulwan (1993: 93) yang mengatakan "pendidikan melalui proses pembiasaan adalah cara yang efektif guna mengkonstruksikan iman, akhlak mulia, serta jiwa dan membentuk **syariat** untuk yang lurus". setelah siswa memahami tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran maka siswa diharapkan dapat membiasakannya dalam bertransaksi kantin di Peneliti kejujuran. iuga mendasarkan pada iurnal penelitian Wolfgang hasil Althof dan Marvin Berkowitz dengan iudul Moral Education and Character Education: their Relatsionship and Roles in Citizenship **Education** Journal of Moral Education vo.35, no.4 December 2006 penelitian hasil menunjukkan peran sekolah mengembangkan moral warga negara dalam lingkungan demokratis mengharuskan fokus pada pengembangan karakter, pengajaran ilmu kewarganegaraan dan membangun ketrampilan dan watak warga negara.

Agar siswa dapat melaksanakan pembiasaan, peneliti merujuk pada pendapat **Ibrahim** Elfiky (2009: 91) dalam buku terapi berpikir positif dimana pendapat tersebut berisi 6 tahapan terbentuknya pembiasaan yaitu:

1) Berpikir

Pada tahap ini sesuatu itu bisa ada dalam pikiran karena memiliki nilai lebih atau dianggap Hal ini penting. akan berjalan apabila siswa memahami tujuan dari tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran.

2) Perekaman

Adalah tahapan yang sederhana dimana bisa seseorang menjauhinya dan menutup file jika menghendaki. Setelah siswa memahami tujuan dari tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran maka siswa akan melaksanakan dari pemahaman serta kepercayaan pikiran yang telah tertanam.

3) Pengulangan

Tahap ini seseorang memutusakan untuk mengulang perilaku yang sama dengan perasaan yang sama. Setelah siswa memahami melaksanakan tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran dan diiringi perasaan lega karna karena berbuat benar sesuai petunjuk maka siswa akan melakukan lagi tindakan sama ketika yang bertransaksi di kantin keiuiuran.

4) Penyimpanan

Karena dilakukan berkalikali, pikiran menjadi semakin kuat, akal penyimpanannya dalam file dan menghadirkan ke hadapan anda setiap kali anda menghadapi kondisi serupa. Setelah siswa melakukan tindakan yang sama maka siswa akan menyimpan perbuatan dan perasaan lega karena mentaati aturan di kantin kejujuran.

5) Pengulangan

Dalam tahapan ini tidak disadari atau mengulang seseorang kembali perilaku yang tersimpan kuat di dalam akal bawah sadarnya. Siswa sudah yang beberapa kali melaksanakan aturan dan diikuti perasaan yang lega karena mentaati peraturan maka akan secara refleks dan akan terbiasa pada apa yang telah ia pahami dan lakukan.

Faktor lingkungan peserta didik tersebut apabila dikaitkan dengan teori sesuai dengan pemikiran Dorothy Low Nolte dalam Hidayat K & Azra A (2010: 55) yang mengatakan bahwa, "Anak akan tumbuh sebagaimana lingkungan yang mengajarinya dan lingkungan tersebut juga merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dihadapinya setiap hari"

Berdasarkan tahapantahap tersebut peneliti menyimpulkan bahwa siswa yang bertransaksi di kantin kejujuran masih berada pada tahap berpikir. Hal tersebut masih karena didapatinya belum siswa vang melaksanakan tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran dan dapat dipastikan belum memahami dan menghayati makna dari tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran sehingga belum terbentuk pembiasaan.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Civic Disposition di SMP Negeri 10 Surakarta

a. Faktor pendukung

 Dukungan Kejaksaan Negeri Surakarta Sebagai Pemberi Modal Berdirinya Kantin Kejujuran

> Dukungan terkait berdirinya kantin kejujuran tak lepas dari Kejaksaan Negeri Surakarta selaku pelopor dan pemberi modal pada kantin kejujuran SMP N 10 Surakarta. Hal tersebut karena kantin kejujuran di SMP N 10 Surakarta merupakan salah satu pilot project kantin kejujuran di kota Surakarta yang merupakan hasil kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Surakarta yang diresmikan pada tanggal 2 Mei 2018 oleh Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Surakarta memberikan modal

berupa tempat rak meletakkan barang dagangan, kulkas, serta uang tunai sejumlah 1.500.000.00. Tujuan berdirinva kantin kejujuran ini adalah sebagai salah satu sarana membentuk karakter siswa dan pendidikan anti korupsi serta sebagai sarana untuk tumbuh kembang generasi yang jujur dan bebas korupsi. Siswa dapat berlatih jujur dengan membeli sesuai harga barang yang telah ditetapkan dan melakukan transaksi secara mandiri. Dilansir dari data Kemendikbud pada tahun 2008 terdapat 1000 kantin yang didirikan di sekolahsekolah negeri. Namun kemudian banyak yang tutup karena tidak ada yang mengurus kemudian bangkrut. Pembentukan kantin kejujuran untuk gerakan melatih korupsi sejak dini dengan sasaran siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa. Melalui kantin upaya edukatif yang diharapkan mampu mendidik generasi muda menjadi manusia yang terbiasa berperilaku jujur, bermoral, taat aturan, dan peduli, sehingga pada akhirnya sebagai calon pemimpin bangsa akan mampu mencegah dari perbuatan korupsi.

 Adanya Tata Cara Belanja Dan Tata Tertib Di Kantin Kejujuran

> Pada kantin kejujuran di SMP N 10 Surakarta terdapat tata carabelanja dan tata tertib siswa di kantin kejujuran. Isi dari tata cara belania dan tata tertib tersebut poin 1-4 adalah merupakan cara tata belanja yang mana dalam civic disposition termasuk karakter privat. Karakter privat dalam tata cara belanja tersebut mengandung karakter tanggung jawab dan disiplin. Kemudian pada point 5-9 termasuk dalam karakter public dimana karakter public berisi kepedulian, kesopanan, ketaat aturan.

Usaha tersebut merupakan langkah cukup baik sebagai wahana siswa dalam mempraktikkan karakter tersebut dalam ligkungan sekolah. Mengingat sekolah merupakan sarana untuk belajar dan melatih siswa sebelum nantinya siswa akan menghadapi kehidupan di masyarakat yang mana sesuai dengan pendapat Manurung (2012: 232)pendidikan boleh tidak dimaknai sebagai aktivitas kegiatan belajar mengajar di kelas saja. Pendidikan haruslah mengacu kepada berbagai proses dan aktivitas yang harus

bersifat produktif kreatif, pengembangan skill. kepribadian, integrasi, keprimaan, sampai pengokohan moral spiritual.. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah **SMP** N 10 Surakata apabila terdapat siswa yang melanggar, langkah yang pertama adalah diperingatkan terlebih dahulu, kemudian apabila mengulangi lagi diberi surat peringatan, dan yang ketiga diberi sanksi. Hal tersebut dengan Dinas senada Pendidikan Jawa Tengah dalam Pedoman Penyelenggaraan Kantin Kejujuran Provinsi Jawa Tengah (2010: 6) yang menyebutkan kantin kejujuran merupakan wahana pengembangan sikap dan perilaku peserta didik dalam rangka memantapkan dan menginternalisasikan nilai keterbukaan. ketaat asasan, tanggung jawab, kemandirian, melalui aktivitas ekonomi yang dilakukan secara terbuka dan mandiri dalam rangka membiasakan kehidupan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

3) Management Kantin Kejujuran Oleh Pengelola Kantin kejujuran SMP N 10 Surakarta memiliki seorang pengelola yang bernama Dessy Ibu Eka Sari. Tugas dari pengelola kantin kejujuran ini adalah mencatat dan melaporkan hasil penjualan kantin kejujuran kepada kepala sekolah. Tidak hanya itu pengelola kantin bertugas mencatat dan memanage stock barang yang habis dan vang masih tersedia. Terlepas dari hal tersebut Ibu Dessy Eka tidak melayani tidak menerima dan pembayaran dari siswa. Secara teknis beliau bertugas hanya mencatat laba atau rugi uang masuk dan keluar setiap harinya setelah pulang sekolah. Beliau mengecek persediaan barang kantin dan menyesuaikan dengan jumlah uang hasil penjualan pada kotak pembayaran. Apabila terdapat selisih maka beliau akan mengumumkan selisih tersebut uang setiap minggu pada hari Senin setelah upacara dilaksanakan. Tujuannya adalah agar siswa yang belum membayar atau masih mempunyai kekurangan uang kembalian dapat menyelesaikan di kotak pembayaran secara jujur sesuai buku catatan pembayaran yang disediakan ditulis dan oleh siswa sendiri agar siswa dapat jujur dan bertanggung jawab

- terhadap transaksi yang dilakukannya.
- 4) Evaluasi Kantin Kejujuran Oleh Pihak Sekolah Setiap Akhir Semester

Pihak sekolah turut memberikan terhadap evaluasi keberjalanan kantin kejujuran. Evaluasi tersebut dilaksanakan setelah penyampaian tahunan oleh laporan kantin pengelola kejujuran pada rapat setiap akhir semester bersamaan dengan rapat tahun ajaran baru. Pengelola kantin menyampaikan tentang laba dan rugi perkembangan keberjalanan kantin kejujuran dan didiskusikan bersama dengan bapak ibu guru vang lain agar kantin melatih dapat siswa bertanggung jawab, jujur dan taat aturan. Sebagai salah satu contoh dipilih kebijakan yang dari hasil evaluasi adalah adanya tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran yang dibuat pada tahun ajaran baru Januari 2019. Isi tata cara belanja dan tata tertib berisikan bagaimana cara belanja di kantin kejujuran seperti halnya membayar dengan uang meletakakan uang pas, pada kotak pembayaran. Hal tersebut menjadi bagian hasil putusan evaluasi karena selama beberapa bulan berdirinya kantin sering ditemui siswa vang kesulitan mendapat uang kembalian. Selain itu pada tata tertib dan berisi himbauan membuang sampah pada tempatnya serta tertib dan antri saat melaksanakan transaksi di kantin kejujuran. Setelah berjalan selama semester nantinya sekolah akan meminta saran dan penilaian dari siswa terkait adanya tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran, kemudian pihak sekolah akan memberikan evaluasi kembali berdasarsaran dan penilaian dari siswa dengan angket untuk keberjalanan kantin di masa mendatang.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Penghambat Internal

Faktor
penghambat
pembentukan civic
disposition di SMP N 10
Surakarta ialah faktor
internal dan eksternal
berikut adalah faktorfaktor tersebut :

 a) Kurangnya Kesadaran Dan Inisiatif Siswa Dalam Pelaksanaan Transaksi Di Kantin Kejujuran

> Masih kurangnya kesadaran dan inisiatif siswa

dalam bertransaksi di

kejujuran kantin hingga kini masih ditemukan. Hal tersebut diantaranya seperti saat hasil observasi yang dilaukan pada 1 Juli 2019. dimana siswa tidak mau antri saat melaksanakan pembayaran di kotak pembayaran, serta siswa membayar dengan uang tidak pas sehingga siswa lain kesulitan mendapat kembalian. uang Menumbuhkan kesadaran dan inisiatif ada baiknya siswa diperhatikan siswa dan sebagai wahana berlatih di kehidupan sosial di dalam sekolah. Usaha dari siswa sendiri untuk mendorong pembentukan karakter Pada diri siswa juga cukup penting. Menurut Syamsu Yusuf L.N (2004: 90) "Apabila remaja tidak berusaha secara progresif untuk menilai moral dan keagamaan dirinya, maka ia akan gagal dalam memaknai dirinva dan memformulasikan filsafat hidupnya bermakna". secara Dari pendapat tersebut selain pemahaman terkait siswa iati

dirnya, kemauan siswa untuk menerima positif yang merupakan bagian dari keterbukaan menialankan untuk dan menaplikaskan karakter pada diri siswa.

Menurut

Jurnal Early Education & Development Volume 11, Number J, January 2000 oleh Marvin W. Berkowitz dengan judul Early Character **Development** and Education yang menyimpulkan bahwa pendidikan moral dimulai pada usia 18 bulan dan pendidikan formal dimulai pada usia 6 tahun. Pendidikan pada masa kanak-kanak secara positif mempengaruhi perkembangan kesehatan karakter di masa remaja sehingga apabila sejak awal tertanam karakter baik yang maka setidaknya saat anak tersebut beranjak remaja sudah memiliki suatu pegangan dalam arti nilai pada diri. Inisiatif dan kemauan siswa akan baik terbentuk seiak ia masih kecil dan akan berpengaruh terhadap masa remaja.

b) Jumlah Uang Kembalian Yang Masih Terbatas Sehingga Siswa Kesulitan Mendapat Uang Kembalian

Keluhan yang dialami siswa saat bertransanksi di kantin kejujuran sulitnya adalah mendapat uang kembalian sehingga siswa terkadang tidak jadi membeli karena uang kembalian yang terbatas. Jumlah uang siswa yang besar dan persediaan kembalian yang tidak mencukupi membuat kesulitan siswa mendapatkan uang kembalian. Untuk itulah dengan adanya tata cara belanja dan tata tertib di kantin keiuiuran berusaha menertibkan untuk siswa dengan adanya aturan tersebut. Pada tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran telah ditegaskan agar siswa mampu membayar dengan uang pas. Hal tersebut

menisyarakatkan bahwa kepedulian siswa masih kurang menurut Hera Lestari Malik (2008: 23) Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk mamahami arti dari situasi sosial, maka kemampuan diri untuk memahami diri sendiri dengan situasi sosial juga cukup penting. Dengan memiliki kesadaran yang berkaitan dengan individu seiak dini maka secara tidak langsung anak akan memahami dengan apa harus yang dilakukannya.

c) Kurangnya Rasa Memiliki Untuk Merawat Kantin Kejujuran

> Kurangnya rasa memiliki siswa SMP N 10 Surakrta terhadap kantin kejujuran dapat dilihat melalui observasi pada tanggal 1 Juli 2019. Hal tersebut terbukti dengan beberapa sampah vang masih bertebaran area di kantin kejujuran, serta kepedulian siswa dalam menjaga kerapihan barang dagangan di kantin kejujuran. Selain itu ketertiban siswa saat melaksanakan antri dalam membayar juga dikatakan belum berhasil sehingga siswa berdesakdesakan dalam melaksanakan pembayaran di kotak pembayaran. Heidegger dalam

Leininger (1981: 204) mengatakan bahwa kepedulian merupakan sumber kehendak. dari Heidigger Menurut "kehendak itulah yang mendorong kekuatan hidup dan kepedulian adalah sumbernya. Peduli merupakan fenomena dasar dari eksistensi manusia termasuk dirinva sendiri, dengan kata lain jika kita tidak peduli, maka kita akan kehilangan kepribadian kita. kemauan kita dan diri kita." Hal tersebut senada dengan menurut Boyatzis dan McKee (2005: 254) kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan perhatian. Ketika bersikap terbuka kepada orang lain, maka dapat menghadapi masamasa sulit dengan kreativitas dan ketegaran. **Empati** mendorong siswa untuk menjalin dengan hubungan lain dan orang sekitarnya. Maka kepedulian dengan terhadap kantin keiuiuran menandakan bahwa siswa juga memiliki harus empati yang dipupuk sejak dini terlebih lagi kantin kejujuran merupakan sarana praktik pencegahan tindakan anti korupsi. Empati akan muncul ketika kita memulai rasa ingin tahu kita terhadap orang lain dan pengalamanpengalam an mereka. kemudian empati itu akan diwujudkan ke dalam bentuk tindakan. Kepedulian didasarkan pada hasrat secara penuh untuk membina ikatan dengan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun bagaimanapun cara terbaik untuk memahami ana itu kepedulian adalah dengan cara meihat bagaimana kepedulian tersebut dipraktikan.

- 1) Faktor Penghambat Eksternal
 - a) LingkunganPergaulan Siswa YangSalah

Lingkungan pergaulan merupakan hal yang tidak dapat dibohongi. Bahkan memiliki kekuatan dominan yang sehingga dari dominan tersebut membuat mudah siswa di era sekarang ini mudah untuk meniru hal yang Hal kurang pas.

tersebut juga dirasakan oleh bapak guru terhadap ibu pergaulan siswa di masa kini vang mudah cenderung terpengaruhi. Hal tersebut senda dengan pendapat Masnur Muslich (2011: 97) bahwa anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang segera optimal. Sementara hasil penelitian yang dikemukakan oleh Hans Sebald dalam Syamsu Yusuf L.N (2004:60), bahwa "teman sebaya lebih memberikan pengaruh dalam memilih: cara berpakaian, hobi. perkumpulan (club), dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya". Maka kesimpulan yang didapatkan dari paparan tersebut adalah lingkungan pergaulan membawa pengaruh terhadap kehidupan siswa di dalam dan diluar sekolah. Masa remaja umumnya memang amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Hal itu

disebabkan oleh proses pencarian jati diri, sehingga mereka mudah terombangambing dalam menentukan baik buruknya suatu hal dan bimbang.

SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan

- 1. Peran kantin kejujuran dalam membentuk *civic disposition* di SMP Negeri 10 Surakarta antara lain:
- a. Kantin Kejujuran Sebagai
 Wahana Pembentuk Civic
 Disposition Melalui
 Proses:
 - 1) Praktik Membeli Secara Jujur Di Kantin Kejujuran Dengan melaksanakan transaksi di kantin kejujuran siswa dapat memiliki pengalaman praktik pribadi terhadap tanggung jawab dan kejujuran.
 - 2) Pengembangan
 Kebijakan Melalui
 Tata Cara Belanja
 Dan Tata Tertib
 Di Kantin
 Kejujuran
 Pengembangan
 peraturan yang dibuat
 oleh pengelola dan
 atas hasil musyawarah
 warga sekolah untuk
 - mengatasi permasalahan yang terjadi di kantin kejujuran.
 - 3) Pembinaan Karakter

Pembinaan karakter diberikan oleh pihak sekolah terhadap siswa yang berbuat curang dan tidak tertib di kantin kejujuran.

- 4) Evaluasi
 Keberjalanan
 Kantin Kejujuran
 Evaluasi dilaksanakan
 setiap akhir semester
 dengan melaporkan
 laba rugi dan catatan
 terkait keberjalanan
 kantin kejujuran.
- b. Kantin Kejujuran Sebagai Wahana Pembiasaan Pada Civic disposition. Dalam menerapkan pembiasaan pada civic disposition pada kantin kejujuran, mendasarkan peneliti pada teori perkembangan anak didik yang dikenal adanya teori empirisme oleh John Lock bahwa "anak lahir ke dunia seperti kertas putih bersih (tabularasa) lingkungan yang mencoret atau menulisnya."
- 2. Faktor pendorong dan Penghambat pembentukan civic disposition di SMP Negeri 10 Surakarta adalah:
- a. Faktor Pendukung
 - 1) Kejaksaan Negeri Surakarta Sebagai Pemberi Modal Berdirinya Kantin Kejujuran Yaitu melalui Kejaksaan Negeri

- Surakarta Sebagai pemberi modal terhadap berdirinya Kantin Kejujuran SMP N 10 Surakarta.
- 2) Adanya Tata Cara Belanja Dan Tata **Tertib** Di Kantin Keiuiuran Terdapat 9 peraturan poin yaitu 1-4 merupakan tata cara belanja yang berisi karakter privat sedangkan poin 5-9 merupakan tata tertib yang berisi karakter public
- 3) Management Kantin Kejujuran Oleh Pengelola Pengelola Kantin Kejujuran SMP N 10 adalah Ibu Dessy Eka Sari. **Tugas** dari pengelola kantin kejujuran ini adalah mencatat dan melaporkan hasil penjualan kantin kejujuran kepada kepala sekolah serta persediaan mencatat stock barang.
- 4) Evaluasi Kantin Kejujuran Oleh Pihak Sekolah Setiap Akhir Semester Evaluasi dilaksanakan setelah penyampaian laporan tahunan oleh pengelola kantin kejujuran pada rapat setiap akhir semester bersamaan dengan rapat tahun ajaran baru.

- b. Faktor Penghambat
 - 1) Faktor Penghambat Internal
 - a) Kurangnya Kesadaran Dan Siswa Inisiatif Dalam Pelaksanaan Transaksi Di Kantin Kejujran Kurangnya kesadaram siswa tidak mau antri saat melaksanakan pembayaran kotak pembayaran, serta siswa membayar dengan uang tidak sehingga siswa lain kesulitan mendapat uang kembalian.
 - b) Jumlah Uang Kembalian Yang Terbatas Sehingga Kesulitan Siswa Mendapat Uang Kembalian Jumlah uang siswa yang besar dan persediaan uang kembalian yang tidak mencukupi membuat siswa kesulitan mendapatkan uang kembalian.
 - c) Kurangnya Rasa Memiliki Untuk Merawat Kantin Kejujuran serta kepedulian siswa dalam menjaga kerapihan barang dagangan di kantin kejujuran.
 - 2) Faktor Penghambat Eksternal

a) Lingkungan Pergaulan Siswa Yang Salah Lingkungan pergaulan siswa yang salah yang terbawa masuk di lingkungan sekolah dapat memberikan dampak negatif bagi diri siswa dan serta berdampak pada transaksi di kantin kejujuran terutama tidak mentatai peraturan

B. SARAN

- 1. Pihak sekolah hendaknya memperkuat posisi kantin kejujuran sebagai sarana pembelajaran pembentukan civic disposition dengan mengelola kantin kejujuran secara lebih professional dan mengembangkan kantin keiuiuran dengan melibatkan seluruh siswa untuk menumbuhkan rasa memiliki dan merawat keberjalanan kantin kejujuran
- 2. Guru hendaknya ikut berkomitmen untuk membentuk civic disposition dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam kantin kejujuran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3. Siswa hendaknya menanamkan kebiasaan positif dan yang telah terbentuk di sekolah melalui kantin kejujuran supaya melekat dan berkembang baik ketika berada di lingkungan

- sekolah maupun di luar sekolah.
- 4. Bagi Orang tua hendaknya ikut mengambil bagian dalam mengontrol putra-putrinya terkait karakter serta lingkungan pergaulan dan tidak melepaskan sepenuhnya pembelajaran karater anak pada sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- Azzet, (2011) Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Amin Maswardi M. (2015).

 **Pendidikan Karakter Anak Bangsa. Yogyakarta:
 Calpulis.
- Aqib Zainal, Sujak. (2011). Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter Untuk SD.MI,SMP/MTs,SMA/MA,S MK/MAK. Bandung: Yrama Widya.
- Aqib, Z. (2011). Pendidikan Karakter Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa. Bandung: Yrama widya.
- Battistich, Victor. (2007). Character Education, Prevention, and Positif Youth Development. Illinois: University of Missouri, St Louis. www.character.org/reports,
- Branson, M.S. (Eds). (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. (Terjemahan Syarifudin, dkk) Yogyakarta:

- Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF).
- Budi Mulyono. (2017). Reorientasi Civic Dispotition Dalam Kurikulum Pendidikan KewarganegaraanSebagai Pembentuk Warga Negara Yang Ideal. *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2. Oktober 2017
- Budimansyah, Dasim. (2010).

 Penguatan Pendidikan

 Kewarganegaraan untuk

 Membangun Karakter

 Bangsa. Bandung: Widya

 Aksara.
- Chasiyah, dkk. (2009).

 Perkembangan Peserta

 Didik. Surakarta: Inti Media.
- Cholisin. (2005). "Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegara an (Civic Education) dalam Praktek Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi". Diakses dari: http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/para
- digma%20baru%20pkn_0.pdf Winaputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2007). Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan dan Kultur Ajar Kelas. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjan Sekolah UPI Bandung.
- Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi Strategi dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. (2018). *Ilmu Kewarganegaraan*. Jakarta:
 Bumi Aksara

- Winataputra, U.S.. (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sistematik wahana pendidikan demokrasi. Disert Wolfgang Althof and Marvin W. Berkowitz. (2006). Moral Education And Character Education Their Relatsionship And Roles In Citizenship Education. Jurnal Of Moral Education, Vol. 35, No. 4 pp. 495–518, diperoleh pada 28 Juli 2019 dari http://eric.ed.gov
- Zubaiedi, (2011) Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan, Jakarta: Kharisma Putera Utama,

UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MENCEGAH RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA

Markum, Winarno

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta Email: markuml@dsn.ubharajaya.ac.id, winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id

Abstract

Today there are 2 (two) threats faced by the Indonesian people, namely 1) the decline in living out of the values of Pancasila in the life of the nation and state, and 2) the existence of radicalism that leads to violence and terrorism. This study wants to explain how the role of the government as state organizer in anticipating threats as an effort to build the nation's character. Data sources from literature study, relevant current news and interviews with several experts. Data analysis was performed interactively and presented qualitatively descriptive. The study's findings show that the role of government in building the nation's character is carried out through various activities and instruments that accompany it. Pancasila ideology guidance has been provided, for example with the PPKn lessons and the establishment of the Pancasila Odeology Development Board (BPIP). Efforts to prevent acts of radicalism and terrorism are through preventive and repressive activities and de-radicalization programs developed in order to minimize the development of radical attitudes and understandings through the establishment of the National Counterterrorism Agency (BNPT).

Key Word: national character, radicalism terorism, deradicalization

Abstraks

Dewasa ini ada 2 (dua) ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia yakni 1) merosotnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara, dan 2) adanya radikalisme yang mengarah pada kekerasan dan terorisme. Kajian ini ingin memaparkan bagaimana peran pemerintah selaku penyelenggara negara dalam mengantisipasi ancaman sebagai upaya membangun karakter bangsa . Sumber data dari studi pustaka, berita terkini yang relevan dan wawancara dengan beberapa pakar. Analisis data dilakukan secara interaktif dan disajikan secara deskriptive kualitattif. Temuan kajian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam membangun karakter bangsa dilakukan melalui berbagai kegiatan dan instrumen yang menyertainya. Pembinaan ideologi Pancasila telah tersedia misalnya dengan adanya pelajaran PPKn dan pembentukan Badan Pembinaan Odeologi Pancasila (BPIP). Upaya untuk mencegah tindakan radikalisme dan terorisme adalah dengan kegiatan preventif dan represif serta program deradikalisasi yang dikembangkan dalam rangka meminimalisir berkembangnya sikap dan faham radikal melalui pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kata kunci: Karakter Bangsa, Radikalisme, Terorisme, Deradikalisas

PENDAHULUAN

Cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alenia 4 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, perlu menjadi acuan bersama dalam hidup berbagsa dan bernegara.

mencapai Guna hal tersebut dirumuskan Pancasila sebagai dasar pijakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus dipedomani dan diamalkan dalam segala sendi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta menjadi pijakan dalam dasar membangun Indonesia. bangsa Selanjutnya kemerdekaan yang telah diperoleh harus dipertahankan dan diwujudkan cita citanya melalui pembangunan berdasar Pancasila oleh seluruh komponen bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia.

Suatu kemerdekaan dan pembangunan nasional dapat diwujudkan apabila tercipta stabilitas nasional, untuk mewujudkan stabilitas nasional perlu tercipta kondisi Kamtibmas yang mantab dan dinamis serta dimilikinya sikap kewaspadaan dari seluruh komponen nasional Untuk mewujudkan bangsa. tersebut diperlukan peran maksimal pemerintah.

Dinamika stabilitas nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi

lingkungan strategis yang terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, pengetahuan dan teknologi serta dipengaruhi oleh perkembangan isu strategis baik yang bersifat nasional, regional maupun global. Isu global, demokratisasi, penegakan HAM, dan fenomena terorisme telah memperluas pandang dalam melihat cara kompleksitas ancaman yang ada. Stabilitas nasional merupakan salah satu prasyarat untuk berlangsungnya pembangunan mewujudkan cita-cita nasional yakni terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kondisi nasional yang stabil adalah terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia terjaganya keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia

dan kedaulatan Negara dari ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu ancaman yang dapat mengganggu terwujudnya stabilitas nasional dan keamanan dalam negeri adalah munculnya sikap dan tindakan radikal/kekerasan dan terorisme. Akhir-akhir ini masyarakat sering kali dihinggapi rasa ketakutan dan kekawatiran karena teror dan tindakan radikal/kekerasan, yang sepertinya terus berlangsung dengan modus dan sasaran yang berubah-ubah, semula sasarannya adalah simbol-simbol negara, termasuk kepada aparat keamanan yang dianggap mengusik kebebasan para teroris dalam bergerak dan kini telah bergeser menjadi target individu/ perorangan. Dengan kondisi seperti ini diperlukan kehadiran negara agar rasa aman dan jaminan keamanan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Namun peran serta seluruh warga masyarakat juga sangat penting dan diperlukan karena negara dan pemerintah harus dapat bekerja sama dengan seluruh rakyatnya.

Pemerintah maupun masyarakat luas pada umumnya meyakini bahwa fenomena teror dan terorisme ini belum akan hilang dengan begitu masih terdapat kalangan masyarakat yang menganggap bahwa mereka mampu melakukan teror. Teror ini dilihat sebagai suatu aktivitas menyimpang yang bermotif politik, ideologi, ekonomi bahkan agama dalam rangka menciptakan ketakutan di masyarakat atau untuk mempengaruhi masyarakat luas dengan penanaman ideologi keyakinan agama. Dalam kehidupan masyarakat masih kita rasakan adanya kelompok individu atau kelompokkelompok yang memiliki paham bahwa melakukan teror memang dibenarkan dalam rangka mencapai kepentingan para teroris. Hal inilah yang memudahkan para tokoh-tokoh jaringan terorisme tadi untuk merekrut pengikutnya atau bahkan dengan mudahnya mendapatkan meyakinkan calon "pengantin" (pelaku bom diri). Tentu dengan motif-motif yang sangat bervariasi baik politik, ekonomi, ideologi, agama maupun keamanan.

Motif yang menjadikan potensi kerawanan dari teror bermotif agama saat ini melebihi motif-motif lainnya seperti motif separatis (GAM Aceh dan OPM Papua) dan motif lain-lain (konflik horisontal antar kelompok Poso, Ambon dan lain lain). Potensi kerawanan terorisme dengan motif agama ini sangatlah beralasan mengingat jumlah pemeluk agama Islam Indonesia merupakan yang

terbesar diantara 10 (sepuluh) negara muslim di dunia yang rentan terhadap sasaran teroris. Namun demikian, apabila sebagian dari pemeluknya masih awam tentang ajaran agamanya misalnya bagi orang Islam yang memahami bahwa Islam sebagai rahmatan lil'alamin akan menjadi untuk dikontaminasi paham radikal dengan menyuarakan prinsip jihad fisabilillah agar dapat memperoleh mati sahid. Hal ini tentu akan dapat berimplikasi terhadap terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya umat Islam akan terpecah antara yang menyetujui dan tidak menyetujui adanya aksi tersebut.

Berdasar urian di atas, dewasa ini ada (dua) ancaman (dalam pengertian luas) yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, yakni pertama, lemahnya masih pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai nilai Pancasila secara komprehensif oleh masyarakat Indonesia dan kedua, berkembangnya gejala radikalisme pada sebagian kelompok masyarakat, yang selanjutnya dapat mengarah pada tindakan kekerasan dan terorisme. Pemerintah sebagai komponen penyelenggara negara, dan juga salah satu unsur negara tentunya memiliki peran penting di dalam menanggulangi ancaman tersebut. Tulisan ini ingin menyajikan dan mengkaji apa peran penting yang dapat dilakukan pemerintah guna mengantisipasi ancaman di atas.

METODE PENULISAN

Pengkajian ini dilakukan dengan cara deskriptive kualitatif. Artinya berupaya menyajikan fenomena disertai pembahasan berdasar

kenyataan yang sebenarnya. Sumber data adalah pustaka, berita terkini yang relevan dan beberapa informan terkait yani guru bidang PPKn dan dosen bidang pendidikan kewarganegaraan dan dosen Pancasila,. Sejalan dengan sumber data tersebut. teknik pengumpulan data menggunakan studi dokuentasi dan wawancara informan. Trianggulasi menggunakan trianggulasi sumber. **Analisis** menggunakan analisis interaktif, sedang sajian datanya dikemukakan secara naratif kualitatif.

PENGUATAN PANCASILA SEBAGAI KARAKTER BANGSA INDONESIA

Menurut Yudi Latif (Kompas, 28 Mei 2011), bahwa: setelah 70 tahun Pancasila hadir sebagai dasar dan haluan kenegaraan, langit kejiwaan bangsa ini lebih diliputi awan tebal pesimisme, ketimbang cahaya optimisme. Suasana kemurungan itu amat melumpuhkan. Impian kemajuan suatu bangsa tak bisa dibangun dengan pesimisme. Tentu saja yang kita perlukan bukanlah suatu optimisme yang buta, melainkan suatu optimisme dengan mata terbuka. Suatu harapan berjejak visi yang pada yang diperjuangkan menjadi kenyataan. Pancasila sesungguhnya memberikan landasan visi transformasi sosial yang holistik dan antisipatif. Berdasarkan pandangan hidup Pancasila, perubahan sistem sosial merupakan fungsi dari perubahan pada ranah mental-kultural (sila ke-1, 2, 3), ranah politikal (sila ke-4), dan ranah material (sila ke-5). Tiga ranah revolusi untuk mengatasi krisis multidimensional yang melanda

bangsa ini, imperatif Pancasila menghendaki adanya perubahan mendasar secara akseleratif, yang melibatkan revolusi material, mentalkultural, dan politikal. Revolusi (basis) material diarahkan untuk menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran: berlandaskan usaha tolong-menolong (gotong royong) dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting-yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta atas bumi, kekayaan dan alam vang terkandung di dalamnya; seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial. Revolusi (superstruktur) mental-kultural diarahkan untuk menciptakan religius masyarakat yang berperikemanusiaan, yang egaliter, mandiri, amanah, dan terbebas dari berhala materialisme-hedonisme; serta sanggup menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan). Revolusi (agensi) politikal diarahkan untuk menciptakan agen perubahan dalam bentuk integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan (negara kekeluargaan) dan keadilan kesejahteraan); (negara dengan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. seluruh kesejahteraan memajukan umum. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Ketiga ranah revolusi itu bisa dibedakan, tetapi tak dapat dipisahkan. Satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis.

Selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno, revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia bisa berdikari (mandiri) dalam perekonomian; revolusi mental agar bangsa Indonesia bisa berkepribadian dalam kebudayaan; revolusi politik, agar bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam politik. Secara sendiri-sendiri dan secara simultan ketiga ranah revolusi itu diarahkan untuk mencapai Revolusi Pancasila: tujuan mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual). Revolusi mental ini diorientasikan agar mental Pancasila bisa menjiwai dan perubahan mendorong di bidang material dan politik yang sejalan dengan idealitas Pancasila. Mental dapat diartikan sebagai suasana kejiwaan dan pola pikir (mindset) seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan pengertian itu, inti dari Revolusi Mental adalah perubahan mendasar pada pola pikir dan sikap kejiwaan bangsa Indonesia, sebagai prasyarat bagi perwujudan karakter yang bisa membuat bangsa berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Gerakan Revolusi Mental berangkat dari asumsi bahwa dengan mengubah akan mentalitas menimbulkan perubahan perilaku; perilaku yang terus diulang akan menjadi kebiasaan (adat istiadat/moralitas); sedangkan kebiasaan yang terus dipertahankan akan membentuk karakter. Dengan demikian, yang dikehendaki dari "Revolusi gerakan Mental" tidak berhenti pada perubahan pola pikir dan sikap kejiwaan saja, tetapi tujuan akhirnya adalah adaanya perubahan kebiasaan sehingga menjadi karakter yang menyatukan antara pikiran, sikap, dan tindakan sebagai suatu integritas.

Dasar dan haluan pembangunan mental-karakter ini adalah nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-1, 2 dan 3. Menurut pandangan hidup Pancasila, keberadaan manusia merupakan keberadaan yang diciptakan oleh sang maha Pencipta yang penuh sinta kasih. Di hadapan sang maha pengasih, semua manusia sederajat, vang melahirkan semangat-mental egalitarisme. Setiap pribadi dimuliakan sang pencipta dengan bawaan hak asasi yang tak bisa dirampas, seperti hak hidup, hak milik dan hak kehormatan-kemerdekaan. dengan kedudukan sama di depan hukum. Penghormatan terhadap eksistensi individu dan hak asasinya tidak berarti harus mengarah pada individualisme. Individualisme memandang bahwa manusia secara perseorangan merupakan unit dasar dari seluruh pengalaman manusia. Postulat dasar dari individualisme adalah otonomi dari independen setiap pribadi. Ungkapan yang sangat terkenal dari individualisme menyatakan: "Kamu datang ke dunia seorang diri dan meninggalkan dunia seorang diri." Meski kenyataannya tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia secara sendirian. Selalu ada ibu dan budaya komunitas yang menyertainya, bahkan mengantarnya hingga ke "tempat peristirahatan yang terakhir". menjadi karakteristik yang dari individualisme adalah keyakinan implisit bahwa relasi sosial bukanlah pembentuk perseorangan dalam pengalamannya yang paling

fundamental. Dengan kata lain. perseorangan tak dipandang sebagai produk relasi-relasi sosial. sosial adalah sesuatu yang terjadi pada individu ketimbang sesuatu yang mendefinisikan identitas mengoordinasikan eksistensi individu. Individu tidaklah dibentuk dan diubah secara fundamental oleh relasi sosial. Karena itu, tetap sebagai pribadi yang otonom-independen (Gilbert, 2014: 29-34). Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia, kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa, bergantung pada bentukbentuk kerja sama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan mengembangkan manusia dapat potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya. Tanpa kehadiran yang lain, manusia tidak akan pernah menjadi manusia sepenuhnya. Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, selain menjadi manusia yang baik, manusia harus membentuk kolektivitas yang baik. Dalam kaitan ini, pengembangan mental-karakter berorientasi harus ganda: ke dalam dan ke luar. Ke dalam, pengembangan mental-karakter harus memberi wahana kepada setiap individu untuk mengenali siapa dirinya "perwujudan sebagai khusus" ("diferensiasi") dari alam.

Proses pengembangan mentalkarakter harus membantu manusia menemukan kekhasan potensi diri sekaligus kemampuan untuk menempatkan keistimewaan diri itu dalam konteks keseimbangan keberlangsungan didunia yang luas Pengembangan danbesar. mentalkarakter harus memberikan wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama, melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Kebudayaan sebagai sistem nilai, pengetahuan, sistem dan sistem ini perilaku secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah karakter seseorang berkembang menjadi lebih lebih buruk. baik atau Dalam menghadirkan kolektivitas yang baik, setiap pribadi memiliki kewajiban sosial bahkan dituntut untuk mendahulukan kewajiban di atas hak. Seturut dengan itu, selain ada hak individu ada pula hak kolektif seperti dalam aspek ekonomi, sosial, budaya. Pesan moral dari alinea pertama UUD 1945. "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa". Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kemerdekaan bangsa ini adalah mental kemandirian. Kemandirian tidaklah dengan kesendirian. sama Kemandirian adalah sikap mental yang bisa dan berani berpikir, bersikap, dan bertindak secara berdaulat, bebas dari intervensi dan paksaan pihak-pihak lain. Menumbuhkan mental mandiri, selain mensyaratkan mental egaliter, juga meniscayakan adanya kecerdasan, kreativitas, dan produktivitas berbasis sains dan teknologi. Kemandirian

kolektif bangsa Indonesia juga bisa tumbuh secara konsisten jika warga bangsa Indonesia bisa menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur, dan bersih. Kolektivitas yang tidak disertai mentalitas kejujuran akan merobohkan kemandirian bangsa. bangsa Dalam suatu jika suatu perbuatan korupsi merajalela, kedaulatan bangsa tersebut mudah jatuh ke dalam intervensi bangsa lain. Selain semangat-mental egaliter, mandiri dan amanah, manusia sebagai religius makhluk yang berperikemanusiaan harus juga membebaskan dirinya dari mentuhankan/mengagung-agungkan materialisme dan hedonisme.

nilai-nilai Dalam Pancasila sebagai pandangan hidup Pancasila sangat penting dalam kehidupan kita, tetapi tak boleh diagung-agungkan. Di hadapan tuhan yang maha kuasa, materi itu bersifat relatif yang tidak dapat dimutlakkan. Dengan semangat ketuhanan yang berperikemanusiaan, materi sebagai hak milik itu memiliki fungsi sosial yang harus digunakan dengan semangat altruistis/murah hati. Dengan mental altruistis, manusia Indonesia sebagai makhluk sosial pergaulan dapat mengembangkan hidup kebangsaan yang ditandai dengan segala kemajemukannya dengan mentalitas gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika (persatuan dalam keragaman). Dengan semangat royong, persatuan warga gotong Indonesia bisa dikembangkan dengan menghargai adanya perbedaan; sedangkan dalam perbedaan bisa memelihara persatuan. Untuk bisa menumbuhkan mentalitas persatuan dalam keragaman itu diperlukan semangat-mental pengorbanan

pelayanan. Ujung dari semangat persamaan, kemandirian, kejujuran, alturisme dan persatuan adalah pelayanan kemanusiaan. Makna pelayanan di sini bukan hanya dalam kesiapan mental untuk menunaikan kewajiban sosial sesuai dengan tugas dan fungsi, tetapi juga dalam bentuk kerja keras dan kerja profesional dalam mengaktualisasikan potensi diri hingga meraih prestasi tertinggi di bidang masing-masing, yang dengan itu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan bangsa dan umat manusia. Demikianlah pandangan hidup Pancasila sudah mengandung bawaan mentalitasnya tersendiri. Oleh karena itu, gerakan Revolusi Mental tidak perlu memungut jenis-jenis mentalitas dari yang lain. Yang diperlukan adalah menentukan mentalitas inti sebagai prioritas perubahan. Logika revolusi menghendaki, "sekali revolusi dicetuskan, ia harus diselesaikan; tidak boleh ditinggalkan di tengah jalan sebelum tujuan revolusi itu tercapai, setidaknya hingga taraf minimum". Oleh karena itu, kita menunggu realisasi gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintahan ini secara konsisten.

membangun Upaya karakter bangsa Indonesia melalui pemahaman, penjiwaan, penghayatan dan pengamalan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa diimplementasikan dalam vang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat oleh seluruh penyelengara negara dan seluruh warga masyarakat perlu terus menerus dilakukan dan dimaksimalkan sehingga mencapai hasil yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil seminar yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Islam Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator **Bidang** dan Pembangunan Manusia Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia di UIN pada tanggal 29 September 2016, bertema "Pendidikan Karakter sebagai Basis Mental" Revolusi dengan menampilkan pembicara antara lain Dr. Yayah Nurmaliah (Dosen UIN Jakarta); Yudi Latif, Ph.D (Intelektual Muslim); dan Ferdinal Lafendri, M.A (Motivator Great Teacher). Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendidikan merupakan fondasi terpenting utama dan untuk menambah wawasan. membentuk karakter dan meningkatkan daya saing seseorang. Namun dalam konteks ke-Indonesiaan, pendidikan dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdasarkan falsafah dan pandangan hidup bangsa, Pancasila.
- berfungsi b. Pendidikan untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kualitas, pribadi, peradaban dan watak serta bangsa bermartabat. yang tolak Karena itu. ukur keberhasilannya adalah menghasilkan warga negara yang mampu berkarya dan memiliki budi pekerti luhur.
- Pendidikan karakter menjadi sangat penting karena nilai-nilai baik (positif) seperti;

- kesetiakawanan sosial, tanggung jawab sosial dan disiplin sosial, serta sikap moral yang baik ada dalam konsep pendidikan karakter tersebut. Untuk tujuan baik itulah pendidikan karakter kembali diselenggarakan di berbagai sekolah-sekolah di seluruh Nusantara.
- d. Pemerintahan di bawah presiden Widodo-Jusuf Joko Kalla, Menjadikan Indonesia baru dengan agenda besar Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) akan mengubah cara pandang pikiran, sikap, perilaku kita untuk berorientasi pada kemajuan, termasuk dalam pendidikan. Harapannya, pada siswa mampu menjiwai nilai-Pancasila nilai dan mengamalkannya dalam pergaulan sehari-hari. pendidikan karakter, diharapkan melahirkan pribadi-pribadi yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong.

Upaya penguatan pendidikan nilai-nilai karakter sesuai yang terkandung dalam Pancasila sebagai karakter bangsa diimplementasikan kedalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat oleh seluruh negara penyelengara dan seluruh warga masyarakat, telah dilakukan oleh pemerintah dengan terbitnya: "Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter", yang dalam konsideran pertimbangannya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya

- merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan religius, nilai-nilai jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif. cinta damai, membaca, peduli gemar lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, penguatan pendidikan karakter;
- c. bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Dalam rangka pembinaan pengamalan nilai-nilai Pancasila pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang dalam konsideran pertimbangannya menjelaskan:

 a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan

- Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilainilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan menjadi terpadu sehingga seluruh panduan bagi penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;
- c. bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila disempurnakan perlu direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya sehingga menjadi Pembinaan Ideologi Badan Pancasila yang dapat efektif menjalankan tugas dan fungsinya;
- d. bahwa Peraturan Presiden
 Nomor 54 Tahun 2077 tentang
 Unit Kerja Presiden Pembinaan
 Ideologi Pancasila perlu diganti
 dalam rangka penguatan
 pembinaan ideologi Pancasila
 dalam kehidupan
 bermasyarakat, berbangsa, dan
 bernegara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Presiden tersebut menggambarkan adanya upaya serius yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat karakter bangsa yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. oleh karena itu mewujudkan dan Pancasila mengamalkan nilai-nilai dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi hal yang mutlak harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia. Permasalahannya, sejauh mana kebijakan tersebut telah dijabarkan implementasinya sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan agar membangun karakter dan jati dirinya sebagai warga bangsa Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai Karakter bangsa Indonesia. Mari kita kaji, kita amati, kita kritisi kita berikan masukan terus agar kita juga mampu menerus dalam mewujudkan berperan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Guna mencegah terjadinya berbagai bentuk ganguan keamanan yang dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara seperti bentukbentuk kegiatan radikal dan teror yang dapat meresahkan dan membuat masyarakat tidak tenteram.

PANCASILA DAN RADIKALISME

Radikalisme menurut bahasa Indonesia berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme adalah itu suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu benar tapi tujuan yang dianggap

dengan menggunakan cara salah. Namun, dalam arti lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu radikalisme menurut pengertian lain adalah inti perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.

Faktor-faktor penyebab munculnya gerakan radikalisme ada dua faktor, pertama faktor internal, vakni adanya legitimasi teks dalam keagamaan, melakukan "perlawanan" kali itu sering menggunakan legitimasi teks (baik keagamaan maupun teks teks "cultural") . Faktor internal lainnya adalah dikarenakan gerakan mengalami frustasi yang mendalam karena belum mampu mewujudkan cita-cita berdirinya "Negara dengan agama tertentu" sehingga ideologi pelampiasannya dengan cara anarkis; mengebom fasilitas publik terorisme. Kedua faktor eksternal, yakni disebabkan oleh beberapa hal antara lain: a) Aspek ekonomipolitik, kekuasaan pemerintah yang menyeleweng dari nilai-nilai fundamental keagamaan. b) Aspek budaya, aspek ini menekankan pada budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini, budaya sekularisme yang dianggap sebagai musuh besar yang harus dihilangkan dari bumi. c) Aspek sosial politik, pemerintah yang kurang tegas dalam mengendalikan masalah teroris juga ini dapat dijadikan sebagai salah satu faktor maraknya radikalisme kalangan umat beragama.

Pancasila merupakan sumber dari segala segala sumber hukum Indonesia, sehingga berbagai perundangan dan peraturan baik di pemerintahan maupun pemerintahan daerah seharusnya tidak boleh keluar dari koridor Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, sampai sejauh ini masih banyak perundangan yang tidak mengedepankan nilai-nilai sebagaimana terkandung dalam pancasila dan UUD 1945. Bahkan uji materiil perundangan-undangan sering hanya diuji pada batang tubuh (pasalpasal) tetapi tidak diuji dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945 Dengan demikian Pancasila sebagai 'pusat kekuatan hukum' berdampak pada kehidupan bangsa dan negara secara keseluruhan dalam menangkal ideologi radikalisme.

Beberapa upaya mendasar dalam menangkal ideologi radikalisme global antara lain :

- 1. Memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi., antara meningkatkan lain dengan implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga rakyat bukan memahaminya secara efektif dan menindaklanjutinya secra psikomotoris. Dengan demikian, bukan saja kewibawaan Pancasila semakin meningkat karena didukung oleh implementasi nilai-nilai Pancasila oleh warga masyarakat secara nyata, tetapi juga menjadikan ideologi radikal global semakin menurun.
- 2. Mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikal global tersebut dan membuktikan

- kekeliruan dan kelemahan dalildalil yang dianutnya, bukan saja dari aspek internal tetapi juga dari aspek eksternal.
- 3. Meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut, antara lain dengan menegakkan keadilan kebenaran, menghargai harkat dan martabat manusia, mencegah terjadinya mencegah diskriminasi, mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
- Mengambil tindakan preventif serta represif yang tepat dan cepat terhadap indikasi telah adanya aksi-aksi radikal di dalam masyarakat.
- 5. Melakukan deradikalisasi terhadap ideologi radikal dan teror dengan berbagai langkah strategis dan teknis secara tepat dan persuasif.

DERADIKALISASI SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERILAKU RADIKAL DAN TEROR

melakukan Upaya penanggulangan aksi terorisme salah satunya telah dijawab oleh Pemerintah RI dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dimana tugas penanggulangan aksi terorisme tidak lagi ditangani sendiri oleh Polri namun melibatkan instansi terkait lainnya mengedepankan dengan tetap penegakan hukum di bawah koordinasi BNPT. Meskipun dewasa ini belum bekerja optimal, Pemerintah berharap lembaga ini dapat menjadi sebuah solusi dalam menanggulangi terorisme.

Merespons hal itu, masyarakat secara umum masih belum puas dengan kebijakan, strategi dan operasi penanggulangan terorisme saat ini mengingat terorisme belum dikatakan lumpuh atau mati sama sekali walau telah ratusan teroris diadili dan puluhan yang lain ditembak mati. Sehingga dipandang upaya-upaya perlu adanya menemukan langkah-langkah startegis dalam rangka mengatasi ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara mewujudkan keberhasilan guna pembangunan nasional.

Beberapa langkah memang telah pemerintah dalam diambil menanggulangi hal tersebut, namun perlu dimaksimalkan dan diberikan atensi khusus dalam implementasinya, pertama antara lain melakukan pemahaman, penjiwaan, penghayatan dan pengamalan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa diimplementasikan yang kedalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat oleh seluruh penyelengara negara dan seluruh warga masyarakat. kedua melakukan upaya deradikalisasi guna mencegah tindakan radikal dan teror yang oleh individu dilakukan atau kelompok-kelompok tidak yang bertanggung jawab. ketiga melakukan tindakan hukum yang benar-benar menimbulkan efek iera serta menumpas secara tuntas sampai keakar-akarnya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila prinsip-prinsip dan HAM dan kemanusiaan.

Satu langkah lagi yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mengatasi adanya tindakan radikal dan teror adalah melakukan deradikalisasi.

Perlu dipahami bahwa untuk mencegah berkembangnya radikalisme yang lebih luas, Pemerintah melalui Polri, TNI dan BNPT memerlukan optimalisasi secara strategis dan teknis dengan cepat dan tepat sasaran dengan pendekatan emosional soft approach program deradikalisasi. dalam Deradikalisasi sendiri adalah segala menetralisir pahamupava untuk paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau pro kekerasan.

Program deradikalisasi sesungguhnya sejalan dengan Nawa Cita Pemerintah¹ poin ke 1 (satu) yaitu "Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu dilandasi kepentingan yang nasional...". Program deradikalisasi merupakan upaya untuk menetralisir ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi radikalisme / terorisme. Namun secara spesifik program deradikalisasi belum menjadi komprehensif, program yang terlegislasi, terintegrasi dan permanen di Indonesia. Program deradikalisasi di Indonesia idealnya dilakukan untuk menetralisir berkembangnya faham radikal, dengan sasaran para napi,

Kompas.com. "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. Diakses Tanggal 10 Juni 2016. (http://nasional.kompas.com/read/201 4/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agend a.Prioritas.Jokowi-JK).

mantan napi, keluarga napi, mantan Mujahidin Afganistan, **ISIS** kelompok-kelompok potensial lainnya. **Proses** deradikalisasi dilakukan melalui rangkaian kegiatan konseling, re-edukasi dan rehabilitasi. Upaya yang dilakukan Polri selama ini lebih bersifat Represif and Trial dengan motif kebutuhan dan inisiatif untuk mengungkap kasus secara maksimal mengajukannya ke sidang pengadilan. Faktor pendorong utama program deradikalisasi ini yaitu untuk menggali info dari para tersangka agar mereka kooperatif dalam proses interogasi sehingga dapat memberikan info tentang motif dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelompok jaringan. Konsepsi dasar dalam menangani jaringan terorisme dan paham radikal adalah kemampuan memahami secara akurat, mulai dari visi, misi, ideologi, sudut pandang politik, tujuan organisasi, administrasi, Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) organisasi, kekuatan personil, kekuatan militer (persenjataan yang dimiliki), sistem rekrutmen, pola operasi dan budaya organisasi. Dengan mengoptimalkan program deradikalisasi ini, pencegahan terhadap berkembangnya terorisme / paham radikal diyakini dapat berjalan secara efektif, sehingga pelaksanaan program deradikalisasi nantinya dapat dijadikan barometer dalam mencegah berkembangnnya radikalisme terorisme khususnya di indonesia.

Saat ini berbagai aksi teror sudah memasuki tahap destruktif yang *membawa* korban harta benda dan bahkan nyawa, sehingga mengganggu keamanan dalam negeri, dimana para pelaku teror tergiring dengan opini kekerasan yang menjadi pilihannya.

Kondisi ini tentunya harus ditindak lanjuti dengan dibangunnya sikap kewaspadaan nasional kepada seluruh komponen bangsa melalui keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman serta mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional. kewaspadaan Cerminan nasional terwujud dalam program Nawa Cita Pemerintah² poin ke 4 (empat) yaitu "Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum...", ini dapat diartikan bahwa Negara menolak lemah terhadap berbagai aksi terorisme dan radikalisme. Kewaspadaan nasional merupakan suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga terhadap kelangsungan negara kehidupan nasionalnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegaranya dari suatu ancaman. Kewaspadaan nasional juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk potensi ancaman keamanan terhadap NKRI. Kewaspadaan nasional dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena Kewaspadaan nasional harus bertolak dari keyakinan ideologis dan

Kompas.com. "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. Diakses Tanggal 10 Juni 2016. (http://nasional.kompas.com/read/201 4/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agend a.Prioritas.Jokowi-JK).

nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha mulai dari early warning (peringatan dini), early detection (deteksi dini), tangkal awal, tanggap awal dan cegah awal secara terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang termasuk terorisme dan radikalisme baik di dalam maupun di luar negeri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah, peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk memprioritaskan agenda deradikalisasi sebagai bagian kewaspadaan nasional dalam program-program pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat stabilitas keamanan yang kokoh dan sebagai perwujudan mantap sebuah kewaspadaan nasional yang merupakan salah satu syarat dan faktor pendorong dalam pembangunan nasional maupun daerah. Program pembangunan yang paling berkaitan dengan hal tersebut diantaranya adalah program-program pembangunan sosial-ekonomi secara adil dan merata termasuk penguatan idiologi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup negara. Karena hal paling mendasar yang menyebabkan suburnya radikalisme / terorisme adalah kemiskinan, ketidakadilan serta lemahnya pemahaman terhadap nilainilai luhur Pancasila, dan hal tersebut menjadi penyebab sangat mudah dimasuki faham-faham radikal.

Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyadari bahwa pembiaran persoalan radikalisme akan berujung pada terganggunya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketika keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah

terganggu, akan berimplikasi pada terhambatnya pelayanan publik dan pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah baik dari tingkat pusat sampai daerah, memiliki kewajiban untuk memformulasikan strategi guna meminimalisir faktor-faktor penyebab berkembangnya meniadi faham radikal / radikalisme, bersamasama dengan segenap elemen bangsa lainnya sesuai prinsip keadilan, kesetaraan serta kebhinekaan dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional yang kokoh dan mantap.

PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN TERORISME MASALAHNYA

DAN

Mengutip tulisan Jenderal Polisi Kanrnavian Tito pada makalah Seminar Sespimmen Polri Angkatan 56 tanggal 11 Oktober 2016, bahwa sejumlah peristiwa teror menunjukkan adanya mata rantai antara kelompok dalam dan luar negeri. Berdasarkan hasil pengungkapan kasus di Indonesia diketahui terdapat jaringan teroris internasional dimana keberadaannya segala aktifitasnya tidak dapat terdeteksi secara dini sehingga sulit untuk dicegah dan ditangkal. Kondisi saat ini tidak bisa terlepas dari kondisi sebelumnya, yaitu pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi saat ini.

- 1. Perkembangan strategi penanggulangan teror di Indonesia dapat digambarkan dalam 3 (tiga) periode politik :
 - a. Pertama, periode politik orde lama yang mengutamakan operasi militer. Pada periode ini, kekuatan militer, dalam hal ini ABRI (kini TNI), menjadi fungsi

- utama dan Kepolisian sebagai pendukung dalam fungsi penanggulangan serta pemberantasan terorisme beserta gerakan-gerakan separatisme yang marak berkembang di tanah air pada masa itu yang ingin merubah sistem negara kesatuan ingin menggulingkan Pemerintah RI yang sah pada saat itu, sehingga dikhawatirkan menimbulkan disintegrasi bangsa serta runtuhnya NKRI. Presiden RI pada saat itu, Ir. Soekarno, menempuh operasi yang militer ditindaklanjuti dengan cara diplomasi sebagai pemecahan persoalan negara pada saat itu.
- b. Kedua, periode politik orde baru mengutamakan operasi intelijen. Pada periode Orde Presiden Baru. Soeharto menggunakan pola pemberantasan terorisme hampir sama dengan yang digunakan oleh Presiden Soekarno pada masa Orde Lama, namun operasi militer yang digunakan Pemerintah Orde Baru mengedepankan fungsi intelijen, khususnya dari kalangan TNI-AD sebagai fungsi utama. Hal itu merupakan bagian operasi militer dengan fungsi utama operasional ada pada TNI. Kepolisian hanya digunakan sebagai fungsi pendukung untuk penegakan hukum.

Fungsi ini mengutamakan upaya represif secara hard power dengan pendekatan militeristik yang didukung oleh perangkat Undang-Undang Subversi (PNPS nomor 11 tahun 1963)

- serta undang-undang dan peraturan Pemerintah lainnya yang bertujuan mempersempit ruang gerak terorisme serta gerakan separatis lainnya. Terbukti upaya ini sangat efektif pada masa itu namun meninggalkan bom waktu berupa maraknya gerakan-gerakan bawah tanah melalui Organisasi-Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang pada akhir periode Orde Baru lalu berkembang pesat.
- c. Ketiga, periode Reformasi yang mengutamakan penegakan hukum (law enforcement) Seiring dengan beralihnya Pemerintahan dari tangan serta kekuatan militer pada kekuatan sipil, terjadi pergeseran fungsi dimana Kepolisian Negara RI dikedepankan untuk melakukan upaya penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk gangguan keamanan dari dan di dalam negeri menjadi tugas pokok fungsi Kepolisian, termasuk tindakan terorisme berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No.4/2002 dan ditindaklanjuti dengan Perpu No.1 tahun 2002 dan No. 2 tahun 2002. Untuk pemberantasan terorisme, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 dan UU No.16 Tahun 2003 yang merupakan penetapan dari kedua Perpu tersebut, UU No. 16 Tahun 2003 dan belakangan telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi RI.
- 2. Permasalahan yang dihadapi

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah khususnya aparat keamanan dalam pengungkapan pelaku terorisme, maka terlihat masih ada beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

- a. Permasalahan secara umum
 - Pemetaan terhadap kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi belum terlaksana secara optimal, dikarenakan pergerakan kelompok yang dinamis karena polri belum memiliki single national radicalism mapping.
 - 2) Pembangunan peran masyarakat melalui strategi pencegahan, baik melalui impelementasi kontra radikal, kontra naratif, dan *preventif justicial* belum mampu untuk "menggugah" partisipasi masyarakat.
- 3) Identifikasi baru sebatas pada kelompok besar saja, belum menyentuh pada kelompok kecil tersebar, sehingga yg pelaksanaan fungsi pre emptif preventif dan belum komprehensif karena belum mampu untuk merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat, pemda dan masyarakat setempat.
- 4) Kegiatan dialogis belum berjalan maksimal, peran Bhabinkamtibmas belum berjalan secara maksimal
- Upaya penegakkan hukum masih menimbulkan komplain dari sebagian masyarakat karena dianggap mengekang kebebasan berekspresi
- b. Belum optimalnya strategi penanggulangan terorisme guna memperoleh hasil yang lebih

- komprehensif sehingga gerakan terorisme dapat ditekan serta akar permasalahannya dapat diselesaikan. **Termasuk** deradikalisasi yang diupayakan BNPT, dengan melibatkan ogranisasi yang mengakar pada masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, MUI danlain-lain.
- c. Belum optimalnya segenap potensi sumber daya negara guna penanggulangan terorisme mengingat belum terlibatnya semua unsur yang terkait dalam supra struktur, infrastruktur maupun sub struktur.
- d. Belum terdapatnya sinergi atas semua insiatif sektoral dalam rangka penanggulangan terorisme yang telah dilakukan oleh berbagai komponen bangsa dalam rangka memberikan hasil yang optimal dan tidak terkotakkotak.
- e. Belum optimalnya kerja sama luar negeri bidang di penanggulangan terorisme secara optimal untuk menekan jaringan terorisme yang memiliki afiliasi dengan luar negeri serta menyelesaikan permasalahan yang melibatkan isu di luar teritorial Indonesia, melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum regional dan internasional yang khusus terkait penanggulangan terorisme.

BEBERAPA TEORI PENANGGULANGAN TERORISME

Beberapa pendapat para ahli tentang teori dalam penanggulangan terorisme dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori tentang Ambiguitas Terorisme³

Dalam menjelaskan tentang terorisme, Walter mengutip definisi terorisme dari Departemen Pertahanan Serikat (1990)Amerika sebagai berikut, "The unlawful use of, or threatened use, of force or violence against individuals or property to coerce and intimidate governments or societies, often to achieve political, religious or ideological religious objectives."

Berdasarkan definisi tersebut, Walter sampai pada kesimpulan bahwa terorisme terlalu ambigu untuk didefinisikan ataupun dijelaskan. Terorisme terlalu besar dalam ide, hebat dalam visi namun sekaligus amat absurd dalam realisasi karena pilihan terorisme adalah menghancurkan.

Aksi terorisme tidak lagi menjadi suatu tindakan yang memiliki muatan isu sektoral (sectoral issues) dari tiaptiap negara yang mengalaminya. Namun, terorisme melampaui semua itu karena adanya muatan dimensi politik tingkat tinggi. Kekuatan yang terkandung dalam sebuah aksi terorisme yang dirancang sedemikian rupa menyimpan potensi yang menakutkan, tidak saja bagi warga dunia yang pernah mengalaminya secara langsung, namun juga ketakutan tersebut telah menjalar kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun mereka berada.

2. Teori tentang Penyebab Terorisme Richardson menjelaskan Louis terorisme setidaknya bahwa diakibatkan oleh kombinasi 3 faktor penyebab yaitu disaffected person, group dan legitimizing enabling ideology.4 Disaffected persons adalah orang-orang yang kecewa dan tidak karena berbagai puas persoalan diantaranya marjinalisasi politik, kemiskinan, ketidakadilan hukum. budaya sebagainya. dan Namun individu-individu yang kecewa ini tidak akan menjadi masalah besar hanya terjadi pada tingkat individu. Mereka akan berbahaya jika terdapat enabling group, vaitu kelompok yang memobilisasi para individu mengorganisir tersebut, mereka dan memberikan kemampuan sehingga mereka menjadi kelompok yang terdiri dari orang-orang yang kecewa dan emosional. Kelompok ini akan menjadi sangat berbahaya jika terdapat ideologi yang membolehkan dan melegitimasi mereka untuk melakukan cara kekerasan guna memenuhi keinginan dan membalas kekecewaan mereka.

Dalam konteks Indonesia, enabling groups tersebut sudah terbentuk yaitu jaringan Islamis radikal yang bersumber dari gerakan Darul Islam. Kelompok utama yang aktif melakukan aksi serangan teror adalah al Jamaah al Islamiyyah (JI). Jaringan ini melakukan aktifitasnya didasarkan pada ideologi Salafi Jihadi yang membolehkan penggunaan kekerasan

52

Walter Laquer, The New Terrorism, Fanaticism and the Arms of Destruction, UK: Oxford University Press, 1999 dalam makalah Usman Hamid, "Pengembangan pemikiran dan Solusi Strategis Penanggulangan Aksi Terorisme dalam Perspektif Hukum dan HAM", Diskusi Meja Bundar Lemhannas RI, 15 Mei 2011

⁴ Richardson, Louise, *What Terrorists Want: Understanding Enemy, Containing Threat*, London, John Murray, 2006, p. 93.

atas nama jihad untuk menegakkan Negara Islam Indonesia berlandaskan syariah Islam. Dengan demikian dua unsur utama terjadinya terorisme telah ada, sehingga jika unsur ketiga yaitu disaffected persons hadir terbentuk potensi terorisme yang besar. Oleh karena itu. untuk mencegah terorisme disamping upaya ideologi menetralisir radikal melemahkan enabling groups baik dengan cara keras maupun lunak, diperlukan juga upaya untuk mencegah munculnnya kekecewaan anggota masyarakat, terhadap terutama pemerintah di berbagai bidang kehidupan.

3. Teori tentang Dampak Terorisme

Puslitbang Strahan Kementerian Pertahanan (2004) dalam makalahnya menjelaskan bahwa dampak terorisme terjadi di bidang politik, hukum, Pemerintahan, antara lain berupa: (1) Gangguan terhadap kehidupan demokrasi; (2) Hukum dan tata tertib terganggu; (3) Roda Pemerintahan tidak berjalan lancar; (4) Pada tahap tertentu bisa mengakibatkan vacuum of power dimana suatu Pemerintahan yang lemah bisa jatuh.

Dalam bidang ekonomi, dampaknya bisa berupa antara lain: (1) Gangguan terhadap mekanisme ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa, harga saham jatuh; (2) Investasi/penanaman modal menurun drastis; (3) Kehancuran sarana prasarana ekonomi; serta (4) Timbul pengangguran dalam jumlah besar.

Dalam bidang psikologi, dampak antara lain berupa: (1) Timbulnya rasa takut dan trauma di masyarakat; serta (2) Akibat trauma, masyarakat lalu bersikap apatis dan bereaksi tidak wajar.

Dampak dalam bidang sosial, antara lain: (1) Tatanan law and order dalam masyarakat terganggu; (2) Bisa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat; serta (3) Bisa menyebabkan terjadinya perubahan nilai dan pergeseran norma dalam masyarakat. Dalam bidang keamanan, antara lain, (1) Kamtibmas terganggu; serta (2) Ruang gerak anggota masyarakat terganggu. Sedangkan dampaknya dalam bidang hubungan internasional, adalah terganggunya hubungan antar negara.

4. Teori tentang Penanggulangan Terorisme

Konsep "Penanggulangan" berasal dari kata "tanggul" yang menunjuk suatu bangunan sederhana vang berfungsi sebagai penahan atau pembatas air agar tidak mengalir kemana-mana. Jadi, terhadap suatu masalah yang hendak ditanggulangi, maka penanggulangan bisa berarti menghancurkan, mengurangi, membatasi. menghilangkan atau mencegah. Sebaliknya, untuk bisa melakukan satu atau lebih hal tersebut, dimiliki sebelumnya kekuatan, enerji atau daya yang jauh lebih besar dari obyek yang hendak ditanggulangi.

Upaya penanganan terorisme sebelumnya memerlukan pemahaman mendalam tentang aktivitas yang dilakukan teroris. Berdasarkan studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan oleh PBB disimpulkan karakteristik psikologis dan sasaran gerakan

terorisme.⁵ Karakteristik terorisme meliputi: a) Para teroris umumnya mempunyai persepsi tentang adanya kondisi yang menindas secara nyata atau khayalan yang harus diubah; b) Teroris menganggap proses damai untuk perubahan tidak akan diperoleh dan kekerasan sah dilakukan agar tujuan tercapai; c) Pilihan tindakan berkaitan dengan ideologi yang dianut dan tujuan yang dirasakan sebagai kewajiban sehingga konsep penangkalan (deterrence) yang konvensional tidak efektif lagi dalam upaya pemberantasan terorisme; d) Tanpa resosialisasi dan reintegrasi, mereka akan lebih radikal dan penerus atau pengagumnya akan berbuat lebih kekerasan lanjut yang menempatkan mereka sebagai pahlawan (dan korban sekaligus).

Lindsay Clutterbuck menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat dua paradigma dalam memperlakukan terorisme.⁶

Pertama, paradigma war model yang menganggap bahwa terorisme adalah musuh perang sehingga perlu dihadapi dengan pendekatan militer. Model ini pada dasarnya digunakan jika terorisme merupakan jaringan internasional yang lebih banyak elemen asingnya, dan kekuatan militer jaringan terorisme berada di luar kemampuan penegak hukum. Penggunaan kekuatan militer biasanya

akan mendatangkan hasil yang cepat namun resiko penggunaan kekuatan eksesif yang dapat menimbulkan antipati masyarakat dan dunia internasional.

Kedua adalah penegakan hukum (criminal justice model), yang mengedepankan lembaga penegak hukum pada garis depan memandang terorisme sebagai suatu kejahatan luar biasa. Umumnya model ini diadopsi jika pelaku teror lebih dominan unsur dalam negeri (homegrown terrorist) dan kemampuan militernya masih mampu diatasi oleh penegak hukum. Model ini disukai di demokratis karena mengindahkan HAM dan penggunaan (minimum upaya paksa minimal force), namun hasilnya cenderung lebih lamban karena kendala pada sistem pembuktian hukum.

Konsepsi strategi penanggulangan terorisme seyogyanya mempertimbangkan kedua model ini vang lebih tepat dengan karakteristik unsur dalam/luar negeri jaringan terorisme di Indonesia. kemampuan militer terorisme sistem politik, sosial dan hukum Indonesia, serta sikap kawasan regional dan global terhadap terorisme di Indonesia.

5. Teori tentang Berakhirnya Terorisme

Mendasarkan pada penelitiannya tentang berakhirnya sejumlah gerakan terorisme di dunia, Cronin menyimpulkan bahwa ada 6 cara gerakan terorisme berakhir yakni sebagai berikut^{:7}

South East Asia Counter Terrorisme (SEACT), (2008), Terorisme dan Penanggulangannya (http://seact.info/index.php.p=articles&lang=id)

⁶ Lindsay Clutterbuck, "Law Enforcement", dalam Audrey Kurth Cronin, op. Cit, 2004.

⁷ Audrey Kurth Cronin, *How Terrorism Ends: Undertanding the The Decline and*

- a. Decapitation: terbunuhnya atau tertangkapnya pimpinan gerakan terorisme dimana peranan pimpinan tersebut amat sentral dalam gerakan.
- b. *Negotiation*: negosiasi untuk transisi gerakan terorisme untuk masuk ke dalam proses politik yang berlaku di negara.
- c. Success of achieving objectives: gerakan terorisme telah mampu mencapai tujuan gerakan.
- d. Losing support: public hilangnya dukungan masyarakat kepada gerakan terorisme karena faktorfaktor tertentu sehingga tidak gerakan terorisme mendapat tempat di masyarakat.
- e. Repression: tekanan negara yang amat kuat dengan upaya paksa sehingga gerakan terorisme tidak mampu berkembang.
- f. Reorientation of tactics:

 perubahan taktik untuk

 mencapai tujuan gerakan,

 misalnya dengan perang

 gerilya atau dengan cara non

 kekerasan.
- 6. Teori tentang Penggunaan Hard Power dan Soft Power

Copeland menerangkan bahwa untuk menghadapi terorisme negara dapat menggunakan pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan lunak

Demise of Terrorist Campaigns, Princeton University Press, Princeton, 2009.

(soft approach) secara simultan.8 Untuk pendekatan keras, menurut Lindsay Clutterbuck, negara memiliki 3 instrumen vaitu militer, intelijen dan hukum.9 penegak Sedangkan pendekatan lunak diantaranya menggunakan cara pengembangan ekonomi, pendekatan sosial budaya, negosiasi politik, dan sebagainya, termasuk Deradikalisasi.

PENANAMAN NILAI LUHUR PANCASILA DALAM UPAYA MENJADIKAN KARAKTER BANGSA

Dalam rangka penanaman nilai luhur Pancasila agar menjadi karakter bangsa guna penangulangan radikalisme dan terorisme, perlu penanaman nilai-nilai luhur pancasila yang benar-benar membumi mengakar sehingga menjadi karakter bangsa Indonesia, hal ini dilakukan dengan langkah menentukan kebijakan yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini peran pemerintah melalui **BPIP** harus dioptimalkan sesuai tugas pokok fungsi dan perannya.

Beberapa Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui optimalisasi fungsi dan peran BPIP antara lain adalah :

 Segera melakukan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan penyusunan garis-garis besar

⁸ Daryl Copeland, Hard Power vs Soft Power, pada http://www.themarknews.com/articles/ 895-hard-power-vs-soft-power. diakses tgl 14 Mei 2011.

⁹ Lindsay Clutterbuck, "Law Enforcement", dalam Audrey Kurth Cronin, op. Cit, 2004.

- haluan pembinaan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2. Segera melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila yang link and macth dengan seluruh instansi pemeintah, swasta dan lembaga pendidikan;
- 3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila secara inten dan berkelanjutan dengan strategi yang tepat;
- 4. Melakukan pengaturan secara teknis dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- 5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- 6. Terus menerus melaksanakan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- 7. Terus melakukan menerus materi pengkajian dan metodologi pembelajaran Pancasila untuk seluruh lapisan masyarakat baik melalui jalur pendidikan formal. informal formal maupun non mengevaluasi terus materi yang diberikan:
- 8. Melakukan Advokasi dalam penerapan pembinaan ideologi

- Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi/perundang-undangan secara menyeluruh;
- 9. penyusunan Melakukan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara nyata dengana berbagai teknik dan metode yang dapat menyentuh hati masyarakat;
- 10. Terus-menerus memberikan rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Apabila beberapa langkah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka dampaknya akan dapat dirasakan oleh sebagaimana pada era masvarakat. sebelumnya dengan gaung penataran P4, bahwa kebijakan tersebut tidak selamanya salah namun hal-hal yang baik tidak ada salahnya diterapkan mewujudkan kembali dalam masyarakat yang mengmalkan nilai-Pancasila dalam nilai kehidupan masyarakat.

PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME

Adanya strategi penanggulangan terorisme yang komprehensif sehingga dapat menekan gerakan terorisme dan juga menyelesaikan akar permasalahannya melalui penegakan hukum yang kuat, menghilangkan tindakan represi dan ekstra yudisial kepada fihak yang kritis, dan memaksimalkan koordinasi antar instansi dan aparat terkait.

- 2. Mengoptimalisasikan segenap potensi sumber daya negara guna penanggulangan terorisme mengingat belum terlibatnya semua unsur yang terkait dalam supra struktur, infrastruktur maupun sub struktur. Melalui peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan, merubah pola pikir yang primordialistik dan berfikir kelompok, sektoral, menghindari sikap hipokrit atau euphemisme dalam rangka mendidik muda. generasi Penyelenggaraan pendidikan nilai-nilai universal.
- 3. melindungi orang-orang dan memberikan pengakuan yang sama atas hak-hak dan kewajiban semua orang di bidang sosial, ekonomi, politik budaya dan sebagainya tanpa membedakan asal-usul keturunan, agama, suku, ras dan seterusnya
- 4. Adanya sinergi terkait seluruh insiatif sektoral dalam rangka penanggulangan terorisme yang telah dilakukan oleh berbagai komponen bangsa dalam rangka memberikan hasil yang optimal dan tidak terkotak-kotak.
- 5. Adanya kerjasama luar negeri optimal di yang bidang penanggulangan terorisme secara maksimal untuk menekan jaringan terorisme yang memiliki afiliasi dengan luar negeri serta menyelesaikan akar permasalahan yang melibatkan isu di luar teritorial Indonesia
- 6. Melibatkan unsur terkait dan seluruh elemen masyarakat dalam penanggulangan terorisme

- melalui program deradikalisasi, dalam bentuk:
- a. Dilakukan dialog antar tokohtokoh agama untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dan nilai pluralistik bangsa Indonesia.
- b. Khususnya tokoh agama Islam melakukan kegiatan dialog antar tokoh Islam baik yang moderat maupun radikal guna mengubah pemahaman radikal dari kelompok radikal menjadi moderat dan masyarakat memahami bahaya faham radikal.
- c. Tokoh pemuda dan tokoh masyarakat aktif menyampaikan dukungan mereka terhadap Pemerintah menanggulangi untuk terorisme, menyatakan perang terhadap aksi terorisme, aktif ikut memantau pergerakan jaringan terorisme di lingkungannya masingmasing dan melaporkannya kepada otoritas keamanan dan intelijen serta penegak hukum untuk dilakukan tindakan hukum.
- d. Tokoh adat menyampaikan dukungan kepada Pemerintah dalam memberantas terorisme dan menyatakan antipatinya terhadap gerakan terorisme, serta aktif mengajak anggota komunitas adatnya untuk tidak terpengaruh faham radikal serta aktif melaporkan informasi gerakan terorisme kepada pihak Pemerintah yang berwenang.
- e. Organisasi kepemudaan, organisasi massa dan berbagai

kelompok masyarakat termasuk pecinta alam dan organisasi seni dan budaya menyatakan dukungan kepada Pemerintah untuk memberantas terorisme dan memerangi terorisme serta dalam pencegahan, aktif perlindungan, kampanye anti terorisme serta memberikan tentang gerakan informasi terorisme kepada pihak Pemerintah yang berwenang.

PENUTUP

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam rangka pembinaan karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. dalam rangka mencegah menanggulangi dan radikalisme dan terorisme. Perlu ditegaskan bahwa salah satu ancaman yang ada di depan mata saat ini adalah merosotnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia karena kurang pemahaman,

REFERENSI

Audrey Kurth Cronin, How Terrorism Ends: Undertanding the The Decline and Demise of Terrorist Campaigns, Princeton University Press, Princeton, 2009.

Daryl Copeland, Hard Power vs Soft Power, pada http://www.themarknews.com/articles/ 895-hard-power-vs-soft-power. diakses tgl 14 Mei 2011.

Hasil Seminar oleh Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia di UIN pada penghayatan dan pengamalan nilainilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku hidup berbangsa dan bernegara, serta terjadinya ancaman radikalisme yang mengarah pada kekerasan dan terorisme.

Oleh karena itu Pembinaan ideologi Pancasila harus benar-benar segera diwujudkan secara nyata dan untuk mengatasi tindakan radikalis dan teror maka disamping upaya preventif dan represif yang telah dilakukan, upaya deradikalisasi merupakan salah satu upaya yang harus dikembangkan dalam rangka meminimalisir berkembangnya sikap dan faham mengarah radikal yang kepada kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu perlu dimaksimalkan peran utama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga negara ini mampu memberikan rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat.

tanggal 29 September 2016, dengan tema: "Pendidikan Karakter sebagai Basis Revolusi Mental".

https://nasional.kompas.com/read/2015/05/28/1514003/Mental Pancasila

Kompas.com. "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. Diakses Tanggal 10 Juni 2016. (http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.

Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK).

Lindsay Clutterbuck, "Law Enforcement", dalam Audrey Kurth Cronin, 2004.

Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter",

Richardson, Louise, What Terrorists Want: Understanding Enemy, Containing Threat, London, John Murray, 2006.

South East Asia Counter Terrorisme (SEACT), (2008), Terorisme dan Penanggulangannya (http://seact.info/index.php.p=articles &lang=id) Walter Laquer, The New Terrorism, Fanaticism and the Arms of Destruction, UK: Oxford University Press, 1999 dalam makalah Usman Hamid, "Pengembangan pemikiran dan Solusi Strategis Penanggulangan Aksi Terorisme dalam Perspektif Hukum dan HAM", Diskusi Meja Bundar Lemhannas RI, 15 Mei 2011

Yudi Latif, Pemikir Kenegaraan dan Kebangsaan * Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Mei 2015 dengan judul "Mental Pancasila".

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP INTELLECTUAL SKILLS SISWA KELAS XI PADA MATA PELAJARAN PPKN DI SMA NEGERI 1 SUKOHARJO

Sinta Dewi Prihandini, Hassan Suryono, Winarno Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta e-mail: sintadewi.prihandini@student.uns.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari ada tidaknya pengaruh model pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share terhadap intellectual skills siswa pada kompetensi dasar Mengkaji Kasus-Kasus Ancaman Terhadap Ideologi, Politik, Ekonomi, Social, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan dan Strategi Mengatasinya Dalam Bhineka Tunggal Ika kelas XI SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Desain penelitian ini adalah true eksperimental design dengan model postest only control design. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 2018/2019. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 siswa yang terdiri dari 34 siswa sebagai kelompok eksperimen dan 34 siswa sebagai kelompok kontrol. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. Untuk ketepatan dan kesahihan tes intelektual skill siswa digunakan uji validitas dan reliabilitas. Adapun untuk menghitung valid tidaknya butir soal digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson. Sedangkan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alpha Cronbach. Teknik anlisis data menggunakan uji regresi satu prediktor. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh besarnya korelasi antara model pembelajaran model pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share terhadap intellectual skills siswa pada kompetensi dasar Mengkaji Kasus-Kasus Ancaman Terhadap Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan dan Strategi Mengatasinya Dalam Bhineka Tunggal Ika sebesar 0,41. Kemudian dikonsultasikan pada r_{tabel} dengan N=34 dan taraf signifikansi 5% diperoleh r_{tabel} 0,339. Dengan demikian r_{hitung} (0,41) > r_{tabel} (0,339), sehingga ada pengaruh model pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share terhadap intellectual skills siswa (Y). Adapun sumbangan determinannya sebesar 17,55% dengan hasil perhitungan persamaan regresi yaitu $\hat{Y} =$ 56,157+0,4030X. Dengan demikian terdapat pengaruh model pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) terhadap intellectual skills siswa pada kompetensi dasar Mengkaji Kasus-Kasus Ancaman Terhadap Ideologi, Politik, Ekonomi, Social, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan dan Strategi Mengatasinya Dalam Bhineka Tunggal Ika kelas XI SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019.

Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Pair Share (TPS)*, *Intelektual Skill*

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) telah di tanamkan di sekolah dasar sejak sampai perguruan tinggi. Seluruh sekolah di Indonesia wajib mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kepada siswa siswinya. Udin S. Winataputra dalam (2014:26)mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraa mencangkup tiga komponen, yakni Kknowledge (Pengetahuan kewarganegaraan), Civic Skill Ketrampilan), dan Civic Dispotition (Sikap). Ketiga aspek tersebut tentu saja dibutuhkan untuk membentuk warga Negara yang cerdas dan baik (the smart and good citizenship). Namun, yang terjadi di lapangan, sekolah terutama guru cenderung lebih menekankan hanya pada aspek pengetahuan kewarganegaraannya saja (civic knowledge). Berdasarkan penelitian terdahulu dilakukan oleh Santoso, Almuchtar, dan Abdulkarim dalam Arif Prasetyo (2017:197)menunjukkan kelemahan mata pelajaran PPKn di Indonesia ada pada sisi pengajaran yang bersifat monoton tidak inovatif (overload and overlapping content) dan lebih menitik beratkan hanya pada kognitif, sedangkan afektif psikomotorik ditiadakan serta tidak dimasukan pada ujian nasional. Siswa hanya terfokus pada materi yang ada di dalam buku paket dan sekedar menghafal tanpa memahami secara mendalam. Hal tersebut membuat dua aspek lainnya yaitu civic disposition dan civic skill kurang terserap oleh siswa. Dalam kehidupan sehariharipun yang akan sering digunakan implementasi merupakan dari pendidikan kewarganegaraan seperti bagaimana karakter siswa tersebut dalam lingkungannya dan bagaimana

cara mengatasi masalah-masalah public yang terjadi dan lain sebagainya.

Dari ketiga aspek pendidikan kewarganegaraan, vang dirasakan kurang dalam pelaksaannya di sekolah salah satunya adalah civic skill atau ketrampilan kewarganegaraan. Civic skill sendiri memiliki definisi sebagai ketrampilan warga Negara dimana setalah siswa mendapatkan kemampuan kewarganegaraan, siswa dapat memliki ketrampilan berpartisipasi dalam pemerintahan serta memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah terkait kewarganegaraan. Civic skill dapat dibedakan menjadi dua yaitu ketrampilan berpartisipasi (participation skill) dan ketrampilan intelektual (intellectual skill). Kemampuan intelektual skill warga negara adalah kemampuan berpikir kritis.

Kemampuan berpikir kritis menurut Deswani (2009:119) adalah proses mental untuk menganalisis atau informasi, mengevaluasi dimana informasi tersebut didapatkan dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi. Dengan kata dapat lain seseorang dikatakan memilki kemampuan berpikir kritis memikirkan secara apabila mau mendetail, terperinci dan benar-benar masuk ke dalam terhadap masalahmasalah yang ada disekelilingnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat kesimpulan diambil bahwa kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan kewarganegaraan atau sering kita sebut yang dengan kemampuan *intelektual skill* yang merupakan bagian dalam civic skill adalah kemampuan atau ketrampilan siswa dalam mengamati,

mendeskripsikan, menganalisis dan memaparkan mengenai masalahmasalah public dan diharapkan dapat mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah publik yang terjadi di sekelilingnya. Salah satu masalah-masalah publik tersebut adalah ancaman ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam materi semester 2 Sekolah Menegah Atas kelas XI. Ancaman-ancaman tersebut tentu saja dapat mengganggu kestabilan integrasi nasional. Menurut Saafroedin Bahar (1997)dalam Winarno (2013:23)menyatakan bahwa "integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan dengan pemerintah dan wilayahnya." Kemampuan berpikir kritis siswa di lapangan sendiri ternyata masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian seperti yang dilakukan oleh Nuryanti (2018:155-158). Hasilnya rata-rata kemampuan berpikir siswa SMP masih tergolong rendah yaitu hanya sekitar 40,46 %. Penelitian lain dilakukan oleh Fuad (2015:807-815) hasilnya kemampuan berpikir kritis siswa di Kediri masih rendah yaitu 21.89%. Selain itu. berdasarkan wawancara dengan bapak Sutarno selaku guru kelas XI di SMA N 1 Sukoharjo, kemampuan berpikir kritis di sekolah tersebut juga tergolong masih rendah.

Salah satu menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa terletak pada model pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut. Wina Sanjaya (2007:224)mengemukakan bahwa salah satu kelemahan proses pembelajaran yang dilaksanakan para guru adalah kurang adanya usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa. Berdasarkan hasil pengamatan

dan wawancara awal yang dilakukan, model pembelajaran yang dilakukan oleh guru ternyata kurang menarik dan meningkatkan tidak kemampuan berpikir kritis semua secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan sebuah metode pembelajaran dimana model tersebut meningkatkan dapat kemampuan berpikir kritis siswa secara maksimal masing-masing individunva. pada Salah satu metode penelitian tersebut Pair Think Share yang memperkenalkan gagasan tentang waktu tunggu dan berpikir pada interaksi elemen pembelajaran kooperatif yang ampuh dalam meningkatkan respons siswa terhadap pertanyaan (Miftahul Huda 2013:206). Hasil penelitian lain yang menunjukkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan intellectual skill siswa adalah yang dilakukan oleh Suriani dengan judul "Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share terhadap Kemampuan Berfikir Kritis dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X MA Madani Alauddin

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share terhadap Intelektual Skill Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Sukoharjo. penelitian ini diharapkan Hasil bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis secara ini diharapkan dapat penelitian memberikan sumbangan bagi ilmu perkembangan pengetahuan khususnya bagi masyarakat pada umumnya mengenai Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share terhadap Intelektual Skill Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran PPKn dan menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan memberi informasi tentang pentingnya kemampuan berpikir kritis pada diri siswa sehingga siswa tersebut dapat mendeskripsikan memahami dan masalah masalah public terkait kasus ancaman militer dan non militer serta bagaimana memberikan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode True Experimental Design. Dalam metode ini terdapat kelompok eksperimen dan kelompok control dengan pemilihan anggota dilakukan secara acak. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sukoharjo yang beralamat di Jl. Pemuda No.38 Jetis Sukoharjo Jawa Tengah 57512 yang berdiri diatas tanah seluas 400 m2, dengan Nomor Telepon (0271) 593085 dan alamat web

www.sman1sukoharjo.sch.id.

Penelitian ini mengambil sampel sebesar 20% dari populasi siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Dengan demikian peneliti hanyamengambil sampel sebanyak 68 siswa yang berasal dari kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen dan XI IPA 4 sebagai kelas control.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Teknik Cluster Random Sampling dipilih karena peneliti menganggap kemampuan semua subjek di dalam populasi sama atau homogeny serta peneliti ingin memilih sampel secara random bukan individu tetapi kelompok-kelompok pengambilan (kelas). Jenis

menggunakan random samping ini di katakan lebih sederhana karena pengambilan sampel ini di ambil dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Peneliti juga membei hak yang sama kepasa setiap anggota populasi untuk memperoleh kesempatan menjadi sampel. Sedangkan teknik penyusunan instrumen untuk memperoleh data adalah dengan lembar observasi untuk variabel model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share dan tes untuk variabel intelektual skill sebagai civic skills kelas XI di SMA 2 Karanganyar. Instrumen penelitian yang dipakai dalam melaksanakan penelitian wajib memenuhi standar validasi dan reliable sehingga perlu dilakukan uji validitas dan reliabelitas.

Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel dependen independen bila nilai variabel dinaikkan atau diturunkan nilainya (Sugiyono, 2015: 215). Sebelum dilakukanya analisis data terlebih dahulu dilaksanakan uji prasyarat analisis yakni terlebih dahulu di uji independen, dan uii linieritas. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dalam hal ini supaya lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Teknik analisis regresi memiliki tugas pokok diantaranya adalah: menghitung harga dari persamaan regresi linier, menghitung koefisien korelasi antara x dan y, dan menghitung besaran sumbangan determinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian meliputi dua variabel, yaitu model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share dan intelektual skill sebagai *civic* skilll. Data yang terkumpul dari dua variabel tersebut bersal dari lembar observasi dan tes yang di isi oleh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019 sebagai populasi penelitian ini. Hasil perhitungan data model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share diperoleh skor terendah 86,67 dan skor tertinggi perhitungan 88,67. Hasil intelektual skill siswa kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen diperoleh skor tertinggi 97 dan skor terendah Dengan rata-rata (X) Simpangan Baku (S) sebesar 4,31, Median 90,6, Modus 94. Sedangkan Rentang (R) adalah 16, Banyaknya kelas (P) 6,049 dibulatkan menjadi 6 dan panjang kelas 2,67 dibulatkan menjadi Sedangkan 3. perhitungan data intelektual skill siswa kelas XI IPA 4 sebagai kelas kontrol diperoleh skor tertinggi 94 dan skor terendah 78. Dengan ratarata (X) 86, Simpangan Baku (S) sebesar 4,49, Median 87,5, Modus 88. Sedangkan Rentang (R) adalah 16, Banyaknya kelas (P) 6,049 dibulatkan menjadi 6 dan panjang kelas 2,67 dibulatkan menjadi 3.

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Hasil uji independen antara data model pembelajaran *Kooperatif tipe Think Pair Share* dan *intelektual skill* siswa sebagai *Civic Skills* diperoleh *F*_{hitung} sebesar 6,85 dan telah dikonsultasikan dengan *F*_{tabel} dengan db pembilang 1 dan db penyebut 32 pada taraf signifikansi 5% diperoleh *F*_{tabel} sebesar 4,15. Sehingga dapat diketahui

bahwa $F_{hitung} = 6,85$ lebih besar dari $F_{tabel} = 4,15$ atau 6,85 > 3,98 maka Ho ditolak, Y tidak independen terhadap X. Karena itu X dapat memprediksi Y.

b) Hasil uji linieritas antara data pembelajaran model Kooperatif tipe Think Pair Share dan intelektual skill siswa sebagai Civic Skills diperoleh F_{hitung} sebesar 0.678 dan telah dikonsultasikan dengan Ftabel dengan db pembilang 4 dan db penyebut 28 pada taraf signifikansi 5% diperoleh Ftabel sebesar 2,71. Sehingga dapat diketahui bahwa Fhitung = 0.678 lebih kecil dari F_{tabel} = atau 0.678 < 2.71 maka H_o diterima. Jadi antara model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share (X) dan intelektual skill siswa (Y) adalah linier.

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis dalampenelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut :

> a) Hasil perhitungan persamaan regresi tersebut diperoleh $\hat{Y} =$ 56,157+0,4030X. Selanjutnya perhitungan hasil dari persamaan regresi linier tersebut dapat diimpretasikan meyatakan bahwa Y intelektual skill siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sukoharjo, X menyatakan model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share. Artinya intelektual skill siswa kelas XI SMA N 1 Sukoharjo akan tetap dan konsisten apabila tidak ada peningkatan motivasi sebesar 56,157 dan setiap ada kenaikan

- satuan menyatakan *intelektual* skill siswa kelas XI SMA N 1 Sukoharjo akan didikuti dengan kenaikan model pembelajaran *Kooperatif tipe* Think Pair Share sebesar 0, 4030 satuan.
- b) Perhitungan koefisien korelasi sederhana dengan menggunakan rumus Product Moment diperoleh rxy= 0.41. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai r_{tabel} dengan nilai N = 34 dan taraf signifikansi 5% sebesar 0,339. Karena $r_{hitung} > r_{tabel} = 0.41 >$ 0.339 . maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi hubungan positif yang kuat antara model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share (X) dan intelektual skill siswa kelas XI SMA N 1 Sukoharjo (Y)
- c) Kemudian hasil perhitungan besaran sumbangan pengaruh pembelajaran model Kooperatif tipe Think Pair Share terhadap intelektual skill siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sukoharjo yaitu sebesar 17,55%, artinva bahwa 17,55 % intelektual skill siswa di SMA N 1 Karanganyar dipengaruhi oleh model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair sedangkan sisanya Share sebesar 82,45% dipengatuhi oleh faktor lain vaitu faktor eksternal dan internal. Faktor meliputi eksternal desain kurikulum dan aktivitas pembelajaran, sedangkan faktor internal meliputi rasa ingin tahu, percaya diri siswa, ketekunan, gender, motivasi.

Jadi pengaruh model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share terhadap intelektual skill siswa di SMA Negeri 1 Sukoharjo, hipotesisnya berbunyi, "Ada Pengaruh Antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Terhadap Intelektual Skill Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019" dinyatakan diterima. Hal disebabkan karena $r_{hitung} > r_{tab}$ yaitu 0.41 > 0.339. Adapun besaran sumbangan pengaruh variabel X terhadap Y dapat diketahui sebesar 17,55 %. Artinya bahwa 17,55 % intelektual skill siswa di SMA N 1 Karanganyar dipengaruhi oleh model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share sedangkan sisanya sebesar 82,45% dipengatuhi oleh faktor lain yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi desain kurikulum dan aktivitas pembelajaran, sedangkan faktor internal meliputi rasa ingin tahu, percaya diri siswa, ketekunan, gender, motivasi.

Hasil penelitian mengenai penerapan model Kooperatif tipe Think Pair Share yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa diperkuat dengan dari Branson (1999:4) pendapat dalam artikel ilmiah Elly (2013) yang menyatakan bahwa ada komponen penting yang harus dicapai oleh siswa dalam Pendidikan Kewarganegaraan, Civic yaitu Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), Civic Skills (keterampilan kewarganegaraan), dan

Civic Disposition (watak-watak kewarganegaraan). Komponen *Civic* Skills meliputi keterampilan intelektual (intelectual skills) dan berpartisipasi keterampilan (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan intelektual terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. Ketrampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan/ mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik.

Berdasarkan pendapat dikemukakan Branson tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada kompetensi dasar menampilkan peran serta dalam sistem polit di Indonesia. Penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Think Share memiliki pengaruh Pair terhadap keterampilan berpikir kritis siswa sebesar 17,55%, terdapat 82,45% yang dipengaruhi oleh faktor lain dari. Adapun penjelasan dari faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor pendukung yang berasal dari luar diri siswa. Faktor eksternal ini meliputi desain kurikulum, dan aktivitas pembelajaran (Carol Anne Purvis, 2009). Adapun penjelasan dari faktor tersebut sebagai berikut:

a) Desain Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 13 Revisi (K-13 Revisi). Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud Tentang Kurikulum 2013 Revisi Tahun 2016 vang terdiri dari Permendikbud No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi, Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. Berdasarkan uraian diatas. SMA Negeri 1 Sukoharjo juga telah menggunakan Kurikulum 2013 Revisi dimana desain kurikulum yang semula terdiri dari 5M vaitu Mencoba, Mengamati, Menanya, Menalar, dan Mengkomunikasikan diganti menjadi 4C yaitu Collaborative, Creativity, Critical Thinking, dan Communication

b) Aktivitas pembelajaran

Aktivitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Sukoharjo tergolong aktif karena telah menggunakan pendekatan *student centered approach* dimana pembelajaran beorientasi atau berpusat pada siswa.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri siswa. Faktor- faktor tersebut meliputi rasa ingin tahu, percaya diri siswa, ketekunan, gender, usia dan motivasi (Carol Anne Purvis, 2009). Adapun penjelasan dari faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

a) Rasa ingin tahu

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat penelitian, rasa ingin tahu siswa di SMA Negeri 1 Sukoharjo tergolong tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya indikator rasa ingin tahu saat proses kegiatan belajar mengajar. Indikator tersebut berupa Siswa mampu merespon secara positif terhadap unsur yang baru

lingkungan mereka dengan cara mendekati, memeriksa dan memperhatikannya, Mengamati lingkungan untuk mencari pengalaman baru, penuh perhatian terhadap rangsangan yang ada

b) Percaya diri siswa

Rasa percaya diri siswa SMA Negeri 1 Sukoharjo masih belum cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan pengamatan dan wawancara awal kepada guru yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat beberapa kelas yang siswanya pasif saat kegiatan belajar mengajar, misalnya siswa belum percaya diri menyampaikan pendapat dan memberikan pertanyaan di depan kelas. Guru harus memakan waktu cukup lama agar siswa dapat bertanya dan menyampaikan pendapat berdasarkan inisiatif siswa sendiri.

c) Ketekunan

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, ketekunan belajar siswa di SMA Negeri 1 Sukoharjo tergolong tinggi. Siswa memiliki upaya yang berkesinambungan untuk dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu siswa juga memiliki keuletan yang tinggi dalam mencari tahu materimateri terkait yang tidak tercantum dalam buku paket siswa.

d) Gender

Penelitian oleh Facione (1990b) dalam Caroll menyatakan hasil posttest mengenai keterampilan berpikir kritis siswa laki-laki lebih daripada besar perempuan. Berdasarkan data dari Kemendikbud, jumlah pelajar laki laki pada tingkat SMA sebanyak 1,97 juta sedangkan perempuan sebanyak 2,44 juta. Di SMA Negeri 1 Sukoharjo sendiri jumlah siswa laki-laki sebanyak 418 sedangkan perempuan 851, dimana

jumlah laki laki kelas XI sebanyak 133, perempuan sebanyak 288.

e) Usia

Rata-rata usiasiswa SMA di Indonesia adalah sekitar 15-18 tahun. Berdasarkan ketentuan dan syarat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SD, SMP dan SMA tahun 2015/2016 bahwa usia maksimal masuk SMA ialah 21 tahun. Di SMA negeri 1 Sukoharjo, usia pelajar kelas XI rata-rata 17 tahun dengan tahun kelahiran yaitu tahun 2002.

f) Motivasi

Indikator motivasi belajar siswa antara lain tekun menghadapi tugas, menghadapi kesulitan. ulet minat menunjukkan terhadap masalah, dan dapat mempertahankan pendapat. Rata-rata siswa SMA Negeri 1 Sukoharjo telah memenuhi indikator-indikator diatas, sehingga motivasi belajar siswa tergong tinggi. tersebut didapatkan Hal dalam observasi yang dilakukan penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data mengenai pengaruh model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share terhadap intelektual skill, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share terhadap keterampilan skill intelektual siswa kompetensi dasar Mengidentifikasi Faktor Pendorong Dan Penghambat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kelas XI SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019. didasarkan pada hasil Hal ini perhitungan dari hasil penelitian antara variabel X dengan variabel Y menunjukkan vang korelasi.

ditunjukkan dengan didapatkannya nilai r_{xy} = 0,41 yang kemudian diintepretasikan r_{tabel} dengan N=34 dan taraf signifikansi 5% diperoleh $r_{tabel} = 0.339$, sehingga $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu 0.41 > 0.359 yang berarti H_0 ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Maka dapat dinyatakan bahwa penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share terhadap keterampilan intelektual skill siswa kompetensi dasar Mengidentifikasi Faktor Pendorong Dan Penghambat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kelas XI SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019. Adapun untuk besaran sumbangan diperoleh besaran sumbangan sebesar 17,55%. Artinya 17.55% keterampilan berpikir kritis siswa pada kompetensi dasar Mengidentifikasi Faktor Pendorong Dan Penghambat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Think Share sedangkan 82,45% intelektual skill siswa dipengaruhi faktor lain yang terdiri dari faktor dan internal. eksternal eksternal meliputi desain kurikulum aktivitas pembelajaran, sedangkan faktor internal meliputi rasa ingin tahu, percaya diri siswa, ketekunan, gender, motivasi. garis Persamaan regresi linear diperoleh persamaan $\hat{Y} = a + bX$ yaitu \hat{Y} = 56,157 + 0,4030 X yang memiliki arti bahwa setiap kenaikan satu satuan model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share (X) akan diikuti kenaikan intelektual skill siswa (Y) sebesar kemiringan gradient garis regresi sebesar 0,4030

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Siswa

Siswa hendaknya lebih meningkatkan minat belajar, motivasi dan berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai vakni salah satunya meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Selain itu siswa hendaknya memiliki berbagai kecakapan, tidak hanva pengetahuan saja namun sikap dan keterampilan juga harus dimiliki sebagaimana yang diharapkan dalam pelajaran Pkn yakni membentuk untuk menjadi warga negara yang baik.

2. Bagi Guru

Guru hendaknya memaksimalkan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas serta materi yang diajarkan. Dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat mampu menarik siswa menjadi aktif dan membuat susasana pembelajaran lebih menyenangkan, selain siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

3. Bagi Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian di atas lingkungan sekolah memiliki dampat terhadap perkembangan siswa. Sehingga pihak sekolah perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung proses belajar mengajar agar tercipta suasana menyenangkan dalam proses pembelajaran dan siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu sekolah juga perlu untuk memberikan evaluasi terhadap setiap guru dalam proses pembelajaran memberikan pemahaman pada guru untuk lebih kreatif dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas.

4. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti supaya melakukan penelitian yang dapat diprediksi mempengaruhi keterampilan berpikir kritis siswa dengan memperhatikan faktor lain seperti faktor eksternal yaitu desain kurikulum, aktivitas pembelajaran, dan faktor seperti internal motivasi, percaya diri, usia, gender, dan rasa ingin tahu. Karena dalam ini penelitian diperoleh sumbangan sebesar 17,55%, selebihnya terdapat 82,45% dipengaruhi oleh faktor lain tersebut. Sehingga dapat dieroleh hasil yang bermanfaat untuk meningkatkan intelektual skill siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Branson, S. M. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS.
- Deswani. (2009). Proses

 Keperawatan dan Berpikir

 Kritis. Jakarta: Salemba

 Medika.

- Fuad, N. M. (2015). Profil Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa Serta Strategi Pembelajaran yang Diterapkan Guru SMP di Kabupaten Kediri . *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, 807-815.
- Huda, M. (2012). *Cooperative Learning*. Yogyakarta:
 Pustaka Pelajar.
- Nuryanti, L. (2018). Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP. *Jurnal Pendidikan*, 157.
- Purvis, C. A. (2007). A Guide to Qualitative Field Research. London: Sage Publication.
- Sanjaya, W. (2007). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses. Jakarta: Kencana Prenada Media Grou.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RnD. Bandung: Alfabeta.
- Suriani. (2018). Pengaruh penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share (TPS) Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X MA Madani Alauddin. Jurnal Alauddin, xiv.
- Wibowo, A. P. (Oktober 2017).
 Pendidikan
 Kewarganegaraan: Usaha
 Konkret Untuk Memperkuat
 Multikulturalisme di
 Indonesia . *Jurnal Civics*Volume 14 Nomor 2, 197.
- Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

STRATEGI FKPM (FORUM KEMITRAAN POLRI DAN MASYARAKAT) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)

Yusnandia Herayu Nurhafida, Moh. Muchtarom, Dewi Gunawati Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta Email: yusnandiaherayu@gmail.com

Abstract

The aims of this thesis are to understand about : 1) The reason of FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) establishment in Kadipiro Sub-district; 2) The FKPM's (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) obstacles to improve society legal awareness; 3) FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) implementation strategies to improve society legal awareness. This research uses qualitative research method. This research is descriptive case study research. The data were collected from various resources such as informan, places, events, and documents. This researcher used purposive sampling as its sampling method. In conducting this research, the researcher used interview, observation, and document analysis as its data collecting method. This research used triangulation as its data validation method and observation. This analysis method used interactive analysis model consists of these steps: (1) data collecting; (2) data reduction; (3) data display; (4) conclusion making. Therefore, the research procedure consists of : (1) preparatory step; (2) data collecting step; (3) data analysis step; (4) research report making step. Based on the result of this research, it shows that: 1) Passing through events conducted by FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) can improve its surrounding safety and order and also society legal awareness. 2) In their activities FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) experienced 6 obstacles they are: (1) Limited legal knowledge held by FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat); (2) The undistributed members of FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) with mediation skill; (3) The activity schedule was not arranged well; (4) The limited number of supporting facilities for FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) activities; (5) Limited material and non materials support from the government; (6) The society legal awareness is still low. 3) FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) implementation strategies to improve society legal awareness were conducted through preventive measures such as : (1) FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) integrations to the society; (2) Substitute apparatus for prevention and environmental security; (3) Engaging the society to detect threat for society safety and order early; and through repressive efforts is that becoming mediator when there was a dispute in the society.

Keyword: FKPM, legal awareness, society, strategy, Kadipiro Sub-district

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman negara, segala hal mengenai hak dan kewajiban dari warga negara telah diatur didalamnya. Hak yang dimiliki oleh warga negara semestinya dijamin oleh pemerintah termasuk hak atas rasa aman yang merupakan wujud pemenuhan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pemerintah membentuk struktur kelembagaan yang berfungsi memenuhi hak tersebut yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.

Polri sendiri dapat dikatakan ujung tombak sebagai pada penyelenggaraan perlindungan masyarakat, sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ialah "salah satu aparatur penegak bertugas hukum yang untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada terbinanya masyarakat serta ketentraman masyarakat dengan menjunjung Hak Asasi Manusia". Dari uraian pasal diatas cukup menjelaskan bahwa masyarakat dan kepolisian memiliki keterikatan hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Disetiap pemerintahan, era Polri tidak luput mengalami kendala yang harus ditemukan keluarnya. Di era Orde Baru, institusi Polri berada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatu dengan Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI) sehingga berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan" (Noor M Aziz, 2011) yang berdampak pada timbulnya jarak diantara kepolisian dan masyarakat, hingga pada 1 Juli 2000 terjadi revitalisasi Polri menjadi institusi independen. Memasuki era Reformasi, kendala yang dihadapi Polri adalah terjadi ketimpangan ratio iumlah kepolisi diantara

bertugas dengan masyarakat yang diamankan (kompas.com, diakses 17 Juli 2017) sehingga polisi lebih lamban mengidentifikasi potensi kekacauan kamtibmas (keamanan dan ketertiban) yang ada di masyarakat serta kewalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang merata terjadi di masyarakat.

Kepolisian sendiri merupakan institusi yang rentan mengalami perubahan menyesuaikan kondisi masyarakat yang dilayaninya, hal tersebut senada dengan kutipan dari Satjipto Rahardjo (2002:39) yaitu "polisi itu adalah lembaga yang selalu berubah, mengubah dan membangun dirinya". Dengan itu muncul suatu konsep yang dikemas ke dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, suatu konsep yang mengikutsertakan sebagai masyarakat mitra Kepolisian melalui pembentukan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) yang bertugas menjaga kamtibmas (keamanan ketertiban) di sekitar mereka serta dapat ikut andil dalam pemecahan sosial yang ada di masyarakat.

Partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjadi bagian dari FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) merupakan bentuk tanggung jawab warga negara kepada negara dalam hal keamanan dan ketertiban. Hal tersebut merupakan implementasi kewajiban dari warga negara yang tercantum pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Keterlibatan aktif masyarakat Kadipiro pada FKPM (Forum Kemitraan Polri

Masyarakat) nyatanya membawa perubahan dibidang keamanan dan ketertiban. Selain wilayah Kadipiro lebih kondusif, permasalahan tindak pidana ringan ataupun konflik diantar masyarakat dapat dselesaikan ditingkat FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat). Tercatat pada dokumen Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjelaskan bahwa selama 6 tahun terakhir tingkat permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kadipiro masih fluktuatif. Menurut data pada tahun 2012 – 2014 tercatat bahwa FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) mampu menekan laporan permasalahan disetiap tahunnya dari 26 laporan menjadi 18 laporan, tetapi pada tahun 2015 terjadi kenaikan sejumlah 6 laporan permasalahan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 24 laporan, sedangkan pada tahun 2016 tidak terdapat laporan permsalahan dan terakhir pada tahun 2017 tercatat terdapat 12 permasalahan terlapor. Hal tersebut disebabkan penanaman kesadaran hukum yang tidak dapat ditanamkan secara instan kepada masyarakat namun dilakukan bertahap, berkala secara dilakukan secara intens.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dibentuk FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) di Kelurahan Kadipiro, hambatan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) meningkatkan dalam kesadaran hukum masyarakat, serta strategi diimplementasikan **FKPM** yang (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) sebagai mitra Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk beberapa kalangan baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khasanah teori atau keilmuan yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat). Secara praktis saran ditujukan kepada Negara Republik Kepolisian Indonesia (Polri) sebagai masukan kepada Bhabinkamtibmas **Polmas** (pengemban desa/kelurahan) untuk terus menggali potensi, mengarahkan, membimbing memberdayakan dan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, selanjutnya sebagai masukan untuk **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) agar meningkatkan kualitas kinerja FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) sesuai dengan arahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti memilih FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) yang berbasis di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, hal tersebut didasari oleh rasa peneliti keingintahuan mengenai seluk beluk FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) Kelurahan Kadipiro dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro.

Peneliti berusaha menyajikan data deskriptif studi kasus berupa keterangan atau tanggapan informan, observasi lapangan dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan objek, dalam hal ini peneliti menekankan pada strategi yang dimiliki oleh **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro.

Herdiansyah (2010:116)menjelaskan bahwa "data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasi sesuatu". Peneliti memperoleh data bersumber dari informan yaitu **Bhabinkamtibmas** Kelurahan Kadipiro, Ketua dan Sekretaris FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) Ngipang serta warga Ngipang Kelurahan Kadipiro. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dimiliki oleh FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat). Dokumen yang dianalisis adalah dokumen yang berisi kegiatan-kegiatan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling *purposive* sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti mengadopsi 2 (dua) macam triangulasi yaitu triangulasi data (data triangulation) dan triangulasi dalam hal observer (observer triangulation). Untuk mendapatkan kesahihan data, peneliti harus menghimpun data dari beberapa metode yaitu wawancara dengan informan, melakukan observasi serta studi dokumen. Selain

itu peneliti juga harus mengeksplorasi informasi dari beberapa informan, langkah itu ditempuh untuk mendapatkan kesepakatan intersubjektif dari beberapa *observer*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Alasan dibentuk FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) di Kelurahan Kadipiro

Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator yang diperlukan untuk mencapai keamanan dan ketertiban pada lingkungan dan masyarakat. Sebab ketika kesadaran hukum warga masyarakat rendah maka akan rentan terhadap timbulnya permasalahan vang danat mengganggu keamanan dan ketertiban. Setelah melakukan kegiatan penelitian seperti wawancara, observasi dan studi dokumen di Ngipang Kelurahan Kadipiro, peneliti menilai bahwa wilayah tersebut merupakan lingkungan yang kurang ideal untuk dikatakan sebagai lingkungan yang aman, sebab di wilayah tersebut sering terjadi permasalahan seperti marak adanya pesta miras vang disebabkan oleh kemudahan akses mendapatkan miras tersebut permasalahan serta sosial masyarakat lainnya seperti adanya KDRT, masalah perselingkuhan, perkelahian dan pencurian. Padahal masyarakat disekitarnya memiliki hak dan kebutuhan untuk tinggal di dalam kondisi yang aman, damai, tetib dan tentram.

Untuk dapat mencapai kondisi demikian Kepolisian tidak mampu bekerja secara

sehingga memerlukan dukungan dari masyarakat salah satunya dengan membentuk komunitas **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman hukum masyarakat setempat yang nantinya akan berpengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban.

Keberadaan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) wujud dari good merupakan citizenship. yang mana dapat melalui tercermin individu sebagai warga negara memiliki engagement. civic Civic dijelaskan oleh engagement Erlich (Rusnaini, 2018:43) sebagai berikut:

> Civic engagement means working to make difference in the civic life of communities our developing the combination of knowledge, skills, values and motivation it make that difference. It means promoting the quality of life in community, through both political and non political process

- 2. Hambatan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dalam peningkatan pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro
 - a. Hambatan yang bersumber dari internal
 - Terbatasnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh pengurus dan anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) yaitu tidak ada satu pun dari pengurus maupun

- anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) **Ngipang** Kelurahan Kadipiro yang berlatar belakang pendidikan hukum sehingga seringkali menjadi hambatan saat akan menyampaikan kepada penyuluhan masyarakat bekenaan dengan hukum.
- 2) Tidak meratanya keterampilan mediasi pada pengurus dan anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) vaitu keterampilan sebagai mediator merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan oleh FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) untuk dapat mendamaikan serta mencapai kata sepakat pada pihak yang bertikai. Namun sayangnya tidak semua memiliki kemampuan tersebut. sehingga ujung tombak sebagai mediator adalah pengurus inti **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) saja.
- 3) Benturan jadwal kegiatan kegiatan FKPM vaitu (Forum Kemitraan Polri Masyarakat) merupakan kegiatan sosial murni sehingga seluruh pengurus maupun anggota mendapatkan tidak imbalan jasa atau gaji. Oleh karena itu tidak ada keterpaksaan seluruh pengurus dan anggota diwajibkan hadir disetiap

- FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) melakukan kegiatan, terlebih anggota memiliki pekerjaan utama sehingga pengurus membagi tugas secara fleksibel sesuai jumlah anggota yang dapat hadir.
- 4) Minimnya sarana dan pendukung prasarana kegiatan FKPM (Forum Kemitraan Polri Masyarakat) vaitu Kepolisian dan Pemerintah memang tidak memiliki anggaran khusus disiapkan untuk yang pemenuhan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan dari FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat).
- b. Hambatan yang bersumber dari eksternal
 - 1) Minimnya dukungan material dan non material dari Pemerintah Kepolisian untuk anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) pemenuhan yaitu dukungan material berupa dukungan dana dan non material berupa penyuluhan hukum dari Kepolisian dan Pemerintah merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh **FKPM** (Forum Polri Kemitraan dan Masyarakat), namun ketidak adanya dukungan tersebut tidak menyurutkan **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) untuk membawa perubahan

- kondisi lingkungan dan pemahaman kesadaran hukum masyarakat Ngipang ke arah yang lebih baik.
- 2) Kondisi kesadaran hukum masyarakat **Ngipang** cenderung rendah yaitu wilayah **Ngipang** Kelurahan **Kadipiro** merupakan lingkungan yang tidak ideal untuk dikatakan sebagai lingkungan aman karena kesadaran hukum masyarakatnya masih cenderung rendah. Hal tersebut terlihat masih terdapat berbagai permasalahan seperti maraknya pesta miras di pinggir jalan, adanya KDRT. masalah perselingkuhan, perkelahian dan pencurian.
- 3. Strategi yang diimplementasikan oleh FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) sebagai mitra Kepolisian dalam peningkatan pemahaman kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro

Setian organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, sama halnya dengan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) yang memiliki tujuan mulia untuk membawa perubahan sosial masyarakat seperti menciptakan lingkungan yang aman, damai, tertib dan tentram bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya maupun peningkatan pemahaman hukum yang dimiliki oleh masyarakat.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui penetapan strategi.

Strategi yang dimiliki oleh FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) **Ngipang** Kelurahan disesuaikan oleh tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan hidup bermasayarakat pada lingkungan yang aman dan tentram, hal tersebut lumrah terjadi sebab FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat di wilayah FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) bertugas. Strategi vang diimplentasikan oleh FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dalam peningkatan pemahaman kesadaran hukum masyarakat Ngipang Kelurahan Kadipiro dibagi kedalam 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut:

a. Upaya preventif

1) FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) melebur menyatu dengan masyarakat setempat yaitu **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menghancurkan stigma buruk bahwa **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) merupakan spionase Kepolisian vang hanya membawa permasalahan.

- 2) Menertibkan keamanan dan ketertiban saat ada hajatan yaitu saat terdapat acara dari pemerintah atau hajatan dari warga di lingkungan setempat, kehadiran **FKPM** (Forum kemitraan Polri dan Masyarakat) dibutuhkan untuk deteksi dini adanya dari potensi ancaman kamtibmas.
- 3) Melibatkan warga masyarakat setempat untuk deteksi dini potensi kekacauan kamtibmas lingkungan RT dan RW yaitu FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) memberdayakan masyarakat setempat untuk lebih peka dan tanggap melaporkan untuk kepada **FKPM** (Forum Kemitraan Polri Masyarakat) saat terdapat potensi gangguan kamtibmas, sehingga hal tersebut dapat diselesaikan sebelum permasalahan muncul ke permukaan.

- b. Upaya represif
 - Menjadi mediator terjadi saat permasalahan di lingkungan masyarakat yaitu upaya yang dilakukan oleh **FKPM** (Forum Kemitraan Polri Masyarakat) dan saat terjadi masalah adalah menjadi mediator bagi kedua belah pihak yang bertikai untuk mencari solusi bersama. Selain itu **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) memberi dapat pelajaran hukum kepada kedua belah pihak bahwa tidak segala permsalahan diselesaikan dengan jalan kekerasan.

Berbagai upaya baik preventif maupun represif yang dilakukan oleh FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) menggambarkan bahwa komunitas tersebut memang hadir memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat atas rasa aman dan damai. Hal tersebut senada dengan tingkatan strategi enterprise strategy yang dikemukakan oleh Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985)(Salusu, 2003:101-104) sebagai berikut ini:

> Enterprise strategy berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap

organisasi memiliki jalinan hubungan dengan masyarakat mana yang memiliki interes dan tuntutan yang sangat bervariasi terhadap sehingga organisasi, hal tersebut menjadi perhatian para penyusun strategi. Dengan kata lain, enterprise strategy menampakkan bahwa organisasi sungguhsungguh bekerja berusaha memberi baik pelayanan yang terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

 Alasan dibentuk FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) di Kelurahan Kadipiro

FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) merupakan perwujudan dari civic untuk engagement membawa peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Melalui arahan tugas yang telah ditetapkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, FKPM (Forum Kemitraan Polri Masyarakat) mampu menekan permasalahan yang timbul di masyarakat sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman dan tertib, lebih jauh dari itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat berkenaan dengan hukum.

 Peningkatan pemahaman kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro oleh FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) memiliki hambatanhambatan antara lain :

- Hambatan yang bersumber dari internal
 - Terbatasnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh pengurus dan anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat)
 - 2) Tidak meratanya keterampilan mediasi pada pengurus dan anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat)
 - 3) Benturan antara waktu dimiliki oleh yang anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dengan kegiatan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dalam menjaga kamtibmas
 - 4) Minimnya sarana dan prasana pendukung kegiatan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat)
- b. Hambatan yang bersumber dari eksternal
 - Minimnya dukungan material dan non material dari Pemerintah atau Kepolisian untuk anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat)
 - Kondisi kesadaran hukum masyarakat Ngipang cenderung rendah
- 3) Strategi yang diimplementasikan oleh FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) sebagai mitra Kepolisian dalam peningkatan pemahaman kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro

FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) memiliki berbagai strategi yang diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat berkenaan dengan hukum sebagai berikut :

- a. Upaya preventif
 - 1) FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempermudah **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan kamtibmas
 - 2) Keberadaan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) saat terdapat acara di wilayah setempat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung.
 - 3) FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) membangun kepekaan dan kepedulian sesama pada masayarakat untuk bersama-sama melakukan deteksi dini atas ancaman kabtimas yang timbul di lingkungan.
- b. Upaya represif
 - 1) Proses memediasi pihak yang berselisih paham dilakukan oleh FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) untuk mencari jalan tengah serta mengembalikan keadaan sebelum dimana permasalah tersebut

terjadi, selain itu proses tersebut ditempuh untuk peningkatan pemahaman kesadaran hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

> Pemerintah Kota Surakarta disarankan untuk lebih serius melihat potensipotensi yang dimiliki oleh komunitas yang hidup di Kota Surakarta. Dukungan Pemerintah Kota Surakarta berupa dana serta pemberdayaan anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dalam merancang kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah proposal, pengelolaan dana serta pertanggung jawaban dana diperlukan untuk pengembangan komunitas FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat).

b. Bagi Kepolisian Resor Kota Surakarta

> Dukungan non material dari Kepolisian Resor Kota Surakarta berupa penyuluhan pembinaan hukum dan keterampilan peningkatan **FKPM** komunitas (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dalam menjaga kamtibmas diperlukan untuk meningkatkan kualitas para anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat).

 Bagi seluruh pengurus dan anggota FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) Ngipang Kelurahan Kadipiro

Masyarakat yang telah dalam tergabung **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) disarankan untuk terus menggali potensi diri belajar dan terus untuk mengembangkan aspek pengetahuan di bidang hukum, keterampilan menjadi mediator serta berlatih dalam berorganisasi.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat setempat diharapkan terus mendukung kegiatan yang dimiliki oleh FKPM (Forum Kemitran Polri dan Masyarakat) dengan memberi informasi potensi gangguan kambtimas serta sukarela dana untuk keberlangsungan program keria **FKPM** (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat).

e. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengkaji aspek-aspek yang diteliti. Peneliti lain hendaknya dapat melakukan penelitian keberlanjutan tentang strategi FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kadipiro.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2011). Format

- Kepolisian RI di Masa Depan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Herdiansyah, Haris. 2010.

 Metodologi Penelitian

 Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu

 Sosial. Jakarta : Salemba

 Humanika
- Salusu, J. 2003. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo)
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta : Penerbit
 Buku Kompas
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Kepala Kepolisian Republik Indonesia: Jakarta
- Rusnaini. 2018. Service Learning dalam Komunitas Membangun Civic Responsibilty di Indonesia. 13 (2), hlm 43
- Kompas. (2017, 21 Pebruari). Polri Akui Jumlah Personel Polisi Belum Ideal. Diperoleh pada 17 Juli 2017, dari http://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/16592601/polri.akui.jumlah.personel.polisi.belum.ideal

INTERNALISASI NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

(Studi Pada Siswa Kelas X SMA Negeri Gondangrejo)

Ragil Danu Saputro, Rusnaini, Rini Triastuti Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta Email: rusnainisuwandi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas X SMA Negeri Gondangrejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal terpancang. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Validitas data menggunkan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut (1) Tahap persiapan, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, (4) Penarikan Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Pengumpulan Data, (3) Tahap Analisis Data, (4) Tahap Pnyusunan Laporan Penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas X SMA Negeri Gondangrejo melalui tiga tahap, yaitu tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Tahap perencanaan pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme dalam Silabus maupun RPP. Tahap pelaksanaan pembelajaran internalisasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan menghadirkan aspek kultur dalam pembelajaran PPKn tanpa mengubah struktur kurikulum dan keilmuan. Tahap penilaian pembelajaran penguatan dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian sikap untuk mengetahui sikap nasionalisme siswa; (2) Proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri Gondangrejo dipengaruhi oleh faktor-faktor yaktu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung anatara lain kurikulum 2013, materi pembelajaran, metode pembelajaran serta kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, lingkungan sekolah yang heterogen. Faktor penghambat dalam proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKn antara lain: faktor internal dan faktor teknis, faktor internal meliputi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PPKn. Faktor eksternal berupa waktu pembelajaran yang terbatas.

Kata Kunci: Internalisasi, Nilai-Nilai Nasionalisme, Pembelajaran PPKn.

PENDAHULUAN

Indonesia memasuki tatanan kehidupan yang baru setelah kemerdekaan yang ditopang oleh nasionalisme Indonesia dalam sebuah negera yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kawasanya terbentang dari Sabang

Nasionalisme sampai Merauke. Indonesia meniadi modal vang pengerak menuju kemerdekaan hingga ini belum hari juga sepenuhnya terbangun dengan kokoh. Tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara dari waktu ke waktu semakin kuat dan kompleks. Nasionalisme Indonesia sejatinya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan Indonesia merupakan masyarakat yang plural dan multikultural dengan keanekaragaman dan kompleksitas Menurut Nagazumi budayanya. (Juwono, Sudarsono, 2011: 95) ujung dari nasionalisime itu adalah sumpah pemuda tahun 1928. Satu Bangsa, satu Tanah Air. satu Bahasa, Indonesia.

Nasionalisme Indonesia di masa depan hanya mampu bertahan jika seluruh warga iika penyelenggara bisa mengelola dengan baik perbedaan keanekaragaman etnik, budaya, dan bahasa daerah menjadi aset bersama bagi persatuan yang kokoh dalam satu bangunan bersama yang bernama negara Indonesia. Dalam penanaman nilai-nilai upaya nasionalisme pada generasi muda terutama pelajar Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan, karena rasa nasionalisme tidak dapat terbentuk begitu saja. Disekolah tempat merupakan vang bisa digunakan untuk menembuhkan rasa cinta tanah air bagi anak didik. Salah satunya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara langsung, siswa diharapkan dapat menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam lagu itu sehingga memunculkan semangat dan jiwa kebangsaan. Namun sangat disayangkan, semangat nasionalisme kini tampaknya mulai mengendur dikalangan generasi muda.

Banyak permasalahan muncul seperti Kemiskinan, korupsi, lemahnya ketahanan budaya, konflik antar etnik, dan konflik vang mengataskan agama yang marak terjadi merupakan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi nasionalisme kadar Indonesia. Melemahnya nasionalisme dikalangan warga akibat kemiskinan dan rasa malu berdampak serius pada demografi ranah dan status kewarganegaraan. Mengutik berita Tirto.id tanggal 21 Agustus 2017 warga di Kecamatan Lumbia Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara memiliki KTP ganda atau pindah negara di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dikarenakan kebutuhan ekonomi. Warga yang memiliki KTP Malaysia akan mendapat bantuan sebesar 600 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp. 1.920.000 bagi lansia dan 800 Ringgit Malysia atau Rp. 3.200.000 bagi warga usia sekolah. Perpindahan kewarganegaraan yang diawali dengan tindakan warga bermigrasi ke Sarawak Malaysia guna mencari kesejahteraan dan penghidupan vang layak membuktikan bahwa kemisinan dapat menjadi faktor yang sangat merontokkan untuk nasionalisme Indonesia.

Harapannya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan nilai-nilai nasionalisme tersebut dapat dibangun dengan kokoh diatas fondasi Negara Kesatuan Repiblik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tunggal pendekatan studi kasus terpancang. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen. **Validitas** data menggunkan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan sebagai berikut (1) tahap-tahap Tahap persiapan, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, (4) Penarikan Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Pengumpulan Data, (3) Tahap Analisis Data, (4) Tahap Penyusunan Laporan Penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri Gondangrejo

Proses Internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan upaya yang dilakukan guru agar siswa memiliki sikap yang mencerminkan nilai nasionalisme seperti toleransi, cinta tanah air, dan tolong-menolong.

Proses Internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri Gondangrejo terbagi menjadi tiga tahap, yaitu; tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 pasal 19 ayat

"Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien". tersebut juga sesuai dengan desain pembelaiaran **PPKn** vang dikemukakan oleh Winarno (2013: 217) menyatakan bahwa "Desain pembelajaran dalam bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) garis besar meliputi secara perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PKn".

Tahap Perencanaan Pembelajaran

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan upaya awal yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilainilai nasionalisme dalam pembelajaran. Nilai-nilai nasionalisme diintegrasikan yang dalam Silabus dan RPP yaitu nilai cinta tanah air, tolong-menolong, dan nilai toleransi. Pengintegrasian nilainasionalisme dalam menjadi landasan bagi guru dalam memberikan nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKn. Rencana pelaksanaan pembelajaran dijadikan sebagai landasan dalam menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, agar pembelajaran menjadi jelas dan sistematis. Hal tersebut sesuai dengan fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikemukakan oleh Kunandar (2011: 264), "Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar (kegiatan

pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien".

Tahap Pelaksanaan Pembelajaran

Guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dalam menentukan materi pembelajaran telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, relevan dengan kebutuhan siswa, serta sesuai dengan kondisi masyarakat, tidak hanya bersumber pada buku tetapi juga dari internet maupun realita yang ada di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hardjanto (2005: 222) bahwa;

> Pemilihan materi harus pembelajaran sesuai dengan kriteria pemilihan materi yaitu; Sesuai tujuan pembelajaran, materi pembelajaran supaya terjabar, relevan dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kondisi masvarakat. mengandung segi-segi etik, tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis, Materi pembelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat.

Dari materi yang ditayangkan yaitu indahnya video toleransi menunjukkan bahwa materi tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran mengamalkan vaitu perilaku toleransi dan harmoni keberagaman kehidupan bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. dengan Materi tersebut relevan kebutuhan siswa yaitu untuk membekali siswa agar memiliki sikap toleransi. Metode vang digunakan guru dalam membentuk sikap yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme pada siswa vaitu

dengan memberikan contoh pengamalan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari dan dengan memberikan penguatan. Hal tersebut senada dengan Klausmeir (Kusaeri dan Suprananto, 2012: 188) menyatakan bahwa "ada tiga model belajar dalam rangka pembentukan sikap. Tiga model itu adalah: mengamati dan meniru; menerima penguatan dan menerima informasi verbal".

Pembelajaran model pertama berlangsung melalui pengamatan dan peniruan. Bandura (Kusaeri dan Suprananto, 2012: 188) menyatakan bahwa "Proses pembelajaran ini pembelajaran melalui model (learning through modelling). Menurut Bandura, banyak tingkah laku manusia dipelajari melalui model, yaitu dengan mengamati dan meniru tingkah laku atau perbuatan orang lain, terutama orang-orang berpengaruh". memberikan pengaruh yang besar dalam pembelajaran begitu pula memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap siswa, yakni guru harus menjadi tauladan yang baik bagi para siswanya.

Klaustmeir dalam Kusaeri dan Suprananto (2012: 189) menyatakan bahwa;

> Model kedua menerima peguatan. Pembelajaran model berlangsung ini melalui pembiasaan operan, vaitu dengan menerima atau tidak menerima atas suatu respons yang ditunjukkan. Penguatan ganjaran dapat berupa (penguatan positif) dan dapat berupa hukuman (penguatan negatif). Model ketiga, menerima informasi verbal. Informasi tentang berbagai hal dapat diperoleh melalui lisan

atau tulisan. Informasi tentang objek tertentu yang diperoleh oleh seseorang akan mempengaruhi pembentukan sikapnya terhadap objek yang bersangkutan.

Penguatan yang dilakukan secara berkesinambungan diharapkan dapat memotivasi siswa untuk terus mengulangi perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan *Teori Operant Conditioning* yang dikemukakan oleh Skinner dalam Dale H. Schunk (2012: 124) yang menyatakan bahwa:

Jika terjadinya sebuah operan diikuti oleh penyajian sebuah stimulus yang menguatkan, kekuatannya akan meningkatkan... Jika terjadinya sebuah operan yang telah diperkuat melalui pengkondisian tidak diikuti oleh stimulus yang menguatkan tersebut, kekuatannya akan menurun.

Pendekatan yang dilakukan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme vaitu dengan memberikan materi-materi yang nilai-nilai berkaitan dengan nasionalisme dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Serta dengan memberikan contoh penginternalisasian nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan pendekatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan menurut Banks (Zamroni, 2011: 155) pendekatan yang digunakan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di **SMA** N Gondangrejo dalam

menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme vaitu menggunakan tahapan yang kedua, yaitu dengan melakukan penambahan isi materi pembelajaran tanpa merubah struktur kurikulum-keilmuan. Penambahan isi materi dilakukan guru dengan memberikan tanyangan video pembelajaran berupa video indahnya keberagaman, konflik antar umat beragama. Serta memberikan penekanan akan pentingnya memiliki mencerminkan sikap yang nasionalisme seperti: sikap cinta tanah air, sikap toleransi, sikap tolong-menolong.

Tahap Penilaian Pembelajaran

Penilaian yang digunakan untuk mengukur sikap nasionalisme siswa, guru menggunakan teknik penilaian diri serta lembar observasi untuk menilai sikap nasionalisme siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut senada dengan pendapat Winarno (2012: 220) menyatakan "Penilaian bahwa dalam PKn dinyatakan dan diarahkan sebagai penilaian kepribadian". Penilaian kepribadian dilakukan dengan cara mengamati perubahan tingkah laku dan sikap guna menilai afeksi perkembangan dan kepribadian peserta didik.

Tahap penilaian pembelajaran, dilakukan penguatan menggunakan teknik penilaian sikap berupa angket, penguatan dapat dibuktikan melalui pernyataanpernyataan yang terdapat dalam angket yang memuat indikator nilainilai nasionalisme. Hal tersebut senada dengan pendapat Kusaeri dan Suprananto (2012: 187) menyatakan bahwa "angket merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan dalam kegiatan pengukuran dan pendidikan. penelitian Angket tersebut umumnya digunakan untuk mengungkap opini atau sikap anak terhadap suatu permasalahan". Instrumen penilaian yang dibuat oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dilaporkan dalam instrumen penilaian diri tersebut terdapat 45 (empat puluh lima) pernyataan yang terdiri dari 32

(tiga puluh dua) pernyataan positif dan 13 (tiga belas) pernyataan negatif. Instrumen atau angket tersebut menggunakan teknik skala sikap menurut Likert, pada angket tersebut terdapat 4 pilihan jawaban yaitu Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju.

Tabel 4.1 Skor Pilihan Jawaban Angket yang Dibuat Oleh Guru PPKn

Pilihan Jawaban	Pernyataan Positif	Pernyataan Negatif
Angket	(Skor)	(Skor)
Sangat Setuju	4	1
Setuju	3	2
Tidak Setuju	2	3
Sangat Tidak Setuju	1	4

Sumber. Data Peneliti tahun 2019

Petunjuk Penskoran:

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4

Skor tertinggi = 4 x 45 pernyataan = 180

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

Skor $\times 4 =$ skor akhir Skor Tertinggi

Peserta didik memperoleh nilai:

Sangat Baik : apabila memperoleh skor $3,20-4,00 \ (80-100)$

Baik : apabila memperoleh skor 2,80 -3.19 (70-79)

Cukup : apabila memperoleh skor 2.40 - 2,79 (60 - 69)

Kurang : apabila memperoleh skor kurang 2.40 (kurang dari 60%)

Hasil penilaian sikap nasionalisme pada siswa kelas X SMA Negeri Gondangrejo menunjukkan bahwa rata-rata skor yang diperoleh yaitu 2,97 dengan kategori Baik.

Berdasarkan nilai penilaian sikap nasionalisme pada siswa kelas X SMA Negeri Gondangrejo diperoleh rata-rata nilai 2,97 dengan skala maksimal 4 termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan nilai sikap nasionalisme tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri Gondangrejo telah berjalan dengan baik.

Faktor yang Mempengaruhi Proses Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran PPKn

Proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas X SMA N Gondangrejo tentu tidak dilepaskan dari adanya pengaruh beberapa faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan faktor penghambat internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKn dapat dijelaskan sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 vakni ibu **Endang** Warjiyantiningrum diatas menegaskan bahwa faktor yang mendukung penginternalisasian nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran **PPKn** meliputi;

pertama, faktor kurikulum 2013 dimana dalam kurikulum 2013 tidak hanya menekankan pada (kognitif), pengetahuan aspek tetapi juga menekankan pada aspek sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor) secara proporsional. Penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi ketiga ranah tersebut. Kedua, bahan ajar dalam buku paket yang diterbitkan oleh Kemendikbud sudah memunculkan nilai-nilai keberagaman, baik melalui materi maupun melalui refleksi untuk merenungkan sikap dan perilaku kehidupan dalam sehari-hari. penilaian diri, tugas mandiri, maupun uji kompetensi. Ketiga, kompetensi pedagogik guru juga berpengaruh sangat dalam internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Keempat, lingkungan sekolah yang heterogen juga sangat mendukung internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKn, karena dengan kondisi lingkungan heterogen yang tersebut siswa dapat mempraktikkan langsung nilainilai nasionalisme tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor Penghambat

Proses internalisasi nilainilai nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA N Gondangrejo sudah berjalan cukup baik, namun tak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya hambatan, yaitu masih ada siswa yang tidak berminat belajar siswa terhadap mata pelajaran Sehingga PPKn. anak

berpartisipasi dalam pembelajaran mengabaikan apa oleh disampaikan guru. Hal tersebut senada dengan William James dalam Usman (2004: 27) yang menyatakan bahwa "Minat merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan belajar peserta didik. Minat tidak diekspresikan hanya melalui pernyataan yang menunjukkan anak didik lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya, tetapi diimplementasikan juga dapat melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan". Faktor teknis yang menjadi penghambat yaitu pembelajaran. waktu Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan hanya mendapatkan jatah waktu 2 jam pelajaran per minggu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penemuan dilapangan dan analisis data, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

- 1. Proses Internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri Gondangrejo melalui tiga tahap yaitu, melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.
 - a. Tahap perencanaan pembelajaran dalam tahap ini internalisasi nilai-nilai dengan nasionalisme mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Indikator nilai nasionalisme yang diintegrasikan dalam RPP yaitu nilai cinta tanah air, nilai

- toleransi, nilai tolong menolong.
- b. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran dalam tahap ini guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memberikan penguatan dengan menggunakan pendekatan kedua menurut Banks (Zamroni. 2011:155) vaitu "Dengan menggunakan penambahan isi dan materi pembelajaran tanpa merubah struktur kurikulum-keilmuan". Berdasarkan tahapan penginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran menurut Banks dalam Zamroni (2011:153),internalisasi nilai-nilai nasionalisme di SMA N Gondangrejo telah sampai pada kelima vaitu struktur terekonstruksi dan kultur sekolah, dimana guru maupun sekolah memberikan jaminan kepada semua siswa tanpa terkecualai untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Guru PPKn dalam pelaksanaan pembelajaran selalu memberikan penguatan secara terus menerus berkesinambungan. Penguatan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar tumbuh kedasaran dalam diri siswa untuk mengamalkan yang mencerminkan sikap nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat.
- c. Tahap Penilaian pembelajaran, dalam tahap ini internalisasi nilai-nilai nasionalisme dilakukan guru PPKn dengan teknik penilaian sikap dengan instrumen lembar penilaian diri

- serta lembar observasi untuk menilai penerapan sikap siswa yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme.
- 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran PPKn

a. Faktor Pendukung

Proses Internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan di **SMA** Kewarganegaraan Negeri Gondangrejo sudah berialan cukup baik. hal tersebut karena adanya faktor pendukung dalam internalisasi nilai-nilai nasionalisme, faktor tersebut antara lain kurikulum 2013, materi pembelajaran, metode pembelajaran serta kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran dan lingkungan sekolah yang heterogen.

b. Faktor Penghambat

Proses internalisasi nilai nasionalisme di SMA Negeri Gondangrejo memang sudah berjalan cukup baik, namun juga tidak dapat dilepaskan dari kendala dalam pengimplementasian, hal tersebut karena adanya faktor penghambat vaitu faktor internal dan faktor teknis, faktor internal meliputi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. dan sedangkan faktor teknis berupa waktu pembelajaran yang terbatas.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan keterbatasan penelitian, saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut;

1. Bagi Sekolah

Sekolah hendaknya tetap meneruskan kebijakankebijkan yang mendukung penginternalisasian nilai-nilai nasionalisme.

2. Bagi Guru

- a. Guru hendaknya sering memberikan motivasi dan inovasi saat pelajaran agar dapat meningkatkan minat belajar siswa.
- b. Guru hendaknya selalu memberikan penguatan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam pembelajaran agar tumbuh sikap yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme, seperti nilai toleransi, nilai tolong-menolong, dan nilai cinta tanah air.

3. Bagi Siswa

a. Siswa hendaknya menerapkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme tidak hanya dilingkungan sekolah saja tetapi juga dilingkungan masyarakat.

4. Bagi Peneliti Lain

a. Perlu dilakukan penelitian lanjut berkenaan dengan pengutan nilai-nilai nasionalisme melalui kegiatan ekstrakulikuler.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Husein. (2017, 21 Agustus).
Saat Ribuan WNI Ingin
Menjadi Warga Malaysia.
Tirto. Id. Diperoleh pada
tanggal 8 Februari 2019,

- dari http://tirto.id/saat ribuan-wni-ingin-menjadiwarga-malaysia-cu2z
- Anderson, B. (1991). Imagined Community: Komunitas-Komunitas Terbayang. Terjemahan oleh Omi Intan Naomi. 2002. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Hadrjanto. (2005). *Evaluasi Pendidikan.* Jakarta : Rineka

 Cipta
- Kunandar. (2011). Guru Profesional Berstandar Nasional. Bandung: Yrama Widya
- Kusaeri dan Suprananto. (2012).

 **Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhaimin. (1996). Strategi Belajar Mengajar. Surabaya: Citra Media
- Nasir, Ridwan. (2010). Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Schunk, Dale H. (2012). *Teori-Teori Pembelajaran: Perspektif Pendidikan.* Yogyakarta:

 Pustaka Pelajar
- Sjarkawi. (2006).Pembentukan Kepribadian Anak (peran moral, intelektual, emosional, dan sosial sebagai wujud integrasi membangun iati diri. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sudarsono, Juwono (2011).

 Nasionalisme dan

 Ketahanan Budaya di

 Indonesia. Jakarta. LIPI

 Press

Sunyoto,	Usman.	(2004).		
	Pembangunan	an dan		
Pemberdayaan Masyarakat.				
Yogyakarta: Pustaka Pelajar				
Tjahyadi	, Sidung.	(2010).		
Nasionalisme da				
	Pembangunan	Karakter		
	Bangsa Dalar	n Perspektif.		
	Yogyakarta:	Universitas		
	Gajah Mada			
Winarno	. (2012).	Pendidikan		
Kewarganegaraan.				
	Surakarta:	Universitas		
Sebelas Maret				
	. (2013).	Pembelajaran		
Pendidikan				
Kewarganegaraan, Isi,				
Strategi, Penilaian. Jakarta:				
Bumi Aksara				
Zamroni	. (2011).	Pendidikan		
	Demokrasi	pada		
	Masyarakat	Multikultural.		
	Yogyakarta: (
	Utama			

PENERAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN PACITAN

Sukarmin, Sarwanto, Moh. Rohmadi Pendidikan Fisika, Universitas Sebelas Maret Surakarta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta Email: sukarmin@staff.uns.ac.id

Abstrak

saat ini sangat rentan disusupi oleh paham dan gerakan Sekolah radikalisme. Hal ini dikarenakan belum ada satu pun kebijakan spesifik untuk melindungi atau memproteksi sekolah dari penetrasi pahan dan gerakan radikalisme. Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap siswa di sekolah terhadap paham radikalisme maka pendidikan nilai-nilai kebangsaan untuk siswa sekolah diperlukan sebagai bentuk kepedulian dari setiap pihak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga terutama sekolah. Pendidikan nilai untuk siswa akan terbentuk jika semua pihak memilki kebangsaan kesadaran akan pentingnya pendidikan nilai kebangsaan dimulai semenjak dini. Guru adalah posisi paling strategis untuk membentuk karakter siswa. Pendidikan nilai kebangsaan pada siswa sekolah inilah yang menjadi dasar pembentukan awal karena meluruskan sebatang ranting jauh lebih mudah daripada meluruskan sebatang pohon, maka dari itu pendidikan nilai kebangsaan yang paling efektif adalah pendidikan pada siswa sekolah. Pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa siswa sekolah harus dilakukan dengan tepat. Jika hal ini tidak bisa tercapai, pesan moral yang akan disampaikan orang tua dan pendidik kepada siswa menjadi terhambat. Pengembangan nilai moral untuk siswa sekolah bisa dilakukan di dalam tiga tri pusat pendidikan yang ada. Yaitu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam pengembangan nilai moral untuk siswa sekolah perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini dikarenakan siswa sekolah adalah anak yang sedang dalam tahap perkembangan praoperasional Maka dari itu, tim pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian berkaitan dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan terhadap siswa sekolah. bertujuan untuk mengatasi perpecah-belahan masyarakat Indonesia dan mencegah radikalisme siswa. mengingat banyaknya kelompok separatis lahir di Indonesia ini maka salah satu cara untuk memeutuskan rantai gejolak yang bertujuan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dengan menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan terhadap siswa sekolah.

Kata Kunci: Nilai Kebangsaan, SMA, radikalisme, siswa, OSIS

PENDAHULUAN

Sekolah saat ini sangat rentan disusupi oleh paham dan gerakan radikalisme. Hal ini dikarenakan belum ada satu pun kebijakan spesifik untuk melindungi atau memproteksi sekolah dari penetrasi pahan dan gerakan radikalisme. Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap siswa di sekolah terhadap paham radikalisme maka pendidikan nilai-nilai kebangsaan untuk diperlukan siswa sekolah sebagai bentuk kepedulian pihak, baik pemerintah, setiap masyarakat, keluarga terutama sekolah. Pendidikan nilai untuk akan kebangsaan siswa terbentuk iika semua pihak memilki kesadaran akan pendidikan nilai pentingnya kebangsaan dimulai semenjak dini. Guru adalah posisi paling membentuk strategis untuk karakter siswa. Pendidikan nilai kebangsaan pada siswa sekolah inilah yang menjadi dasar pembentukan awal karena meluruskan sebatang ranting jauh lebih mudah daripada meluruskan sebatang pohon, maka dari itu pendidikan nilai kebangsaan yang paling efektif adalah pendidikan pada siswa sekolah.

Pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa siswa sekolah harus dilakukan dengan tepat. Jika hal ini tidak bisa pengembangan nilai moral untuk sekolah perlu dilakukan siswa dengan sangat hati-hati. Hal ini dikarenakan siswa sekolah adalah anak yang sedang dalam tahap perkembangan praoperasional konkret seperti yang dikemukakan oleh Piaget. Sedangkan nilai-nilai moral merupakan konsep-konsep yang abstrak. Sehingga dalam hal ini siswa belum bisa dengan sertamerta menerima apa yang diajarkan guru atau orang tua yang sifatnya abstrak secara cepat. Untuk itulah orang tua dan pendidik pandai-pandai dalam memilih dan menentukan metode yang akan digunakan untuk menanamkan nilai moral kepada anak agar pesan moral yang ingin disampaikan guru dapat

benar-benar sampai dan dipahami oleh siswa untuk bekal kehidupannya nanti.

Bangsa merupakan suatu "terbayang". komunitas Para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak tahu dan tidak kenal dengan sebagaian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu. bahkan mungkin pula tidak mengenal tentang mereka. Hal terpenting dalam berdirinya sebuah tetap bangsa adalah adanya perasaan kebersamaan dan persaudaraan sebagai anggota komunitas bangsa tersebut. Hal tersebut muncul adalah akibat kuatnya akar-akar nasionalisme (Mahfud, 2014: 7).

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan "harga mati" bagi tetap berdirinya bangsa. Pancasila dijadikan sebagai falsafah perilaku kehidupan bersama, yang selain mendasari wacana kehidupan seseorang juga memiliki kontekstual

tercapraipannyaesadahanral kehidupkan disampaikan or berpolitik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan tahap kehidupan global dalam membangun dunia. **UUD** 45 sebagai pedoman tatanan kehidupan berbangsa, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai acuan dalam menyikapi kehidupan bersama dalam situasi keadaan bangsa yang bersifat multikultur. Indonesia juga memiliki kedaulatan untuk menjalankan kemerdekaan memiliki budaya 2014; Raharjo, 2003: (Saddhono, 185)

Menurut Samuel Hutingthon pernah berkomentar pada akhir abad ke- 20, bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi paling besar untuk hancur, setelah Yugoslavia dan Uni Soviet

akhir abad ke-20 ini. Demikian Cliffrod Gertz, antropolog juga Indonesianis ini pernah yang mengatakan; kalau bangsa pandai-pandai Indonesia tidak mengatur keanekaragaman etnik, budaya, dan solidaritas etnik, maka Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil (Sumarsono, 2001)

Maka dari itu, tim pengabdi kegiatan pengabdian mengajukan berkaitan dengan penanaman nilainilai kebangsaan terhadap siswa sekolah, bertujuan untuk mengatasi perpecah-belahan masyarakat Indonesia dan mencegah ini radikalisme siswa, mengingat banyaknya kelompok separatis lahir di Indonesia ini maka salah satu untuk cara memeutuskan rantai gejolak yang bertujuan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dengan menanamkan nilai-nilaiwawasan kebangsaan terhadap siswa sekolah.

SMA Bhinneka Karya 3 dan SMK Bhinneka Karya 5 adalah bagian dari SMA di Kabupaten Pacitan dan

merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah berupaya yang menanamkan nilainilai kebangsaan kepada siswaini siswinya. Sekolah mempunyai keunikan tersendiri atau ciri khas yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain yang sederajat. Ciri khas tersebut yang kemudian menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai kebangsaan pada siswa. Keunikan atau ciri khasnya vaitu: pertama, mengedepankan pendidikan budi luhur, yaitu sebagai mana yang

visi misinya. ditegaskan dalam pendidikan Kedua. berupa budaya-budaya lokal (Jawa) dolanan anak, dan anak-anak juga dilatih mewarnai lukisan batik vang sudah disediakan oleh sekolah (Observasi Tim, 2018). Kemudian yang, ketiga, perlakuan guru terhadap siswa seperti orang tua terhadap anaknya, dan sikap siswa terhadap gurunya seperti anak orang tuanya. kepada Kelima, diberikan pendidikan keistimewaan, salah satunya keistimewaan pendidikan itu. mengenalkan budaya, mengunjungi berseiarah tepat seperti, Candi Borobudur, museum, kraton dan lain-lainnya (wawancara Guru)

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam hal penanaman nilai-nilai kebangsaan terhadap Siswa-siswa SMA dan SMK Bhinneka Karya Kabupaten Dengan ini diharapkan Pacitan. informasi yang diperoleh dari hasil pengabdian ini bisa menjadi sumbangsih berarti dan penting bagi lembaga pendidikan, di dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan terhadap siswa sekolah.

METODE PENELITIAN

Tempat pelaksanaan pengabdian Pacitan. ini berada di Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Dalam ini dilampirkan proposal pernyataan 2 mitra, vaitu SMA Negeri 2 Pacitan dan **SMK** Pringkuku Pacitan. Waktu program pengabdian pelaksanaan ini direncanakan 8 bulan dan detail kegiatan terlampir pada jadwal pelaksanaan program pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian ini direncanakan dalam 3 kegiatan masingmasing utama yang mempunyai bentuk kegiatan yang berbeda. Kegiatan tersebut adalah Tahap Persiapan; Tahap persiapan ini berkaitan dengan hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan pengabdian Persiapan awal yang dilakukan adalah survei awal ke tempat atau pengabdian lokasi untuk mendapatkan data awal. Setelah mendapatkan awal data baru menyusun rencana kegiatan pengabdian sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi guruguru dan siswa dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan di **SMA** Kabupaten Pacitan. Pada tahap ini juga dilakukan prakondisi dalam pelaksanaan implementasi kebangsaan nilai di lingkungan sekolah Kabupaten Pacitan.

Pelaksaaan; Tahap Tahap adalah pelaksanaan inti dari pengadian ini yang akan dilakukan di sekolah. Hasil pengumpulan data di sekolah kemudian dianalisis dan diklasifikasikan halhal yang dapat dipadukan bahan untuk mengadakan implementasi nilai-nilai kebangsaan bagi gurudan siswa-siswa SMA di guru Kabupaten Berdasarkan Pacitan. hasil analisis tersebut. dibuatlah sebuah pelatihan atau pendampingan untuk guru dan siswa dalam implementasi dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan. Diharapkan dengan pelatihan atau pendampingan ini dapat meningkatkan kesadaran bersama akan nasionalisme dan mencegah paham radikalisme, terutama bagi siswa SMA di Kabupaten Pacitan.

Tahap Evaluasi: Tahap evaluasi adalah tahap akhir dari pengabdian ini yang akan dilakukan oleh tim dosen dengan tim pengabdian mengenai evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan para guru dan siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan berkaitan implementasi nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekolah dalam mencegah paham radikalisme pada siswa-siswa SMA Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan program pengadian ini direncanakan berlangsung 8 bulan yang dimulai pada awal tahun 2018. Pelaksanaan tersebut diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi.

Pada setiap kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Riset Group harus terarah berkaitan dengan target sasarannya. Adapun target luaran ini program pengabdian dapat dipilah menjadi dua hal, yaitu produk kegiatan pengabdian dan hasil program pengabdian. Penjelasan dari luaran tersebut adalah dalam pelaksanaan pengabdi pengabdian ini. tim mempunyai indikator tercapainya kegiatan. Capaian produk

> program pengabdian ini dapat dipaparkan dalam penjelasan yaitu tersosialisasikan n nilai-nilai kebangsaan

program nilai-nilai kebangsaan yang merupakan implementasi dari 4 konsensus nasional di Kabupaten Pacitan. Dengan adanya pengabdian ini diharapkan siswa-siswa

SMA di Kabupaten Pacitan mencegah paham radikalisme siswa- siswa SMA di Kabupaten Pacitan. Guru dapat membantu

Pacitan sema

dalam penerapan dan implementasi nilai-nilai kebangsaan tersebut melalui kegiatan pembelajaran dan memberi contoh kepada dan di siswa-siswa di sekolah masyarakat. Terbitnya sebuah peraturan di sekolah yang tertulis maupun tidak tertulis untuk dapat melaksanakan nilai-nilai kebangsaan tersebut di lingkungan sekolah, misalnya dengan menyanyikan lagu-lagu nasional memulai saat akan proses pembelajaran di kelas dan kegiatan lainnya yang menguatkan nilai-nilai kebangsaan bagi guru dan siswa.

Produk Kegiatan Pengabdian yaitu buku pedoman atau panduan mengenai penerapan implemetasi nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekolah bagi siswa dan guru, khususnya tingkat SMA di Kabupaten Pacitan. Terbitnya dokumentasi dalam pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan bagi guru dan siswa SMA di Kabupaten Pacitan dan dikelola oleh sekolah dengan bimbingan tim pengabdian dari Universitas Sebelas Maret. Modul atau bahan ajar mengenai implementasi dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan bagi guru dan siswa SMA di Kabupaten Pacitan. Artikel jurnal pengabdian kegiatan implementasi mengenai dan nilai-nilai pelaksanaan kebangsaan dalam mencegah paham radikalisme pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pacitan, Jawa Tengah.

Hasil Program Pengabdian ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Secara garus besar hasil program pengabdian ini dapat dijelaskan yaitu dalam jangka pendek, para siswa dan guru di

Kabupaten Pacitan, khususnya tingkat SMA dapat meningkatkan kemampuannya dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan yang dapat menangkal paham radikalisme di sekaolah terutama untuk siswa. Para guru dan siswa termotivasi untuk selalu melaksanakan nilai-nilai kebangsaan dalam ramgka menjaga kondisifitas lingkungan sekolah. Dalam jangka panjang dapat terus dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan nilai-nilai yang berkelanjutan kebangsaan yang ditujukan untuk guru dan siswa di tingkat Sekolah Menengah (SMA), khususnya Atas Kabupaten Pacitan, Jawa Tengah. Terlebih dengan adanya sistem pendidikan nilai- nilai kebangsaan yang terprogram oleh para guru dan siswa sehingga dengan adanya karakter yang kuat penanaman diharapkan dapat terus dijadikan lingkungan sekolah sebagai benteng utama Pancasila yang dilaksanakan Kabupaten Pacitan menghasilkan genersi muda yang toleran dan anti radikalisme.

KESIMPULAN

pengabdian ini Keberhasilan berdampak pada tentunya Universitas Sebelas Maret sebagai penyelenggara. Kegiatan mencerminkan bahwa salah satu tanggung jawab perguruan tinggi terhadap masyarakat tewujud dalam kegiatan pengabdian ini, yang khususnya berkaitan penerapan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini juga mencerminkan bahwa nilai-nilai kebutuhan penguatan kebangsaan sangat diperlukan lingkungan sekolah sebagai sarana pencegahan tindakan

radikalisme di kalangan siswa. Hal ini menjadi salah satu tanggung jawab akademik bagi tim dosen atau pengabdian sebagai bentuk pengabdian ilmu yang telah mendapatkan ilmunya di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R.. 1980. *Gotong Royong*: Suatau karakterstik bangsa Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Kaelan. 1987. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Liberty
- Isran Noor. 2012. Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI. Jakarta: Penerbit APKASI
- Mahfud MD. 2014. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta Raharjo Satjipto. 2013. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kompas Saddhono, Kundharu. 2014. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia: Teori dan Praktik. Yogyakartaa; Graha Ilmu.
- Sumarsono. 2001.Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Tim. 2017. Nilai-nilai Krebangsaan yang Bersumber dari Pancasila. Jakarta: Lemhannas RI
- Tim. 2017. Nilai-nilai Krebangsaan yang Bersumber dari UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Lemhannas RI
- Tim. 2017. Nilai-nilai Krebangsaan yang Bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika (BTI)Jakarta: Lemhannas RI
- Tim. 2017. Nilai-nilai Krebangsaan yang Bersumber dari Negara Kresatuan Republik Indonesia (NKRI). Jakarta: Lemhannas RI



Jurnal PPKn

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3Knl)-JAWATENGAH